



Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan RI

LAPORAN TAHUNAN 2013



Menjadi unit terpercaya dalam perumusan kebijakan fiskal yang antisipatif dan responsif

MISI >

1. Menyajikan informasi dan pemantauan ekonomi dan sektor keuangan yang terkini
2. Mewujudkan rumusan kebijakan pendapatan Negara, APBN, serta ekonomi makro yang dipercaya dengan didukung hasil kajian (research based policy)
3. Mewujudkan pengelolaan risiko fiskal yang prudent
4. Mewujudkan pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang memberikan manfaat optimal
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional melalui peningkatan kompetensi dan disiplin pegawai
6. Memutakhirkan instrumen kebijakan

Sambutan

KEPALA BKF

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sadar akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Laporan Tahunan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BKF, sebagai unit perumusan kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan, kepada para pemangku kepentingan.

Di tahun 2013, perekonomian dunia masih belum pulih dari krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2007-2008. Indonesia tentunya tidak lepas dari pengaruh tersebut. Demi mencapai target perekonomian yang telah ditentukan, BKF terus mengeluarkan berbagai kebijakan, baik secara responsif maupun antisipatif, untuk memastikan terjaganya stabilitas perekonomian nasional. Hal itu juga dilakukan dengan tetap mempertahankan kesinambungan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan di tahun-tahun sebelumnya.

Optimalisasi penerimaan, baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak, efektivitas dan efisiensi pengeluaran, serta pengelolaan risiko fiskal dan kerja sama internasional merupakan fokus utama dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh BKF. Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, BKF terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan instansi-instansi dan pihak-pihak terkait untuk menghasilkan kebijakan yang komprehensif.

Selain itu, tahun 2013 juga ditandai oleh beberapa kejadian penting. Tahun ini merupakan tahun dimana Otoritas Jasa Keuangan mulai beroperasi. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagian fungsi yang dahulu dijalankan oleh Bapepam-LK dijalankan oleh Badan Kebijakan Fiskal di bawah Tim Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan. Fungsi yang dijalankan antara lain adalah perumusan kebijakan dalam rangka mendorong pendalaman sektor keuangan dan keuangan inklusif, serta menjaga stabilitas sektor keuangan. Indonesia juga menjadi tuan rumah dari pelaksanaan kegiatan pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di tahun 2013. Pelaksanaan pertemuan APEC yang tersebar di berbagai provinsi merupakan bentuk dukungan Indonesia untuk perekonomian dunia yang stabil. Pelaksanaan kegiatan ini dinilai sukses, dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi Indonesia.

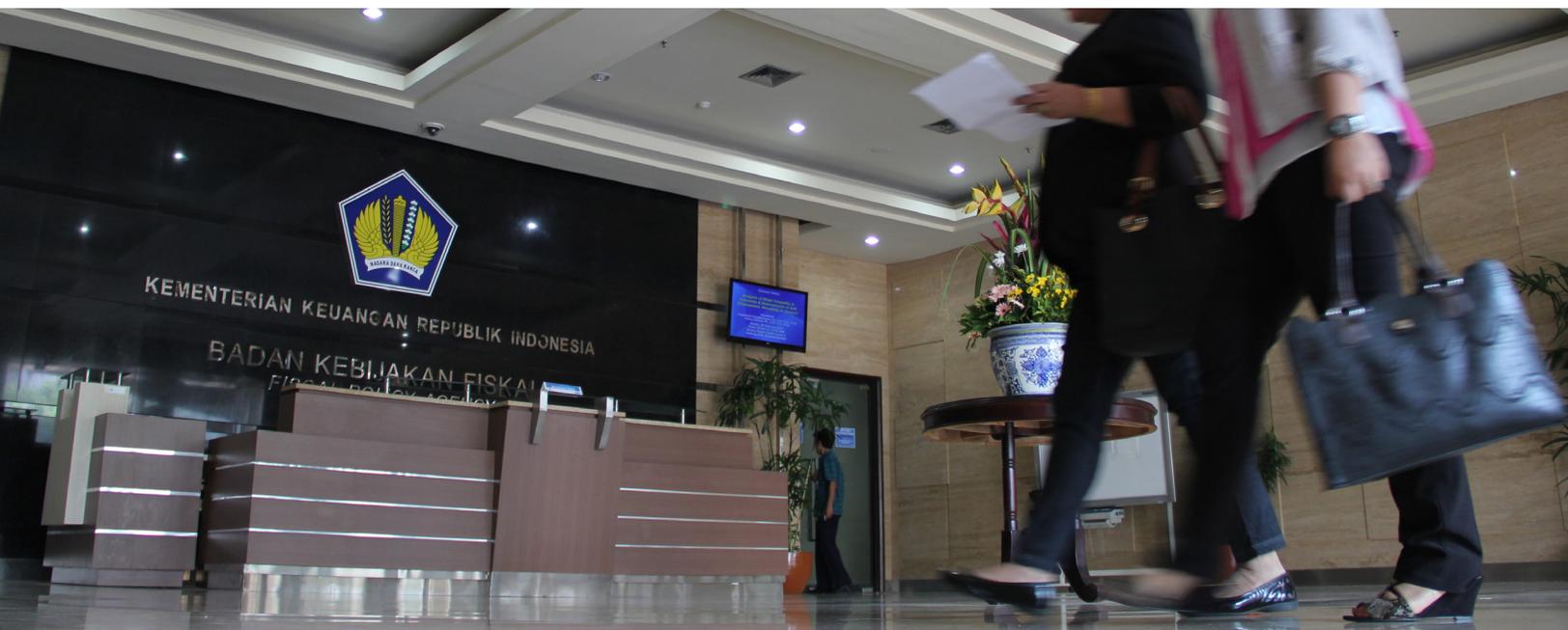
Pada akhirnya, seluruh pencapaian yang diperoleh Badan Kebijakan Fiskal tentunya merupakan buah hasil kerja keras dari seluruh pegawai BKF yang senantiasa menjalankan tugas dengan dedikasi tinggi. Atas hal tersebut, kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh



BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

SEJARAH BKF



“Sejak berlakunya UU paket reformasi keuangan negara, BKF telah melakukan penataan organisasi meliputi pemisahan, penggabungan, penajaman fungsi”

Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN sejak awal orde baru, yaitu Repelita I tahun anggaran 1969/1970, Dikoordinasikan oleh Staf Pribadi Menteri Keuangan, dan sejak tahun 1975 dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Penelitian, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Untuk mendukung perkembangan pembangunan yang semakin pesat, pada tahun 1985 dibentuk suatu unit organisasi setingkat eselon II yang khusus menangani

penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, yaitu Pusat Penyusunan dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PPA-APBN), yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan.

Sesuai dengan perkembangan keadaan. Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN tidak hanya membahas mengenai perkembangan keuangan negara, namun juga erat kaitannya dengan perkembangan perkreditan dan neraca pembayaran, sehingga pada tahun 1987 dibentuk unit setingkat eselon I, yaitu Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan dan Neraca Pembayaran (BAKNP&NP) yang merupakan penggabungan tugas pokok dan fungsi PPA-APBN dengan sebagian tugas fungsi Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri dan Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, yang dituangkan dalam Keppres Nomor 36 Tahun 1987, tentang Susunan dan Organisasi Departemen,

dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/KMK.01/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan dan Neraca Pembayaran.

Dalam tahun 1993, susunan dan uraian tugas BAKNP&NP dikembangkan dengan memasukkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan dan Moneter. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.01/1993, tanggal 6 Januari 1993, nama BAKNP&NP diubah menjadi Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM). BAKM mempunyai empat biro, yaitu Biro Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Biro Analisa Moneter, Biro Analisa Keuangan Daerah, dan Biro Pengkajian Ekonomi dan Keuangan, serta Sekretariat Badan. Selanjutnya, dengan Keputusan Presiden Nomor 177 tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan tanggal 3 Januari 2001, BAKM disempurnakan dan namanya diganti menjadi Badan Analisa Fiskal (BAF), dengan memisahkan Biro Analisa Keuangan Daerah dan mengembangkan Pusat Analisa APBN, menjadi dua Pusat, yaitu Pusat Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran dan Pusat Analisa Belanja Negara.

Untuk menyesuaikan dengan kondisi yang cepat berubah, serta dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi di Departemen Keuangan, pada tanggal 23 Juni 2004 dilaksanakan reorganisasi dengan membentuk Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (BAPEKKI) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 2004 dan merupakan penggabungan dari beberapa unit eselon II yang berasal dari Badan Analisa Fiskal (BAF) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Dirjen PKPD) serta Biro Kerjasama Luar Negeri dari Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Adapun Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/

KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan yaitu Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan (Puspeku), Pusat Pengkajian Perpajakan, Kepabeanan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Puspakep), Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (Puspekda), Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah (Puseparda), Pusat Kerjasama Internasional (Puskerin), serta Sekretariat Badan.

Dengan adanya reorganisasi di Departemen Keuangan, pada tahun 2006 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 nama Bapekki berubah menjadi Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan yaitu Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan Belanja Negara, Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Pusat Kerjasama Internasional serta Sekretariat Badan. Kemudian seiring dengan berlakunya reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan dan penyesuaian tugas pokok dan fungsi BKF sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan maka struktur organisasi di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal menjadi Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional, dan Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal. Dalam perkembangannya, BKF telah menjalankan proses organization reinventing dalam bentuk penataan organisasi. Sejak berlakunya UU paket reformasi keuangan negara, BKF telah melakukan penataan organisasi meliputi pemisahan, penggabungan, penajaman fungsi. Seiring dengan berlakunya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, BKF telah mengalami perubahan struktur organisasi dan tata kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 dan PMK 184/PMK.01/2011.

PROFIL ORGANISASI

PEJABAT BKF

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Bambang brodjonegoro Lahir di Jakarta pada tanggal 13 Oktber 1966 , menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1990. Meraih gelar Master of Arts (MA) dari University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika tahun 1995. Selanjutnya gelar Doctor of Philosopy (Ph.D) dari universitas yang sama diperoleh pada tahun 1997.

Perjalanan Karirnya pernah menjabat sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dari tahun 2005-2009. Pada tahun 2009-2010 pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Islamic Research and Training Institute (IRTI) di Islamic Development Bank (IDB) Jeddah. Pada awaltahun 2011 kembali ke tanah air untuk mengabdikan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal.



Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan



MULABASA HUTABARAT

SEKRETARIS BKF

Mulabasa Hutabarat lahir di Jakarta, 6 Januari 1954. Mulabasa merupakan alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1982 dan memperoleh gelar Master of Art dari Indiana University, As pada tahun 1990



“Pusat Kebijakan Pendapatan Negara mempunyai tugas merumuskan rekomendasi, analisis, dan evaluasi kebijakan di bidang pendapatan negara.”

ASTERA PRIMANTO B.

KEPALA PKPN

Lahir di Jakarta 20 Januari 1968, menempuh pendidikan sarjana di Universitas Jendral Sudirman tahun 1990 dan meraih gelar Master of Taxation di Denver University pada tahun 1997

“Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan APBN dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan APBN.”



ROFYANTO KURNIAWAN

KEPALA PKAPBN

Lahir di Tegal 9 Januari 1970 ,
menempuh pendidikan sarjana teknik sipil
di Intitut Teknologi Bandung tahun 1995
dan mendapatkan gelar Master of Business
Administration di Nanzan University
pada tahun 2003.



“Pusat Kebijakan Ekonomi Makro mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dini perkembangan ekonomi makro, analisis kebijakan dan perumusan rekomendasi kebijakan ekonomi makro.”

LUKY ALFIRMAN

KEPALA PKEM

Lahir pada tanggal 27 Maret 1970 di Bandung, Lulus dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1994 sebagai Sarjana Teknik Kimia. Memperoleh gelar Master of Arts in Economics pada tahun 2000, dilanjutkan dengan gelar Ph.D pada tahun 2004 dari University of Colorado, Amerika.

“Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi pengelolaan risiko ekonomi, keuangan, sosial, BUMN, dan dukungan pemerintah.”



FREDDY R.SARAGIH

KEPALA PPRF

Lahir pada tanggal 23 Mei 1959, Menyelesaikan studinya pada tahun 1984 di Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, Universitas Gajah Mada. Meraih gelar Master in Professional Accounting (M.P.Acc) dari University of Texas at Austin, Amerika, pada tahun 1992.



“Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama Assosiation of South East Asian Nations (ASEAN), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), forum-forum regional, bilateral, dan kerja sama teknik luar negeri.”

DECY ARIFINSJAH

KEPALA PKRB

Lahir di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1962, menempuh pendidikan sarjana kehutanan di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan mendapatkan gelar Master of Arts Economic di University of Colorado at Denver tahun 1997

“Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, analisis, evaluasi, pengkajian, koordinasi, kerja sama, pemantauan pendanaan dan pembiayaan perubahan iklim, dan kerja sama ekonomi dan keuangan G20 dan forum multilateral lainnya, serta penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional.



IRFA AMPRI

KEPALA PKPPIM

Lahir di Binjai 12 Desember 1965, menempuh pendidikan Master of Arts in Accounting and Finance di University of Lancaster pada tahun 1998 dan mendapat gelar Doctor of Philosophy in Business Administration di University of Japan tahun 2003.

PROFIL ORGANISASI

TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI



A. Tugas, Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memiliki tugas, fungsi, dan susunan organisasi sebagai berikut:

Tugas

BKF mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas tersebut, BKF menjalankan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan fiskal;
- b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis di bidang kebijakan fiskal; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal.

B. Peran Strategis

Nilai strategis BKF dapat dilihat dari masing-masing pusat sebagai berikut:

1. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN)
PKPN mempunyai tugas merumuskan rekomendasi, analisis, dan evaluasi kebijakan di bidang pendapatan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PKPN menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rekomendasi kebijakan pajak, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. analisis usulan kebijakan pajak, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pajak, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. pelaksanaan kesekretariatan Tim Tarif;
- e. pelaksanaan tata kelola Pusat.

2. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN)
PKAPBN mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan APBN dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan APBN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PKAPBN menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan APBN dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional;
- b. analisis dampak APBN terhadap sektor riil, moneter, dan neraca pembayaran operasi keuangan pemerintah;
- c. analisis, perumusan proyeksi dan rekomendasi kebijakan di bidang pendapatan dan belanja negara jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung kesinambungan fiskal;
- d. analisis dan proyeksi arus kas pelaksanaan APBN;
- e. evaluasi sasaran dan realisasi pendapatan dan belanja negara;
- f. penyusunan data konsolidasi APBN;
- g. perhitungan dan penetapan total kumulatif defisit APBD untuk menetapkan besaran konsolidasi defisit APBN;
- h. pelaksanaan tata kelola Pusat.

3. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM)
PKEM mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan dan perumusan rekomendasi kebijakan ekonomi makro, serta melaksanakan pemantauan dini perkembangan ekonomi makro.

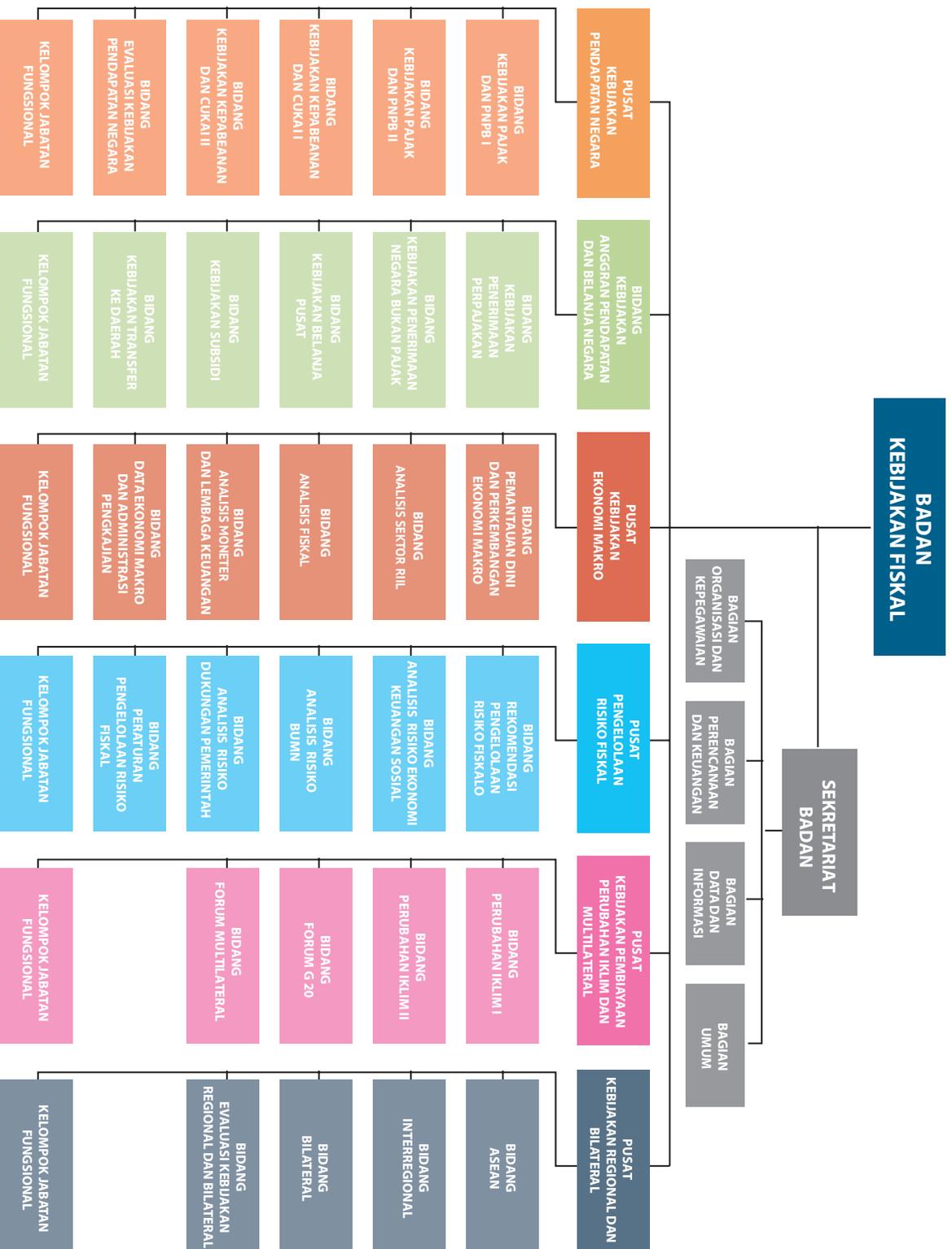
Dalam melaksanakan tugas tersebut, PKEM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pemantauan dini dan analisis perkembangan ekonomi yang memiliki potensi dampak terhadap APBN dan perekonomian nasional;
- b. perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
- c. penyusunan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro

- sebagai dasar perhitungan RAPBN;
- d. penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan lembaga Internasional dan Regional di bidang ekonomi makro;
 - e. analisis sektor riil, fiskal, moneter dan lembaga keuangan;
 - f. penyusunan rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan nilai tukar sebagai dasar perhitungan pajak dan bea masuk atas barang dan jasa;
 - g. penyiapan bahan koordinasi penetapan sasaran, pemantauan dan pengendalian inflasi, hubungan investor dan stabilisasi sektor keuangan;
 - h. pengembangan model analisis ekonomi makro;
 - i. pengembangan aplikasi dan pengelolaan basis data ekonomi makro;
 - j. perencanaan program pengkajian, diseminasi dan publikasi hasil kajian;
 - k. pelaksanaan tata kelola pusat.
4. Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF)
- PPRF mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi pengelolaan risiko ekonomi, keuangan, sosial, BUMN, dan dukungan pemerintah.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rekomendasi kebijakan pengelolaan risiko fiskal dan kelayakan pemberian dukungan pemerintah, serta penyiapan bahan negosiasi dan perjanjian kerja sama;
 - b. analisis dan evaluasi pengelolaan risiko ekonomi, keuangan dan sosial, risiko BUMN dan risiko dukungan pemerintah;
 - c. analisis dan evaluasi pengelolaan risiko fiskal terhadap pelaksanaan Public Service Obligation, penyertaan modal negara, restrukturisasi dan privatisasi BUMN;
 - d. analisis dan evaluasi terhadap kelayakan permintaan dukungan pemerintah atas pelaksanaan kerja sama penyediaan infrastruktur;
- e. penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang pengelolaan risiko fiskal;
 - f. penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang pengelolaan risiko fiskal;
 - g. pelaksanaan tata kelola Pusat.
5. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM)
- PKPPIM mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, analisis, evaluasi, pengkajian, koordinasi, kerja sama, pemantauan pendanaan dan pembiayaan perubahan iklim, dan kerja sama ekonomi dan keuangan G20 dan forum multilateral lainnya, serta penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional.
- Dalam melaksanakan tugas dimaksud, PKPPIM menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan perubahan iklim;
 - b. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama forum perubahan iklim;
 - c. pemantauan terhadap sumber-sumber pendanaan potensial yang akan diterima Pemerintah Indonesia yang terkait perubahan iklim;
 - d. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan dengan forum G20;
 - e. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerjasama ekonomi dan keuangan dengan lembaga keuangan multilateral;
 - f. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerjasama pada forum Organization for Economic

- Cooperation and Development (OECD), United Nations for Development programme (UNDP), Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP), World Summit for Sustainable and Development (WSSD), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), dan forum multilateral lainnya;
- g. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan yang berkaitan dengan status keanggotaan dan penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional;
 - h. pelaksanaan pengkajian atas usulan kebijakan serta dampak kebijakan pendanaan, pembiayaan dan kerja sama yang terkait perubahan iklim, G20, lembaga keuangan multilateral, OECD dan forum multilateral lainnya; dan
 - i. pelaksanaan tata kelola Pusat.
6. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB)
- PKRB mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama Assosiation of South East Asian Nations (ASEAN), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), forum-forum regional, bilateral, dan kerja sama teknik luar negeri.
- Dalam melaksanakan tugas dimaksud, PKRB menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, dan pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan dalam kerangka ASEAN dan integrasi ekonomi ASEAN;
 - b. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, dan pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan dalam kerangka APEC dan forum-forum Asia-Europe Meeting (ASEM), ASEAN+3, East Asian Summit (EAS), Mitra ASEAN, dan bilateral;
 - c. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan negosiasi (offer-request) di bidang sektor jasa keuangan APEC, ASEAN, Mitra ASEAN, dan bilateral;
 - d. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, dan pelaksanaan kerja sama bilateral ekonomi dan keuangan dengan lembaga dan organisasi internasional non pemerintah;
 - e. perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kerja sama teknik luar negeri;
 - f. pelaksanaan koordinasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam kerangka kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral;
 - g. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, dan evaluasi dalam rangka kerja sama pemantauan (surveillance) ekonomi dan keuangan regional;
 - h. pemantauan dan evaluasi dalam rangka transparansi ekonomi dan keuangan regional dan bilateral dan dukungan teknis; dan
 - i. pelaksanaan tata kelola Pusat.
7. Sekretariat Badan
- Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
 - b. penyelenggaraan dan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, pengembangan pegawai, serta pembinaan jabatan fungsional pada Badan;
 - c. koordinasi penyusunan perencanaan program serta pengelolaan urusan keuangan;
 - d. koordinasi penyusunan rencana strategik, rencana kerja dan anggaran, serta laporan akuntabilitas kinerja Badan;
 - e. penyajian data dan informasi, pelaksanaan dokumentasi dan kepastakaan, serta diseminasi elektronik;
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha, gaji, kearsipan, dan kehumasan Badan;
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pemberian dukungan teknis penggunaan teknologi informasi di lingkungan Badan;
 - h. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

BAGAN ORGANISASI BADAN KEBIJAKAN FISKAL



D. Rencana Strategis

Visi

Sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BKF memiliki visi sebagai berikut:

“Menjadi unit terpercaya dalam perumusan kebijakan fiskal yang antisipatif dan responsif”

Yang dimaksud dengan Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal adalah BKF diharapkan dapat menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan yang akurat dan applicable sehingga diakui dan dipercaya oleh pimpinan Kementerian Keuangan pada khususnya dan masyarakat pelaku ekonomi pada umumnya. Antisipatif artinya, dalam merencanakan berbagai kegiatan analisis dan kajian, telah mempertimbangkan kondisi perekonomian jauh ke depan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan fiskal sehingga rumusan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan applicable dan dapat menjadi solusi permasalahan yang ada. Responsif, artinya adanya tantangan ketidakpastian perekonomian global dan kondisi dalam negeri yang belum kondusif, BKF harus selalu siap menghadapi gejolak perekonomian yang terjadi dengan cara melakukan analisis dan menyampaikan rekomendasi yang cepat dan akurat untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

Misi

Untuk dapat mewujudkan visinya tersebut, BKF menetapkan 6 (enam) misi, yaitu:

- a. Menyajikan informasi dan pemantauan ekonomi dan keuangan yang terkini
- b. Mewujudkan rumusan kebijakan pendapatan negara, APBN, serta ekonomi makro yang dipercaya dengan didukung hasil kajian (research based policy)
- c. Mewujudkan pengelolaan risiko fiskal yang pasti dan terukur
- d. Mewujudkan pelaksanaan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional yang memberikan manfaat optimal bagi kebijakan fiskal dan perekonomian
- e. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional melalui peningkatan kompetensi dan disiplin pegawai
- f. Memutakhirkan instrumen kebijakan yang terkini dan aplikatif.

Tujuan strategis

Tujuan strategis BKF yang ingin dicapai adalah terwujudnya rumusan kebijakan fiskal yang applicable dan bermanfaat dengan memperhitungkan beban risiko fiskal yang terukur.

Sasaran strategis

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, sasaran strategisnya adalah:

- a. Rekomendasi kebijakan fiskal yang kredibel
- b. Kerjasama keuangan internasional yang optimal
- c. Informasi kebijakan fiskal dan kajian BKF yang accessible dan efektif
- d. Database informasi yang terintegrasi dan up to date
- e. Analisis dan kajian dengan pendekatan ilmiah
- f. Perumusan rekomendasi kebijakan yang efisien dan tepat waktu
- g. Pembentukan SDM yang berkompetensi tinggi
- h. Pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien
- i. Pembangunan sistem TIK yang terintegrasi
- j. Pengelolaan anggaran yang optimal
5. Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi adalah sebagai berikut :

- a. Strategi kebijakan ekonomi
Mengarahkan kebijakan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, (2) penciptaan stabilitas ekonomi yang kokoh, serta (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Strategi kebijakan ekonomi makro diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
Tujuan dari koordinasi stabilitas sistem keuangan adalah (i) menyiapkan asesmen stabilitas sistem keuangan sebagai bahan Sekretariat FKSSK, (ii) menyiapkan respon kebijakan stabilitas sistem keuangan yang telah dilakukan selama ini dan rencana kebijakan ke depan sebagai bahan Sekretariat FSSK, (iii) menyiapkan prosedur operasional dan administrasi Sekretariat FKSSK, dan (iv) melakukan tugas-tugas lain sehubungan dengan upaya pelaksanaan tugas Sekretariat FKSSK.

- 2) Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi
Tujuan kegiatan Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) adalah sebagai upaya untuk pencapaian inflasi yang rendah dan stabil dalam jangka panjang, dengan tugas pokok melakukan koordinasi dalam rangka penetapan sasaran inflasi tiga tahun ke depan, pemantauan dan evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi termasuk di dalamnya kebijakan-kebijakan yang telah dan akan ditempuh, merekomendasikan pilihan kebijakan yang mendukung kepada pencapaian sasaran-sasaran inflasi kepada Menteri Keuangan, koordinasi dalam rangka penerapan dan pengembangan model-model ekonomi makro untuk digunakan dalam penentuan asumsi dasar penyusunan RAPBN 2014 dan kajian sektor riil terhadap APBN 2014, serta melakukan kajian mikro sektoral dalam rangka mendukung keakuratan proyeksi serta perumusan kebijakan-kebijakan strategis ekonomi makro melalui survei lapangan.
- b. Strategi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kebijakan APBN untuk mendukung kesinambungan fiskal meliputi 3 (tiga) hal:
- 1) menyusun indikator kinerja untuk mengukur tingkat akurasi kebijakan APBN.
Strategi tersebut dituangkan dalam bentuk proyeksi yang menunjukkan ketepatan perkiraan pada masa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada sekarang, yang dijabarkan dalam bentuk: (a) perhitungan persentase deviasi target defisit APBN, (b) perhitungan persentase deviasi proyeksi penerimaan perpajakan, dan (c) pengajuan rekomendasi alokasi transfer ke daerah yang digunakan sebagai bahan usulan ke DPR.

Di samping itu, juga dilakukan pemantauan dini terhadap pelaksanaan APBN. Dengan demikian, apabila terjadi suatu hal terhadap APBN, maka pemerintah sudah dapat memperkirakan kebijakan antisipatifnya. Sebagai instrumen perumusan kebijakan, terus dikembangkan model APBN yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi dampak perubahan asumsi makro terhadap APBN, baik jangka pendek maupun jangka menengah.
 - 2) Kebijakan belanja negara
Kebijakan di bidang belanja negara dalam tahun 2010-2014 diarahkan untuk mendukung pembiayaan prioritas pembangunan jangka menengah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, kebijakan belanja negara juga diarahkan untuk mendukung 11 program prioritas pembangunan jangka menengah, yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola, (2) pendidikan, (3) kesehatan, (4) penanggulangan kemiskinan, (5) ketahanan pangan, (6) infrastruktur, (7) iklim investasi dan usaha, (8) energi, (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, (10) pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, pasca konflik, (11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.
 - 3) Kebijakan pembiayaan anggaran
Kebijakan pembiayaan anggaran diarahkan dalam rangka pencapaian 3 sasaran utama yaitu: (a) penurunan stok utang terhadap PDB melalui pengelolaan utang yang berhati-hati, (b) penggunaan utang secara selektif, dan (c) optimalisasi pemanfaatan hibah dan utang. Disamping itu, pemerintah akan terus melakukan pengendalian terhadap defisit APBN menuju berimbang dalam tahun 2014.
- c. Strategi Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Arah kebijakan pendapatan negara tahun 2010-2014 yang menjadi tugas BKF bertujuan meningkatkan kualitas perumusan dan rekomendasi kebijakan perpajakan, kepabeanan, cukai, dan PNBP yang terfokus pada strategi kebijakan berupa:
- 1) peningkatan efektivitas kebijakan pendapatan negara,
 - 2) peningkatan mutu rekomendasi dan rumusan kebijakan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai sehingga mampu memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh pimpinan,

- 3) peningkatan partisipasi dalam perundingan kerjasama tarif preferensi dalam forum bilateral, regional, dan multilateral, serta
- 4) peningkatan jumlah dan kualitas sosialisasi kebijakan pendapatan negara.

d. Strategi Pengelolaan Risiko Fiskal

Tujuan utama pengelolaan risiko fiskal adalah mitigasi risiko dalam rangka menjamin kesinambungan fiskal dan menjaga terlaksananya program-program pemerintah. Penentuan besaran anggaran cadangan risiko fiskal yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut merupakan salah satu alat pengelolaan risiko dalam APBN. Untuk mengetahui besaran anggaran cadangan risiko fiskal, diperlukan suatu perhitungan yang cermat dan komprehensif melalui proses pengidentifikasian risiko, pengukuran dampak, dan pemetaan risikonya.

Langkah-langkah strategi yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan risiko fiskal adalah sebagai berikut:

- 1) Penyempurnaan kualitas pernyataan risiko fiskal dalam Nota Keuangan.
Fokus strategi tahun 2010-2014 terkait penyempurnaan kualitas pernyataan risiko fiskal dalam nota keuangan adalah ketepatan pengukuran cadangan risiko fiskal, pengaturan penganggaran untuk cadangan risiko fiskal dan pengungkapan strategi pengelolaan risiko fiskal. Model yang dikembangkan untuk peningkatan kualitas pernyataan risiko fiskal dalam nota keuangan adalah Model Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 2) Optimalisasi dukungan Pemerintah untuk percepatan proyek infrastruktur melalui APBN dan/ atau melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)

Dalam rangka mendorong keikutsertaan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, salah satu arah kebijakan Pemerintah adalah memberikan Dukungan Pemerintah bagi proyek infrastruktur dalam bentuk menjamin sebagian risiko yang dihadapi investor, yaitu risiko politik, risiko kinerja proyek, dan risiko permintaan.

Hal ini diatur dalam PMK No.38 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, maka Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2006 direvisi menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 260 Tahun 2010. Disamping itu, untuk meningkatkan creditworthiness proyek infrastruktur, Pemerintah juga mendirikan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Infrastructure Guarantee Fund) yang bertugas memberikan penjaminan atas kewajiban pemerintah terhadap proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Penjaminan hanya diberikan atas risiko proyek infrastruktur yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Operasionalisasi PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia ini merupakan salah satu fokus strategi Badan Kebijakan Fiskal tahun 2010-2014.

- 3) Pengelolaan risiko fiskal BUMN strategis untuk optimalisasi kontribusi bersih BUMN terhadap APBN dan peningkatan pelayanan umum dengan beban APBN yang terukur.

Fokus strategi pengelolaan risiko fiskal BUMN tahun 2010-2014 adalah pengembangan model macrostress test risiko fiskal BUMN, antara lain melalui perluasan objek model dengan mengutamakan BUMN strategis, yaitu menjadi 40 BUMN tahun 2014 dan perluasan pengukuran sumber risiko, tidak hanya variabel makro tetapi juga variabel mikro. Dengan menggunakan model ini diharapkan dapat diberikan rekomendasi pengelolaan risiko fiskal BUMN yang tepat, baik risiko fiskal terkait pengelolaan dan penyehatan BUMN, evaluasi PSO, program privatisasi, dan penyertaan modal negara. Pada akhirnya, pengelolaan risiko fiskal BUMN bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi kontribusi bersih BUMN terhadap APBN sehingga meningkatkan fiscal sustainability sekaligus meningkatkan keterukuran beban pelayanan umum melalui APBN.

Selain pengembangan model macrostress test dan microstress test, juga akan dilakukan pengembangan monitoring risiko keuangan BUMN di sektor energi, yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kepada lender baik yang murni pinjaman korporasi maupun pinjaman yang dijamin Pemerintah, serta volatilitas harga komoditi energi terhadap APBN baik dari sisi penerimaan maupun belanja (defisit).

e. Strategi Kebijakan dan Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Dan Keuangan Internasional

Secara umum terdapat dua sasaran strategis yang akan dicapai oleh Kementerian Keuangan pada masa yang akan datang yaitu melalui partisipasi aktif Kementerian Keuangan dalam berbagai forum kerjasama internasional dengan tujuan utama mendukung posisi Menteri Keuangan dalam forum kerja sama dimaksud dan melalui penempatan wakil Kementerian Keuangan pada berbagai lembaga keuangan internasional.

1) Partisipasi aktif dalam forum kerjasama internasional.

Peran dan kontribusi aktif tersebut dapat dilakukan antara lain melalui:

- a) sumbangan pemikiran dan tindakan dalam rangka perbaikan sistem keuangan internasional,
- b) mendorong peningkatan peran yang lebih besar bagi negara berkembang dalam pembahasan isu-isu keuangan internasional,
- c) peningkatan dukungan pendanaan bagi negara berkembang khususnya bagi negara yang cukup parah terkena dampak krisis keuangan global,
- d) mengupayakan perlakuan yang berbeda antara negara maju dan negara berkembang dalam penerapan standar regulasi sistem keuangan global, dan
- e) optimalisasi fungsi Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) maupun Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) dalam kerangka Asian Bond Market Initiative (ABMI).

Untuk mendukung perwujudan upaya-upaya di atas, Kementerian Keuangan selanjutnya perlu

menetapkan rencana-rencana aksi dalam bentuk (i) Percepatan Finalisasi Modalitas Liberalisasi Jasa Keuangan ASEAN, (ii) Peningkatan kapasitas National Surveillance Unit (NSU), (iii) Percepatan Implementasi ASEAN+3 Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), (iv) Percepatan implementasi ASEAN+3 Credit Guarantee and Investment Facility, (v) Pemanfaatan bantuan Hibah Luar negeri melalui program Degree dan Non – Degree, (vi) Pengisian Template G-20 Framework for strong, Sustainable and Balanced growth, (vii) Peningkatan koordinasi dalam menangani Isu-isu G-20, (viii) Perpanjangan Bilateral Swap Arrangement (BSA) dengan China dan Korea, dan (ix) peningkatan posisi Indonesia dalam liberalisasi perdagangan jasa keuangan.

2) Penempatan wakil pada lembaga keuangan multilateral

Strategi penempatan wakil Kementerian Keuangan pada lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia, IMF, ADB dan IDB, dilakukan dengan tujuan agar mereka mampu menjembatani komunikasi dan hubungan antara Kementerian Keuangan dengan pejabat lembaga keuangan tersebut sehingga dapat mempermudah akses untuk mengakomodir berbagai kepentingan nasional dalam pembahasan-pembahasan program/ rencana kerja lembaga keuangan internasional tersebut.

f. Strategi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Arah kebijakan BKF dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional, berkomitmen dan berintegritas tinggi melalui perencanaan dan pengembangan SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja. Untuk program degree, BKF bekerja sama dengan lembaga donor untuk menyelenggarakan program beasiswa dual degree. Program dual degree merupakan program beasiswa yang ditempuh di dua universitas, tahun pertama di dalam negeri dalam kelas bahasa Inggris, tahun kedua di universitas luar negeri. Di samping itu, untuk peningkatan kapasitas,

BKF merencanakan berbagai program diklat baik yang diselenggarakan sendiri maupun bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Arah kebijakan di bidang organisasi adalah mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien melalui mekanisme kerja yang jelas dan evaluasi organisasi. Strategi yang akan dilakukan oleh BKF adalah monitoring implementasi standard operation prosedurs (SOP) dalam rangka meningkatkan kualitas hasil kerja dan efisiensi. Dengan kegiatan monitoring implementasi, juga diharapkan dapat mengetahui efektifitas SOP dan penyempurnaan yang perlu dilakukan, serta dapat diketahui kebutuhan akan SOP baru seiring dengan perkembangan yang terjadi. Selain itu, setiap akhir tahun sampai dengan 2014 akan dilaksanakan survei kepuasan pegawai, mengingat pegawai mempunyai peranan besar terhadap kinerja BKF. Kepuasan stakeholder sulit dicapai apabila tidak ada perhatian dan monitoring terhadap kepuasan pegawai. Hasil survey juga merupakan umpan balik terhadap kebijakan yang dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan. Efektifitas dan efisiensi organisasi juga diharapkan tercapai dengan strategi efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran melalui perencanaan anggaran yang terintegrasi dan berbasis kinerja, sesuai dengan implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran. Terkait dengan target pencapaian realisasi anggaran pada tahun 2010-2014, BKF merencanakan penyerapan anggaran berkisar pada angka 85 persen sampai dengan 95 persen. Upaya pencapaian target dilakukan melalui koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara periodik dan intensif.

Dalam lima tahun ke depan sasaran strategis di bidang Teknologi Informasi diarahkan untuk mencapai pengelolaan yang efisien, efektif dan komprehensif untuk mencapai pengelolaan basis data ekonomi, keuangan dan fiskal yang akurat, cepat dan akuntabel yang didukung oleh sarana dan prasarana (hardware/software) yang mutakhir, namun dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip good governance. Tiga target utama yang harus dicapai oleh BKF, yaitu (i) penyediaan perangkat keras/lunak

(hardware/software) yang mutakhir dan akurat, (ii) pengintegrasian database dan sistem aplikasi (internal dan eksternal BKF) yang didukung oleh jaringan LAN yang terkontrol dan termonitor secara optimal, (iii) pengembangan sistem informasi (misal, economic executive dashboard) dan instrumen kebijakan yang aplikatif dan user friendly, dan (iv) peningkatan kapasitas pegawai di bidang informasi.

Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh BKF untuk mendapatkan suatu hasil. Tahun 2013, BKF melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Perumusan Kebijakan Fiskal. Program tersebut selanjutnya diuraikan menjadi beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit eselon II yang ada di lingkungan BKF, meliputi:

- a. Perumusan kebijakan pajak, kepabeanan, cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
BKF melaksanakan perumusan pokok-pokok kebijakan, analisis, dan evaluasi di bidang perpajakan, kepabeanan, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) khususnya dari sisi tarif, subjek, dan objek atas bea masuk, bea keluar, cukai, pajak, dan PNBP. Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya rekomendasi dan rumusan kebijakan pendapatan negara yang mendukung terwujudnya kebijakan fiskal.
- b. Perumusan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Melaksanakan perumusan kebijakan APBN dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban atas pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional serta analisis, proyeksi, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan APBN.

Tujuan Kegiatan ini adalah tersusunnya bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan. Tersedianya bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan

konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta tersedianya rekomendasi kebijakan APBN yang sustainable untuk mendukung pembangunan nasional.

- c. Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan
Melaksanakan perumusan rekomendasi, analisis, evaluasi, dan pengelolaan risiko ekonomi global, BUMN, dan dukungan pemerintah. Tugas ini dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal.

Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan risiko fiskal yang antisipatif dan responsif yang dapat mendukung stabilisasi serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan tersedianya rekomendasi dan pernyataan risiko fiskal

- d. Perumusan kebijakan ekonomi
Melaksanakan perumusan rekomendasi pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, proyeksi asumsi dasar ekonomi makro, pengembangan sistem informasi data dan statistik di bidang fiskal, serta pengembangan sistem informasi dan analisis ekonomi makro.

Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya kebijakan ekonomi makro yang antisipatif dan responsif yang dapat mendukung stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian

- e. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral
Melaksanakan kegiatan perumusan, pemantauan, evaluasi koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan regional dan bilateral.

Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya kebijakan ekonomi regional dan bilateral yang mendukung kepentingan nasional.

- f. Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
Melaksanakan kegiatan perumusan, pemantauan, evaluasi koordinasi dan penyusunan kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan kerjasama ekonomi

dan keuangan multilateral.

Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya kebijakan perubahan iklim dan ekonomi internasional yang mendukung kepentingan nasional.

- g. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya
Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan negara, penyelenggaraan operasional perkantoran, perawatan gedung kantor, perawatan sarana dan prasarana kantor, serta penyelenggaraan tata usaha perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.

Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya organisasi BKF yang efektif dengan pelaksanaan koordinasi kegiatan dan dukungan pelayanan prima.

Capaian Kinerja 2013

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks
1.	Rekomendasi Kebijakan Fiskal yang Kredibel	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan	82%	84%	102,4%
		Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan negara	4	4	100%
		Deviasi proyeksi indikator kebijakan fiskal	6%	3,64%	120%
		Deviasi proyeksi indikator ekonomi makro	6%	4,2%	120%
		Deviasi proyeksi APBN	6%	3,08%	120%
		Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan	90%	99,94%	98,89%
2.	Kerjasama Keuangan Internasional yang optimal	Jumlah usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	27	33	120%
3.	Informasi Kebijakan Fiskal dan Kajian BKF yang Accessible dan Efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	80	84,43	105,50%
		Jumlah publikasi kajian	81	97	119,75%
4.	Database Informasi yang Terintegrasikan dan Up to Date	Tingkat kepuasan pemanfaatan database BKF	3,2	3,11	97,19%
5.	Analisis dan Kajian dengan Pendekatan Ilmiah	Persentase rekomendasi yang menggunakan alat analisis ekonomi	80%	88%	110%
		Jumlah model ekonomi yang dikembangkan	14	15	107,14%
6.	Perumusan Rekomendasi Kebijakan yang Efisien dan Tepat Waktu	Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Inpres	80%	85,84%	107,30%
		Persentase pelaksanaan kajian yang tepat waktu	100%	100%	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks
7.	SDM yang Berkompetensi Tinggi	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	87%	97%	111,50%
		Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat	50%	61,8%	120%
		Persentase Akurasi data SIMPEG	100%	100%	120%
8.	Organisasi yang Adaptif	Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko	55 (risikode)	48,59	88,35%
		Nilai reformasi birokrasi	92	93,55	101,68%
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	3,86	-	-
9.	Perwujudan TIK yang Terintegrasi	Persentase Penyelesaian Pembangunan Sistem Informasi yang Mendukung Proses Bisnis	80%	80%	100%
		Persentase Pertukaran Data oleh Unit Eselon I yang tepat waktu	90%	100%	111,11%
10.	Pelaksanaan anggaran yang optimal	Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)	95%	86,58%	91,14%
		Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIPA	98%	99,6%	101,63%





ASTERA PRIMANTO BHAKTI

KEPALA PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA (PKPN)

**“Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
mempunyai tugas merumuskan rekomendasi,
analisis, dan evaluasi kebijakan
di bidang pendapatan negara.”**

KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA





Kajian/kegiatan terkait Kebijakan Pendapatan Negara

a. Kajian Kebijakan Bea Meterai Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara

Tujuan dari kajian ini adalah : (i) mengkaji kelayakan kenaikan tarif Bea Meterai yang optimum; (ii) mengkaji kelayakan pengenaan bea meterai atas dokumen transaksi saham dan menghitung proyeksi penerimaan Bea Meterai atas transaksi saham, dan (iii) mengkaji kelayakan pengenaan tarif Bea Meterai atas dokumen pengalihan properti dan menghitung proyeksi penerimaan bea meterai atas transaksi pengalihan properti.

Rekomendasi yang diberikan adalah : a) kenaikan tarif bea meterai sudah layak diterapkan dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,- ataupun lebih dari Rp10.000,- karena dari hasil analisis dengan pendekatan faktor ekonomi memungkinkan untuk dinaikkan, b) pengenaan tarif ad valorem sebesar 0,1% atas





dokumen transaksi saham layak diterapkan untuk dokumen transaksi pembelian saham sedangkan pengenaan PPh Final sebesar 0,1% atas transaksi saham dicabut dan dikenakan normal kepada penjual saham yang hanya mendapatkan keuntungan saham (gain), c) pengenaan tarif bea meterai atas transaksi pengalihan properti layak diterapkan di Indonesia karena kebanyakan negara menerapkan tarif ad valorem untuk bea meterai transaksi tersebut dan potensial gain dapat diharapkan melalui penerapan tarif ad valorem berdasarkan nilai transaksi properti (value of property). Namun kemungkinan bersinggungan dengan BPHTB yang sudah menjadi pajak daerah akan menimbulkan resistensi masyarakat akibat bertambahnya transaction cost.

b. Kajian Kebijakan Pengenaan PPnBM Atas Kelompok Barang Selain Kendaraan Bermotor

Tujuan dari kajian ini adalah : (i) mengkaji kelayakan smartphone untuk dikenai PPnBM; dan (ii) mengkaji kelayakan pengenaan PPnBM atas barang-barang selain kendaraan bermotor yang saat ini dikenai PPnBM.

Rekomendasi yang diberikan : a) penerapan pengenaan PPnBM atas Smartphone harus terlebih dulu mendapatkan keyakinan yang cukup bahwa tingkat penyelundupan tidak akan meningkat, b) apabila tingkat penyelundupan tidak meningkat, Smartphone kriteria tertentu layak dikenai PPnBM. Terkait dengan kriterianya tersebut, berbagai pihak, terutama Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian perlu membahas secara bersama-sama untuk penetapannya; dan c) dalam rangka meningkatkan daya saing produk dalam negeri, atas barang-barang yang banyak diproduksi di dalam negeri layak untuk dikeluarkan dari objek PPnBM, terutama untuk barang yang mudah diselundupkan.

c. Komite Verifikasi Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday)

Rekomendasi yang diberikan : a) menerima permohonan tax holiday PT Energi Sejahtera Mas dan PT Indorama Polychem Indonesia, b) melakukan

perubahan PMK 130/PMK.011/2013, dengan pokok perubahan antara lain: penentuan industri yang memperoleh fasilitas dibatasi pada KBLI tertentu, dengan mempertimbangkan road map pengembangan industri nasional; relaksasi syarat WP yang berhak mendapatkan fasilitas Tax holiday, yaitu dengan merubah syarat rencana investasi untuk industri peralatan komunikasi dan industri mesin dari Rp 1 triliun menjadi Rp 500 miliar; relaksasi WP yang berhak mendapatkan fasilitas dari semula dibatasi WP yang berstatus hukum Indonesia paling lama 15 Agustus 2010 menjadi WP yang memperoleh ijin penanaman modal baru sepanjang belum melakukan produksi komersial; pemberian kepastian jangka waktu pemberian fasilitas tax holiday hingga 15 tahun hanya untuk industri pengilangan dan/atau kimia dasar dan industri logam; pemberian transparansi penentuan jangka waktu fasilitas yang dapat diberikan kepada WP, dengan membuat kriteria dan bobot penilaian sebagai bagian dari materi pengaturan dalam RPKM; dan untuk menjaga iklim investasi, batas waktu pengajuan permohonan tax holiday diperpanjang dari semula 3 tahun sejak 15 Agustus 2011 menjadi 6 tahun sejak 15 Agustus 2011.

d. Kajian Kebijakan Pajak Penghasilan (PPH) Pada Sektor Pertambangan Umum dan Panas Bumi

Tujuan dari kajian ini adalah memberikan nilai tambah kepada perekonomian nasional dengan meningkatkan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak, khususnya dari sektor mineral dan batubara. Rekomendasi yang diberikan terkait sektor Pertambangan Umum: a) Kepatuhan Kewajiban Perpajakan pemegang IUP sangat rendah dimana terdapat 10.566 ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah, terdapat 6,218 perusahaan yang mendapatkan status Clean and Clear (C & C). Dari 6,218 pemegang IUP yang C&C hanya 4.643 IUP yang aktif melaporkan kewajiban perpajakannya; b) Untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan pemegang IUP direkomendasikan sistem pemajakannya bersifat khusus yaitu dikenakan final mengingat banyak perusahaan tidak melaporkan penjualannya atau melaporkan lebih rendah dari seharusnya sehingga PPh yang dilaporkan cenderung rendah.

Terkait sektor Panas Bumi, rekomendasi yang

diberikan adalah : perlunya diatur lebih mendalam biaya-biaya yang boleh dan tidak diperbolehkan dalam menghitung net income mengingat di dalam kontrak biaya-biaya tersebut belum diatur secara jelas. Biaya-biaya tersebut juga menjadi temuan Pemeriksaan BPKP maupun BPK yang menyebabkan penerimaan negara menjadi lebih rendah

e. Kajian Perluasan Kebijakan Tarif Bea Masuk Pada Bab 98 Terhadap Industri Tertentu

Tujuan dari kajian ini adalah mengkaji pemberian insentif kebijakan bea masuk terhadap sektor industri transportasi (transportasi udara dan jasa perawatan pesawat udara) melalui skema pemanfaatan Bab 98

Rekomendasi yang diberikan : a) Berdasarkan kajian yang dilakukan, diperoleh hal-hal: pertumbuhan industri transportasi udara sebesar 15-20%, jumlah pesawat berbagai ukuran diperkirakan tumbuh dari 754 pesawat pada tahun 2013 menjadi 1.030 pesawat pada tahun 2017, jasa perawatan pesawat diperkirakan akan mencapai USD2 milyar pada tahun 2017; b) Dalam rangka menghadapi ASEAN Open Sky Policy pada tahun 2015 dan karena sebagian besar perawatan pesawat dilakukan di luar negeri (> 70%), maka dirasa perlu memberikan insentif bea masuk terhadap impor komponen bagi pemeliharaan dan perawatan pesawat udara.

f. Kajian Manfaat Implementasi AANZ FTA Terhadap Industri Tertentu

Tujuan kajian ini adalah mengetahui dampak implementasi AANZFTA pada tahun 2011 terhadap sektor industri di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Constant Market Share Analysis (CMSA)

Rekomendasi adalah a) Produk yang konsisten diekspor dan berdaya saing terutama pada produk-produk industri, sejak tahun 2012 telah dapat menggunakan skema AANZFTA sehingga untuk kedepannya diharapkan dapat lebih meningkatkan daya saing produk Indonesia di Australia dan New Zealand; b) Untuk Kajian lebih mendalam selanjutnya untuk pemanfaatan FTA lebih mendalam, akan menggunakan indikator penggunaan Keterangan Asal (SKA), baik itu untuk impor maupun untuk tujuan ekspor;

c) Pemerintah Indonesia, khususnya pembina sektor harus benar-benar memperhatikan dampak dengan adanya implementasi FTA, Selain fokus pada produk industri yang mengalami peningkatan daya saing diperlukan juga untuk memperhatikan produk sektor yang mengalami penurunan daya saing.

g. Kajian Efektivitas Hilirisasi Industri Melalui Pengenaan Bea Keluar

Tujuan mengetahui dampak kebijakan bea keluar terhadap perkembangan industri hilir sawit. Rekomendasinya adalah kebijakan bea keluar CPO dan Produk Turunannya terbukti telah menghasilkan capaian positif di sektor investasi dan hilirisasi industri, untuk itu pemerintah hendaknya mempertahankan kebijakan ini dalam rangka menjaga kepastian hukum dalam proses hilirisasi industri dalam negeri dan menciptakan iklim investasi yang kondusif

h. Kajian Ekstensifikasi Barang Kena Cukai

Tujuan dari kajian ini adalah memperoleh informasi yang mendalam dan mencoba menganalisis beberapa indikator yang dapat dipergunakan sebagai dasar penentuan Barang Kena Cukai.

Rekomendasinya adalah a) Untuk jasa telekomunikasi seluler dan limbah, studi ini beranggapan kuat bahwa kedua calon obyek kena cukai tersebut tidak memenuhi kelayakan secara hukum; b) Untuk pengenaan cukai pada ponsel, meskipun masih diperlukan studi lanjutan untuk menghasilkan justifikasi yang lebih memadai, c) terdapat dua alasan yang relatif mendukung pengenaan cukai pada ponsel dilihat dari aspek hukum yaitu aspek lingkungan dan pola konsumsi dan d) Dengan alternatif tarif cukai sebesar 10%, 15%, dan 20%, potensi penerimaan negara dari cukai ponsel adalah berkisar antara Rp 2,3 triliun s.d. Rp 4,6 triliun

i. Kajian Formulasi Insentif Pengembangan Manufaktur

Tujuan kajian adalah memberikan informasi yang mendalam atas pemberian insentif/fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah khususnya dalam rangka pengembangan industri manufaktur.

Rekomendasi yang diberikan adalah berdasarkan hasil

perhitungan dan pendalaman atas informasi terhadap industri manufaktur maka diusulkan untuk mengembangkan beberapa industri antara lain :

- a) Pengilangan Minyak Bumi (industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi, Industri barang-barang dari hasil kilang minyak bumi);
- b) Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik (Industri transmisi mekanik selain kendaraan bermotor, Industri mesin-mesin pertambangan, penggalian dan konstruksi, Industri tungku dan alat pemanas (bukan untuk keperluan rumah tangga), Industri alat pengangkat dan alat pemindah, Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula, Industri mesin-mesin industri khusus lainnya, Industri pompa dan kompresor, Industri Mesin Pengerjaan logam);
- c) Industri Kimia (industri kimia dasar organik, industri kimia dasar anorganik lainnya, industri kimia dasar organik lainnya, Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, Industri kimia dasar an organik pigmen)

j. Kajian Evaluasi Tarif PNPB Pertambangan Umum

Tujuan dari kajian ini memperoleh informasi yang mendalam dan mencoba menganalisis beberapa indikator yang dapat dipergunakan sebagai dasar penentuan besarnya tarif PNPB untuk Pertambangan Umum dalam rangka meningkatkan penerimaan PNPB.

Rekomendasinya adalah a) Perlu memiliki data target PNPB batubara, b) Perlu membangun model Target PNPB Pertambangan Batubara dengan pendekatan makro, c) Perlu memiliki data PNPB batubara yang akurat, lengkap dan rinci dalam rangka menentukan target, monitoring, dan evaluasi PNPB Batubara dan d) Perlu dipertimbangkan untuk menerapkan perbaikan sistem pengelolaan administrasi PNPB. DJP Merupakan instansi yang cocok untuk mengelola administrasi PNPB

Evaluasi : a. Perbandingan Rezim Fiskal Indonesia dengan Negara-negara lain; b. Tarif royalti batubara&mineral perlu disesuaikan dg perkembangan perekonomian dan c. masih rendahnya kontribusi PNPB dari IUP dibandingkan PKP2B



ROFYANTO KURNIAWAN

KEPALA PUSAT KEBIJAKAN APBN (PKAPBN)

“Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan APBN dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan APBN.”

KEBIJAKAN APBN



4 STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL

- 1) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan kelestarian lingkungan hidup;
- (2) meningkatkan kualitas belanja negara melalui efisiensi belanja yang kurang produktif dan meningkatkan belanja infrastruktur untuk memacu pertumbuhan;
- (3) menjaga defisit anggaran pada batas aman (di bawah 3 persen terhadap PDB); dan
- (4) menurunkan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali.

PENDAPATAN NEGARA	Rp1529,7 T
PENDAPATAN DALAM NEGERI	Rp1525,2 T
Penerimaan Perpajakan	Rp1193,0 T
Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp332,2 T
PENERIMAAN HIBAH	Rp4,5 T
BELANJA NEGARA	Rp1683,0 T
BELANJA PEMERINTAH PUSAT	Rp1154,4 T
Belanja K/L	Rp594,6 T
Belanja Non-K/L	Rp559,8 T
TRANSFER KE DAERAH	Rp528,6 T
Dana Perimbangan	Rp444,8 T
Dana Otonomi Khusus Dan Penyesuaian	Rp83,8 T
SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(Rp153,3 T)
% Defisit Terhadap PDB	(1,65)
PEMBIAYAAN (I + II)	Rp153,3 T
Pembiayaan Dalam Negeri	Rp172,8 T
Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	(Rp19,5 T)

Kebijakan fiskal sebagai kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN memiliki peran yang penting dan sangat strategis di dalam memengaruhi perekonomian, terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional. Peran tersebut terkait dengan tiga fungsi utama pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. APBN harus didesain sesuai dengan fungsi tersebut, dalam upaya mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Fungsi alokasi berkaitan dengan intervensi Pemerintah terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya. Fungsi distribusi berkaitan dengan pendistribusian barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat, sedangkan fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi, sehingga perekonomian tetap pada kesempatan kerja penuh (full employment) dengan harga yang stabil.

Dari ketiga fungsi tersebut, fungsi stabilisasi yang ditujukan untuk meminimalisir volatilitas atau fluktuasi dalam perekonomian, merupakan esensi utama kebijakan APBN. Dengan peran stabilisasinya, kebijakan fiskal dipandang sebagai salah satu alat yang efektif untuk memperkecil siklus bisnis. Sejarah kebijakan fiskal Indonesia menunjukkan bukti tersebut selama periode krisis ekonomi 1997/1998, dan krisis 2009. Kebijakan ekspansif fiskal melalui pengalokasian stimulus fiskal pada tahun 2009 mampu menahan ekonomi Indonesia dari dampak krisis, bahkan mampu membuat ekonomi tumbuh positif di tengah kondisi melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Stabilitas ekonomi terjaga, dan kesehatan fiskal dapat diwujudkan. Tentu saja, hal tersebut dapat diwujudkan tidak semata melalui kebijakan fiskal yang tepat, tetapi didukung oleh kebijakan moneter dan kebijakan lain yang saling bersinergi.

Dalam kondisi ekonomi global yang masih belum sepenuhnya kondusif, dan dengan memperhatikan sumber-sumber penerimaan yang dapat dihimpun dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan anggaran yang dihadapi ke depan, kebijakan fiskal pada tahun 2013 diperkirakan masih akan tetap ekspansif, di mana belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Hal tersebut diperlukan terutama untuk mendorong pertum-

buhan ekonomi. Ke depannya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu berakselerasi menuju titik yang lebih tinggi dari pencapaian selama ini, disertai dengan keyakinan Pemerintah akan lebih baiknya kondisi perekonomian ke depan. Tantangan yang dihadapi adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, yaitu harus bisa memenuhi tiga syarat sebagai berikut: (a) mampu membuka lapangan kerja serta bisa menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, (b) bersifat inklusif dan berdimensi pemerataan; serta (c) strukturnya harus ditopang secara proporsional oleh berbagai sektor pendukungnya, baik dari pendekatan permintaan agregat maupun penawaran agregat. Dalam tahun 2013, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen, diharapkan dapat mendukung penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan masing-masing menjadi sebesar 5,8–6,1 persen dan 9,5–10,5 persen.

Sejalan dengan tema pembangunan dalam tahun 2013: “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”, pada tahun 2013 arah kebijakan fiskal ditetapkan sebagai berikut: “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan melalui Upaya Penyehatan Fiskal”. Substansi dari tema tersebut menekankan pentingnya mengupayakan terwujudnya kondisi fiskal yang sehat dalam rangka mendorong terjaganya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun strategi untuk menjaga kesinambungan fiskal ditempuh melalui 4 (empat) hal pokok, yaitu: (a) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan kelestarian lingkungan hidup; (b) meningkatkan kualitas belanja negara melalui efisiensi belanja yang kurang produktif dan meningkatkan belanja infrastruktur untuk memacu pertumbuhan; (c) menjaga defisit anggaran pada batas aman (di bawah 3 persen terhadap PDB); dan (d) menurunkan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali.

Secara umum kebijakan fiskal tahun 2013 masih bersifat ekspansif untuk menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui: (1) Kebijakan pendapatan negara; (2) Kebijakan belanja negara; dan (3) Kebijakan pembiayaan. Kebijakan pendapatan negara tahun 2013 akan diarahkan untuk mengoptimalkan pen-

erimaan dari bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Di bidang perpajakan, kebijakan dan langkah penting yang akan ditempuh di tahun 2013, antara lain: (1) melanjutkan pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah dilakukan di tahun 2012; (2) meningkatkan perbaikan penggalian potensi perpajakan; serta (3) meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Selanjutnya, pokok-pokok kebijakan PNBP di tahun 2013 antara lain: (1) peningkatan PNBP migas dan nonmigas; (2) peningkatan kinerja badan usaha milik negara (BUMN) agar dapat berkontribusi lebih besar dalam deviden BUMN; serta (3) terus melakukan upaya inventarisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi PNBP K/L. Optimalisasi PNBP tersebut juga akan disertai dengan optimalisasi pendapatan badan layanan umum (BLU).

Di sisi belanja negara, esensi strategi belanja negara pada tahun 2013, baik belanja kementerian negara/lembaga (K/L) maupun belanja non-K/L tetap diarahkan pada strategi 4 (empat) pilar, yaitu: (1) mendukung terjaganya pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi (pro growth); (2) meningkatkan produktivitas dalam kerangka perluasan kesempatan kerja (pro job); (3) meningkatkan dan memperluas program pengentasan kemiskinan (pro poor); dan (4) mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (pro environment). Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah diharapkan dapat memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tema pembangunan nasional pada tahun 2013. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kualitas belanja negara, dalam tahun 2013 Pemerintah akan melakukan penajaman alokasi belanja agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam kaitan ini, Pemerintah berencana menaikkan tarif tenaga listrik, dan akan merealokasi dana hasil penghematan subsidi listrik tersebut untuk menambah anggaran infrastruktur.

Selanjutnya, kebijakan umum dari sisi pembiayaan yang akan ditempuh oleh Pemerintah pada tahun 2013, antara lain: (1) pemanfaatan dana saldo anggaran lebih (SAL), terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pasar surat berharga negara (SBN) dan membiayai defisit anggaran; (2) mengarahkan penggunaan dana

investasi pemerintah, terutama untuk pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kapasitas investasi pemerintah, terutama untuk pengambilalihan PT Inalum; (3) pengalokasian dana penyertaan modal negara (PMN) untuk meningkatkan kapasitas penjaminan program kredit usaha rakyat (KUR), modal awal badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS), restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, dan memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional dan pada ASEAN Infrastructure Fund; (4) mempertahankan kebijakan net negative flow pinjaman luar negeri; (5) mengupayakan tercapainya rasio utang terhadap PDB berkisar 21–23 persen pada akhir tahun 2013; dan (6) mengupayakan fleksibilitas pembiayaan utang melalui penggunaan instrumen utang dengan biaya yang relatif rendah dan risiko yang terkendali.

Melalui langkah-langkah tersebut, APBN diharapkan dapat dikelola secara efisien dan produktif, sehingga diharapkan tidak hanya akan memberi kontribusi yang optimal bagi kesinambungan fiskal, tetapi juga berdampak pada peningkatan daya saing perekonomian domestik. Selanjutnya, hal tersebut diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Kegiatan terkait kebijakan APBN

a. Dampak perubahan kebijakan perpajakan terhadap potensi penerimaan perpajakan sektoral.

Kajian ini dilakukan untuk membuat model yang mampu menghitung dampak perubahan kebijakan PPh nonmigas dan PPN secara sektoral. Model dampak tersebut dapat digunakan untuk melakukan simulasi dampak perubahan kebijakan PPh nonmigas dan PPN terhadap potensi PPh nonmigas dan PPN sehingga dapat dihasilkan beberapa alternatif usulan perubahan kebijakan baru serta dampak perubahan kebijakan tersebut terhadap potensi. Dari hasil kajian diketahui bahwa jika tarif PPh Badan dinaikkan sebesar 1 persen pada tahun 2012, dengan asumsi variabel lainnya tidak berubah, maka potensi PPh Badan tahun 2012 meningkat sebesar 4,0 persen. Sedangkan untuk PPh OP, jika tarif PPh OP tahun 2012 dinaikkan sebesar 1 persen untuk semua lapisan, dengan asumsi variabel

lainnya tidak berubah, maka potensi PPh OP tahun 2012 meningkat sebesar 14,07 persen.

b. Kajian potensi penerimaan perpajakan di Indonesia berdasarkan pendekatan makro.

Kajian ini bertujuan untuk menghitung potensi PPh non migas dan PPN secara sektoral dan menghitung daya pajak di Indonesia untuk menentukan sektor prioritas dalam upaya penggalian potensi penerimaan perpajakan. Kajian ini menggunakan data PDB sektoral, tabel IO, dan data Sakernas untuk menghitung taxbase dari PPh Badan, PPh OP, dan PPN yang kemudian dikalikan dengan tarifnya masing-masing untuk memperoleh besaran potensi dari PPh Badan, PPh OP, dan PPN. Hasil dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih mempunyai potensi untuk meningkatkan penerimaan perpajakannya. Namun demikian, upaya penggalian potensi untuk meningkatkan penerimaan perpajakan tersebut hanya dapat terwujud apabila Pemerintah mampu menghilangkan kendala-kendala yang ada. Secara ekonomi, Indonesia tidak mempunyai kendala yang cukup berarti karena Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup stabil dan mempunyai potensi berkembang di masa yang akan datang. Akan tetapi, secara non ekonomis Indonesia masih banyak menghadapi kendala, yaitu: (1) sempitnya basis pajak (narrowed tax base), (2) rendahnya tingkat kepatuhan WP (low tax compliance), (3) terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM petugas pajak, (4) terbatasnya biaya pemungutan pajak (cost of tax collection) yang berpengaruh terhadap terbatasnya kapasitas infrastruktur perkantoran dan IT, dan (5) terbatasnya data pendukung yang akan dipakai sebagai bahan pemeriksaan.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan perpajakan.

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh PDB sektoral terhadap penerimaan perpajakan, seberapa besar dampak kebijakan terhadap penerimaan perpajakan, dan kendala-kendala faktor non ekonomi di lapangan yang dapat mempengaruhi penerimaan perpajakan. Secara ekonomi, perlambatan pertumbuhan PDB berpengaruh terhadap perlambatan penerimaan perpajakan. Selain itu pen-

erimaan perpajakan juga dipengaruhi oleh degree of openness, korupsi, dan pendapatan per kapita. Pada faktor non ekonomi didapatkan beberapa permasalahan yang diduga dapat mempengaruhi kinerja penerimaan DJP secara keseluruhan. Beberapa permasalahan non ekonomi tersebut diantaranya adalah SDM, sistem perpajakan, sarana dan prasarana, reward and punishment, dan kepastian hukum.

d. Penggalian potensi pajak sektoral berbasis karakteristik provinsi di Indonesia.

Kajian ini dilakukan untuk memetakan potensi perekonomian dan mengidentifikasi potensi PPh Badan serta sektor yang menjadi unggulan dari 10 provinsi terbesar di Indonesia. Dari hasil kajian diketahui bahwa pada tahun 2012, 10 provinsi dengan nilai potensi PPh Badan terbesar adalah DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, dan Papua. Untuk sektor unggulan, dari tiga besar sektor unggulan masing-masing provinsi, rata-rata sudah menyumbang sekitar 70-80 persen dari total PPh Badan provinsi tersebut.

e. Penilaian Kinerja BUMN Perkebunan dan Konstruksi terhadap Peningkatan Kontribusi terhadap APBN

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan BUMN Konstruksi dan Perkebunan yang berpengaruh terhadap setoran dividen serta memetakan permasalahan yang menjadi kendala ketidakstabilan kinerja keuangan. Hasil kajian adalah (i) kendala-kendala yang menyebabkan ketidakstabilan kinerja keuangan BUMN sektor konstruksi antara lain: dampak dari gejolak ekonomi global; Undang-undang PPh konstruksi final 3% yang mengakibatkan PPh yang dibayarkan mencapai 40-50% dari laba sebelum pajak; dan masih terbatasnya modal BUMN konstruksi, (ii) Analisis rasio keuangan selama periode penelitian untuk BUMN sektor Konstruksi, PT. Wijaya Karya memiliki kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan BUMN sektor Konstruksi yang lain. Dari ke 7 analisa rasio tersebut PT. Wijaya Karya lebih unggul dalam Ratio Return on Asset, Debt Ratio, Current Ratio, Time Interest Earned Ratio. Hal ini sejalan dengan besarnya realisasi Bagian Pemerintah

atas Laba BUMN, selama periode penelitian (2009-2014) PT. Wijaya Karya memberikan kontribusi terbesar dari BUMN sektor Konstruksi, (iii) Kendala ketidakstabilan kinerja keuangan BUMN sektor perkebunan antara lain: kelebihan tenaga kerja yang tidak produktif dan fasilitas pensiun; BUMN Perkebunan sangat bergantung pada iklim; dan perbedaan persepsi mengenai aturan perpajakan komoditi PTPN untuk ekspor, (iv) Analisis rasio keuangan selama periode penelitian untuk BUMN sektor Perkebunan, PTPN III memiliki kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan BUMN sektor Perkebunan yang lain. Dari ke 7 analisa rasio tersebut PTPN III lebih unggul dalam ratio Return on Asset, Return on Equity, Debt Ratio, Gross Profit Margin, Time Interest Earned Ratio. Hal ini sejalan dengan besarnya realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, selama periode penelitian (2009-2014) PTPN III memberikan kontribusi terbesar dari BUMN sektor perkebunan.

f. Kajian Sistem Fiskal Perminyakan Indonesia, Permasalahan dan Alternative Pemecahannya

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah mendasar yang dihadapi sektor perminyakan dan memformulasikan alternatif solusi untuk kebijakan fiskal perminyakan, khususnya untuk Production Sharing Contract (PSC) yang diberlakukan di Indonesia. Hasil kajian adalah produksi minyak Indonesia sebenarnya masih bisa ditingkatkan baik melalui reaktivasi sumur-sumur yang telah dinonaktifkan, recovery, dan eksplorasi ladang-ladang baru. Namun demikian kegiatan-kegiatan tersebut belum banyak dilakukan karena beberapa hal: (i) pengaktifan sumur-sumur tua dan recovery memerlukan tambahan biaya. Dengan tingkat produksi yang relative lebih rendah karena kondisi sumur, nilai ekonomi sumur akan menurun. Untuk menarik investor, maka perlu adanya insentif khusus berupa sistem fiskal yang dapat mengakomodasi investasi baru tersebut; (ii) cekungan-cekungan minyak yang belum di eksplorasi umumnya berlokasi di Indonesia Timur dengan tingkat geologi yang sukar sehingga memerlukan biaya investasi yang tinggi dan risiko kegagalan juga tinggi.

Kepastian hukum dan stabilitas politik yang ikut mempengaruhi keputusan investasi, sistem fiskal perminyakan

akan menjadi penentu investasi baru di industri perminyakan Indonesia, bahkan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal ini karena dalam menilai kelayakan investasi, perusahaan minyak internasional (IOC) selalu melihat nilai keuntungan setelah pajak. Variabel-variabel seperti net present value (NPV), internal rate of return (IRR), payback period, dan profitability ratio (PR) umumnya dievaluasi atas dasar keuntungan setelah pajak.

g. Kajian Pengembangan Model Simulator Optimalisasi APBN

Beberapa isu terkait dengan optimalisasi alokasi APBN sering dimunculkan dalam berbagai kesempatan. Dalam hal harga minyak bumi, pemerintah dinilai belum melakukan optimalisasi APBN di pos-pos pengeluaran lainnya agar masalah kenaikan BBM tidak terganggu. Pemerintah hingga saat ini masih belum mengoptimalkan belanja APBN dengan kata lain bahwa belanja APBN belum dilaksanakan sesuai dengan porsi yang paling tepat terkait dengan kondisi minyak bumi.

Optimalisasi APBN dapat juga diartikan sebagai postur APBN yang paling sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan yang diterapkan saat ini. Postur APBN yang optimal dimaksudkan disini adalah postur APBN yang paling sesuai dengan perilaku variabel ekonomi yang mempengaruhi APBN secara historis. Historis APBN dan iklim ekonomi merekam postur APBN yang seimbang dan relevan dengan situasi perekonomian. Postur APBN yang terbentuk dengan cara ini digunakan sebagai benchmarking target APBN yang paling sesuai. Semakin lengkap informasi pembentukan APBN, semakin baik optimalisasi diperoleh. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dikembangkan model simulator optimalisasi APBN.

Esensi dikembangkannya model tersebut dilatarbelakangi bahwa selama ini masih berkembang pandangan bahwa dampak yang ditimbulkan APBN terhadap perekonomian (pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kemiskinan) masih belum optimal. Sementara itu postur APBN telah

bertumbuh secara pesat, hal ini berpotensi menciptakan inefisiensi. Untuk itulah perlu upaya serius untuk mendorong pencapaian output/outcome yang optimal dengan mendorong kombinasi yang paling efisien dalam struktur APBN namun tetap menjaga risiko fiskal terkendali dalam level yang manageable. Dalam rangka mewujudkan maka perlu dikembangkan sebuah tool atau model yang mampu merefleksikan kondisi perekonomian dan sekaligus mampu mengarahkan terbentuknya kombinasi yang paling efisien dalam mendukung pencapaian target dan sasaran pembangunan.

Kajian pengembangan model simulator optimalisasi APBN bertujuan untuk menyusun postur APBN yang paling sesuai dengan kondisi historis makro perekonomian yang mempengaruhinya. Pengembangan model yang dilakukan akan ditujukan pada pengembangan perangkat lunak yang dapat melakukan simulasi outlook APBN dan simulasi indikator variabel makro (asumsi makro). Penyusunan perangkat lunak ini menimbang berbagai latar belakang yang ada kaitannya dengan struktur APBN, Kebijakan dan sasaran APBN, Asumsi variabel-variabel ekonomi makro, pengaruh APBN pada perekonomian Makro dan risiko fiskal.

h. Kajian Pengembangan Model Simulator Optimalisasi APBN

Beberapa isu terkait dengan optimalisasi alokasi APBN sering dimunculkan dalam berbagai kesempatan. Dalam hal harga minyak bumi, pemerintah dinilai belum melakukan optimalisasi APBN di pos-pos pengeluaran lainnya agar masalah kenaikan BBM tidak terganggu. Pemerintah hingga saat ini masih belum mengoptimalkan belanja APBN dengan kata lain bahwa belanja APBN belum dilaksanakan sesuai dengan porsi yang paling tepat terkait dengan kondisi minyak bumi.

Optimalisasi APBN dapat juga diartikan sebagai postur APBN yang paling sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan yang diterapkan saat ini. Postur APBN yang optimal dimaksudkan disini adalah postur APBN yang paling sesuai dengan perilaku variabel ekonomi yang mempengaruhi APBN secara

historis. Historis APBN dan iklim ekonomi merekam postur APBN yang seimbang dan relevan dengan situasi perekonomian. Postur APBN yang terbentuk dengan cara ini digunakan sebagai benchmarking target APBN yang paling sesuai. Semakin lengkap informasi pembentukan APBN, semakin baik optimalisasi diperoleh. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dikembangkan model simulator optimalisasi APBN.

Esensi dikembangkannya model tersebut dilatarbelakangi bahwa selama ini masih berkembang pandangan bahwa dampak yang ditimbulkan APBN terhadap perekonomian (pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kemiskinan) masih belum optimal. Sementara itu postur APBN telah bertumbuh secara pesat, hal ini berpotensi menciptakan inefisiensi. Untuk itulah perlu upaya serius untuk mendorong pencapaian output/outcome yang optimal dengan mendorong kombinasi yang paling efisien dalam struktur APBN namun tetap menjaga risiko fiskal terkendali dalam level yang manageable. Dalam rangka mewujudkan maka perlu dikembangkan sebuah tool atau model yang mampu merefleksikan kondisi perekonomian dan sekaligus mampu mengarahkan terbentuknya kombinasi yang paling efisien dalam mendukung pencapaian target dan sasaran pembangunan.

Kajian pengembangan model simulator optimalisasi APBN bertujuan untuk menyusun postur APBN yang paling sesuai dengan kondisi historis makro perekonomian yang mempengaruhinya. Pengembangan model yang dilakukan akan ditujukan pada pengembangan perangkat lunak yang dapat melakukan simulasi outlook APBN dan simulasi indikator variabel makro (asumsi makro). Penyusunan perangkat lunak ini menimbang berbagai latar belakang yang ada kaitannya dengan struktur APBN, Kebijakan dan sasaran APBN, Asumsi variabel-variabel ekonomi makro, pengaruh APBN pada perekonomian Makro dan risiko fiskal.

i. Kajian Penguatan Ketahanan Fiskal untuk Mendukung Kesenambungan Fiskal

Kebijakan fiskal yang sustainabel akan meningkatkan fleksibilitas Pemerintah dalam mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen counter-cyclical khususnya pada saat krisis terjadi. Oleh karena itu, upaya memelihara sustainabilitas fiskal merupakan kebijakan strategis dalam rangka menjaga kredibilitas kebijakan fiskal di mata pelaku pasar sekaligus meningkatkan fleksibilitas bagi otoritas fiskal untuk merespon gejolak ekonomi.

Upaya memelihara kesenambungan fiskal juga perlu untuk dilaksanakan dengan memperkuat ketahanan fiskal yang ditempuh melalui upaya untuk meminimalisasi meningkatnya kerentanan fiskal (fiscal vulnerability). Hal tersebut dilakukan dengan pengendalian tingkat kerentanan fiskal dalam batas toleransi. Hal ini tentunya akan memberi kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas upaya mitigasi krisis.

Secara umum, kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam periode 1998-2012, kesenambungan fiskal Indonesia masih terjaga kesenambungan fiskalnya namun kerentanan fiskalnya meningkat, hal tersebut didapatkan dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Dengan adanya permasalahan tersebut maka diperlukan langkah-langkah pengendalian untuk memperkuat produktifitas dan meminimalkan risiko. Strategi untuk menjaga kesenambungan fiskal dilakukan dengan meningkatkan produktifitas APBN dan meminimalkan risiko pada saat penyusunan maupun pelaksanaan APBN.

Tujuan dilakukannya yaitu: (a) Melakukan evaluasi kondisi dan kesenambungan APBN berdasarkan data historis khususnya terkait perkembangan defisit dan utang pemerintah, (b) Merumuskan indikator-indikator fiskal sustainability, (c) Melakukan uji formal kondisi sustainabilitas fiskal di Indonesia, dan (d) Merumuskan langkah-langkah untuk menjaga budget sustainability.

Berdasarkan hasil analisis atas data 1998 sampai dengan 2012 terkait kerentanan fiskal (fiscal vulnerability) dan kesenambungan fiskal (fiscal sustainability), maka kajian ini dapat menyimpulkan beberapa hal antara lain: secara umum pengelolaan fiskal di Indonesia tingkat kerentanannya masih berada dalam batas toleransi dan relatif mendukung sustainabilitas fiskal namun risikonya meningkat sehingga perlu langkah preventif untuk mengendalikan risiko di masa mendatang; beberapa indikator kerentanan (vulnerability indicator) dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan fiskal khususnya terkait pengelolaan utang, sementara indikator ISF1, ISF2, ISF3, dan ISF4 dapat digunakan sebagai tambahan indikator untuk meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi sustainabilitas fiskal dan strategi untuk meningkatkan ketahanan fiskal dalam rangka menjaga kesenambungan fiskal dengan meminimalisasi risiko dan meningkatkan produktifitas APBN yang dilakukan melalui pengendalian kerentanan fiskal dalam batas aman, mengendalikan pertumbuhan utang dan mengarahkan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif dalam penyusunan APBN.

Berdasarkan hasil analisis atas kondisi pengelolaan fiskal Indonesia dalam periode 1998-2012, maka secara umum dapat disampaikan beberapa rekomendasi yang terkait dengan penguatan ketahanan fiskal dalam rangka menjaga kesenambungan fiskal adalah: walaupun secara umum kondisi pengelolaan fiskal mendukung kesenambungan fiskal, namun dengan adanya peningkatan risiko fiskal, maka pada masa mendatang perlu segera dilakukan strategi untuk memperkuat ketahanan fiskal melalui pengendalian risiko dengan menjaga tingkat kerentanan fiskal berada pada batas aman; bentuk kewaspadaan dan langkah preventif dalam meminimalkan risiko pada masa depan adalah agar dalam penyusunan kebijakan senantiasa mengendalikan tingkat kerentanan dalam batas toleransi dan perlu menambah beberapa indikator untuk mengidentifikasi sekaligus menjaga sustainabilitas fiskal yaitu ISF1, ISF2 dan ISF4. Hal tersebut dimaksudkan agar tambahan indikator tersebut mampu meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi kondisi riil ketahanan fiskal; strategi dalam menjaga

kesinambungan fiskal antara lain melalui (i) meminimalisasi risiko untuk memperkuat ketahanan fiskal dan meningkatkan produktifitas APBN, (ii) meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi sustainabilitas fiskal, serta (iii) menjaga daya tahan fiskal.

Dengan demikian, kajian ini menghasilkan beberapa hal penting yang perlu dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan fiskal antara lain dengan langkah-langkah: (i) dalam penyusunan APBN hendaknya mempertimbangkan beberapa indikator yang berfungsi sebagai upaya preventif untuk pengendalian risiko sekaligus mendorong produktivitas APBN: mengendalikan defisit anggaran dalam batas aman (<3 persen PDB); mengendalikan dalam pengadaan utang dengan menjaga debt to GDP ratio dibawah 25 persen PDB, walaupun kalau merujuk Maastricht Treaty sebesar 60 persen PDB sebagaimana diadopsi dalam UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; mengendalikan penambahan utang diselaraskan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Intinya dijaga agar pertumbuhan stok utang tidak melebihi proyeksi pertumbuhan ekonomi, sehingga risiko lebih rendah dibandingkan produktifitas; mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif yaitu dengan menjaga agar current budget balance sama dengan nol, agar pemanfaatan untuag untuk mendukung belanja modal; menjaga solvabilitas dengan mengendalikan debt service to domestic revenue ratio dalam batas aman (25%- 35%) dan menjaga interest to domestic revenue ratio pada level (4,6%- 6,8 %), present value of debt ratio berada di kisaran (88%-127%) dan debt to domestic revenue ratio pada kisaran (90%-150%), (ii) untuk meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi sustainabilitas fiskal maka perlu menambah beberapa indikator –indikator sustainabilitas fiskal ISF1, ISF2 dan ISF4 sebagai alat untuk mengidentifikasi fiscal sustainability agar lebih detail dalam menangkap kondisi riil ketahanan fiskal; (iii) agar ketahanan fiskal lebih terjamin perlu diwacanakan untuk menjaga ketersediaan fiscal buffer yang memadai dengan menjaga SAL minimal sebesar keperluan awal tahun atau meningkatkan fleksibilitas pengelolaan APBN misal penguatan pasal krisis, meningkatkan diskresi pemerintah dalam mengakses dan memanfaatkan

sumber-sumber pembiayaan (BLU, BUMN, BUMD, lainnya), untuk menjaga sustainabilitas fiskal dan stabilitas perekonomian.

j. Kajian Efektivitas Subsidi Kredit Program Bagi Pengembangan Sektor Pertanian

Kajian ini bertujuan untuk memetakan permasalahan dan tantangan pemberian subsidi kredit program untuk pengembangan sektor pertanian; mengevaluasi keefektifan pemberian subsidi kredit program untuk pengembangan sektor pertanian dari sisi (i) penerima kredit, (ii) prosedural, dan (iii) pengambil kebijakan; dan memberikan masukan solusi dari sisi (i) penerima kredit, (ii) prosedural, dan (iii) pengambil kebijakan. Hasil kajian adalah pada hakekatnya kajian ini melihat efektivitas pelaksanaan pemberian subsidi kredit program. Pada tahun 2013, jenis subsidi kredit program antara lain meliputi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Risk Sharing KKPE, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi–Revitalisasi Perkebunan (KKPE-RP), Kredit Usaha Penggemukkan Sapi (KUPS), Subsidi Resi Gudang (SRG), Imbal Jasa Penjaminan KUR (IJP-KUR). Dengan menggunakan metode content analysis survey, kajian ini menyimpulkan bahwa fasilitas subsidi kredit program belum banyak diketahui oleh petani dan Pemda. Di samping itu, sebagian besar berpendapat bahwa suku bunga subsidi tidaklah memberatkan, namun plafon kredit yang diberikan terlalu kecil. Belum adanya kebijakan pasca panen mengenai jaminan pasar dan harga juga menjadi kendala dalam penggunaan fasilitas subsidi kredit.

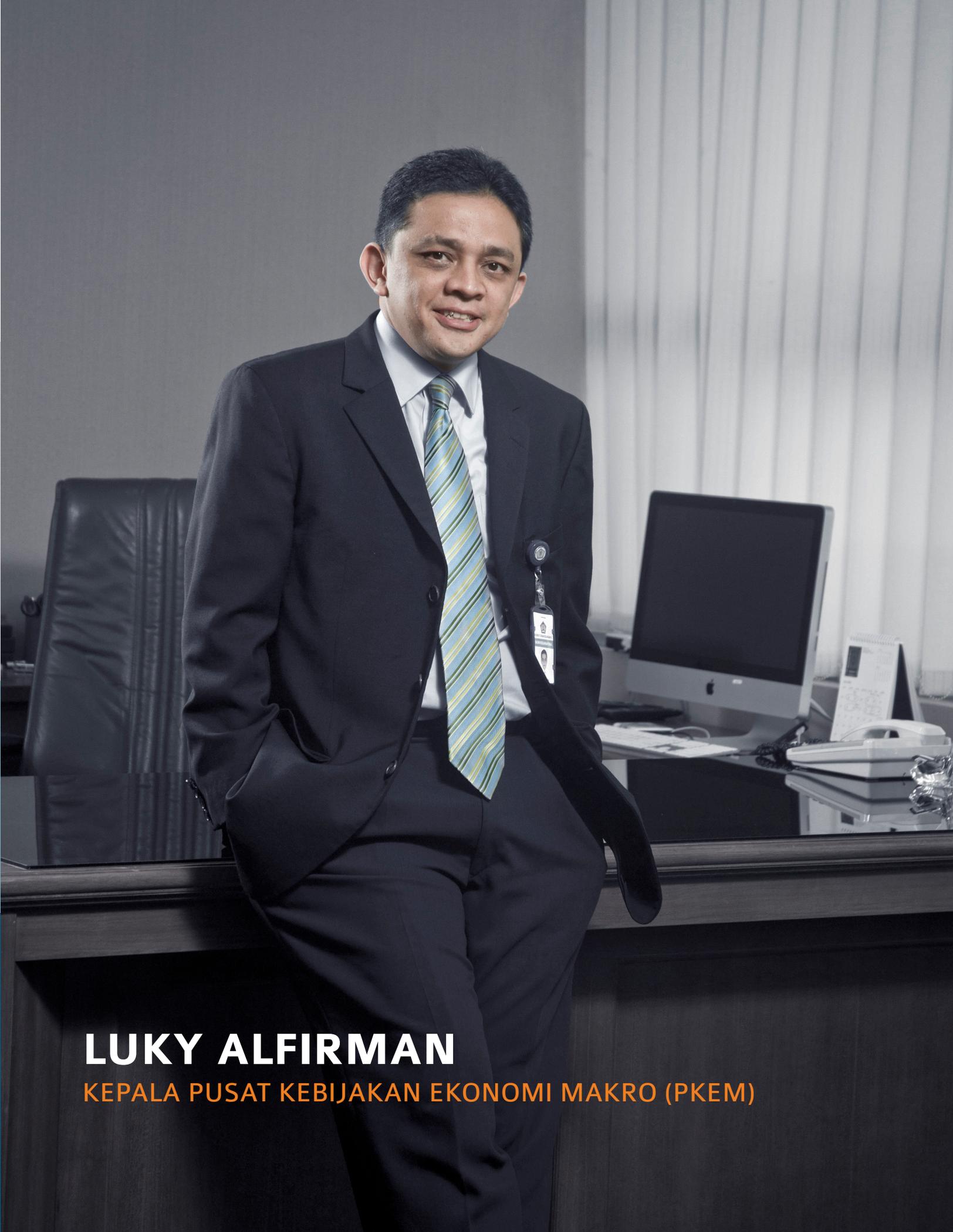
k. Kajian Singkat

Selain beberapa kajian yang telah disebutkan di atas, PKAPBN juga melakukan beberapa kajian singkat, yaitu :

- i. Usulan Pembiayaan Asuransi Komersial terkait Penyakit Dampak Asap Rokok
- ii. Kajian Singkat Tinjauan Hukum Perpajakan atas Usulan Government Refunded Program (GRP)
- iii. Kajian Dampak Pelarangan Ekspor Bijih Mineral
- iv. Kajian Skema Pendanaan Revitalisasi Bulog
- v. Kajian Pembiayaan Surplus 10 Juta ton Beras – Subsidi Output VS Subsidi Input
- vi. Kajian Subsidi Listrik Tepat Sasaran

- vii. Dana Pendamping DAK untuk Daerah Tertinggal dan Infrastruktur
- viii. Perhitungan Proyeksi Pajak Daerah Tahun 2014
- ix. Intervensi Pemerintah Pusat dalam Alokasi Belanja APBD
- x. Kajian Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Kinerja Pelayanan Dasar Publik di Indonesia
- xi. Kajian Kinerja Fiskal Daerah Otonom Baru (DOB)
- xii. Kajian Penyusunan Model Ekonomi Daerah (MOEDAH)
- xiii. Kajian Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Perekonomian Daerah
- xiv. Penyusunan Buku Saku Keuangan Daerah



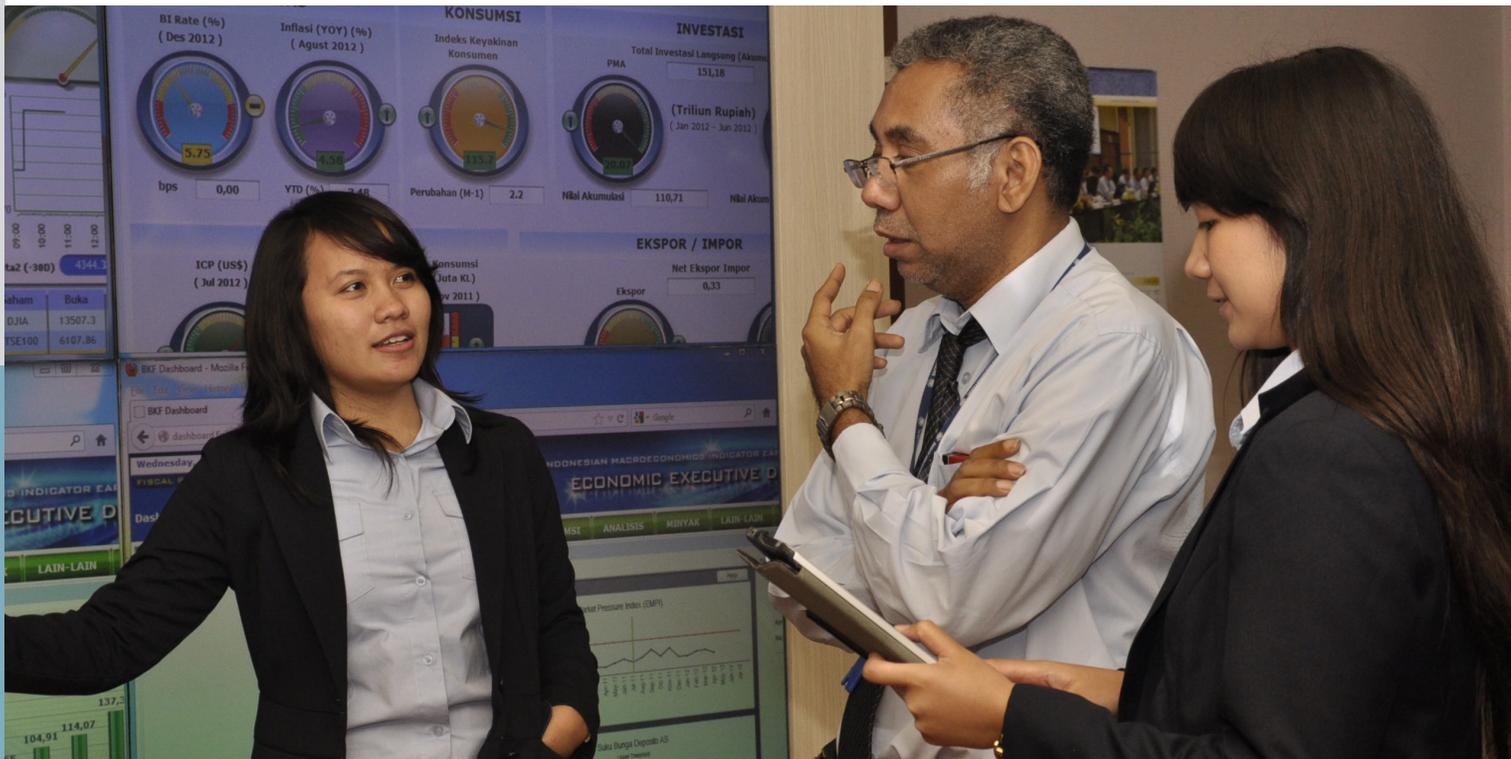


LUKY ALFIRMAN

KEPALA PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO (PKEM)

“Pusat Kebijakan Ekonomi Makro mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dini perkembangan ekonomi makro, analisis kebijakan dan perumusan rekomendasi kebijakan ekonomi makro.”

KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO



Tantangan Global

- (a) risiko lambatnya pemulihan pertumbuhan ekonomi global, termasuk beberapa negara mitra dagang utama;
- (b) potensi peningkatan persaingan likuiditas global seiring perubahan arah kebijakan moneter yang lebih ketat di banyak negara;
- (c) potensi volatilitas harga komoditas dunia, khususnya minyak, yang sangat rentan terhadap faktor-faktor seperti iklim, kondisi geopolitik, dan keamanan.

Tantangan Domestik

- (a) ketahanan pangan;
- (b) ketersediaan infrastruktur dan energi listrik; (c) perbaikan iklim investasi.

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan Ekonomi	6,8%
Inflasi	4,9%
Suku Bunga SPN 3 Bulan	5,0%
Nilai Tukar	Rp9.300,00/US\$
Harga Minyak ICP	US\$100/Barel
Lifting Minyak	900 ribu barel/hari
Lifting Gas	1.360 MBOEPD

Proses pemulihan ekonomi dunia tidak berjalan sesuai harapan, dalam arti lebih lambat dari perkiraan semula. Fase ekspansi ekonomi dunia yang diharapkan berjalan pada tahun 2013 pada kenyataannya meleset dari perkiraan semula dan cenderung mengalami revisi ke bawah serta masih diliputi risiko ketidakpastian. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, laju pertumbuhan yang masih mengecewakan di negara berkembang mencerminkan sejumlah kendala, yaitu hambatan infrastruktur dan keterbatasan kapasitas produksi, melambatnya pertumbuhan permintaan eksternal, lebih rendahnya harga komoditas, kekhawatiran stabilitas keuangan, dan untuk beberapa negara, kapasitas dukungan kebijakan yang melemah. Kedua, resesi di kawasan Eropa lebih parah dari yang diperkirakan akibat rendahnya permintaan, turunnya kepercayaan, dan pelemahan neraca perdagangan yang secara keseluruhan berinteraksi memperburuk efek terhadap pertumbuhan akibat dampak dari kondisi fiskal dan keuangan yang ketat. Ketiga, perekonomian AS tumbuh lebih lambat akibat kontraksi fiskal yang lebih kuat dari perkiraan. Kontraksi fiskal juga menghambat peningkatan permintaan swasta.

Dalam tahun 2013, kinerja ekonomi global secara umum diperkirakan akan mengalami perbaikan, walaupun masih diwarnai berbagai tantangan dan risiko yang relatif berat. Beberapa potensi risiko tersebut meliputi kemungkinan perlambatan pertumbuhan yang lebih lama di negara berkembang, kredit yang melambat, dan kondisi keuangan yang lebih ketat akibatantisipasi berakhirnya stimulus kebijakan moneter (quantitative easing) Federal Reserve di Amerika Serikat yang dapat menyebabkan pembalikan arus modal.

Perekonomian nasional dalam tahun 2013 akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks baik dari eksternal maupun domestik. Beberapa tantangan global ke depan antara lain (a) risiko lambatnya pemulihan pertumbuhan ekonomi global, termasuk beberapa negara mitra dagang utama; (b) potensi peningkatan persaingan likuiditas global seiring perubahan arah kebijakan moneter yang lebih ketat di banyak negara; (c) potensi volatilitas harga komoditas dunia, khususnya minyak, yang sangat rentan terhadap faktor-faktor seperti iklim, kondisi geopolitik, dan keamanan. Sementara itu, tantangan dari

sisi domestik meliputi (a) ketahanan pangan; (b) ketersediaan infrastruktur dan energi listrik; dan (c) perbaikan iklim investasi.

Faktor lain yang perlu dicermati adalah perkembangan harga minyak dunia mengingat dampaknya terhadap postur APBN terutama pengaruhnya terhadap penerimaan migas dan subsidi cukup krusial. Harga minyak dunia, khususnya Brent, diperkirakan masih stabil berada di atas US\$100 per barel dan masih terdapat risiko instabilitas geopolitik. Sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah dunia, harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada tahun 2013 masih berada pada kisaran di atas US\$100 per barel. Pada sisi lain, peningkatan lifting migas Indonesia masih sangat terbatas. Kendala teknis di lapangan, panjangnya proses perijinan, serta menurunnya kapasitas sumber migas Indonesia masih menjadi tantangan utama yang menyebabkan sulitnya pencapaian target tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi

Dalam lima tahun terakhir (2008-2012), perekonomian nasional mampu tumbuh cukup kuat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,9 persen. Tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi selalu berada di atas 6,0 persen. Pada tahun 2008 ekonomi Indonesia tumbuh 6,0 persen dengan dorongan dari permintaan domestik yang cukup tinggi. Namun pada tahun 2009, perekonomian nasional mengalami perlambatan yang cukup signifikan akibat dampak krisis global yang mempengaruhi sisi eksternal, dengan berkontraksinya ekspor impor karena menurunnya pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia, sehingga hanya tumbuh 4,6 persen. Pada tahun-tahun selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh stabil di tengah kondisi perekonomian global yang belum pulih.

Pada tahun 2012, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 6,2 persen, melambat bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 6,5 persen. Lemahnya kinerja ekonomi global memberikan dampak terhadap sisi eksternal PDB. Pertumbuhan ekspor neto mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu sebesar minus 4,7 persen, jauh menurun dari tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 14,7 persen. Sementara itu, masih kuatnya permintaan domestik utamanya konsumsi rumah tangga dan investasi

menjadi sumber pendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012. Dari sisi penawaran, tercatat tiga sektor yang mempunyai kontribusi besar terhadap pertumbuhan, yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

Konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang cukup penting dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut tidak saja disebabkan oleh perannya yang cukup besar dalam PDB, tetapi juga mengingat pertumbuhannya yang cukup stabil. Selama periode 2008 hingga 2012, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga bergerak pada kisaran 4,7 persen hingga 5,3 persen, dengan rata-rata mencapai 5,0 persen. Dalam periode tersebut, konsumsi rumah tangga telah menyumbang sekitar 57 persen dari total pembentukan PDB.

Besarnya peran konsumsi rumah tangga antara lain didukung oleh struktur perekonomian Indonesia serta besarnya jumlah penduduk disertai peningkatan rasio usia produktif (demographic dividend) sehingga mampu mendorong permintaan domestik. Tren peningkatan usia produktif tersebut diperkirakan masih akan terus terjadi selama sepuluh hingga lima belas tahun ke depan, sehingga dapat menjadi modal dasar untuk mencapai pertumbuhan yang relatif tinggi dan stabil. Walaupun didukung modal dasar faktor demografi tersebut, konsumsi rumah tangga tidak lepas dari tekanan-tekanan yang terjadi. Selama periode 2008–2012, gejolak dan krisis yang terjadi di perekonomian global juga telah berdampak pada kondisi ekonomi domestik. Pada tahun 2009, konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh sebesar 4,9 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2008 yang mencapai 5,3 persen. Perlambatan tersebut terlihat pada beberapa indikator ekonomi seperti penjualan ritel, penjualan mobil dan motor, dan jumlah uang beredar. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan stimulus dan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang mampu meredakan tekanan yang terjadi serta tetap menjaga kesehatan fundamental ekonomi. Di samping itu, konsumsi rumah tangga dan perekonomian juga mendapat insentif tambahan dari pelaksanaan pemilu sehingga tidak terjadi perlambatan yang lebih dalam.

Pada periode tahun 2010 hingga 2011, konsumsi rumah tangga kembali melambat dan tumbuh sebesar 4,7 persen di kedua tahun tersebut. Perlambatan konsumsi rumah tangga terutama disebabkan oleh tingginya inflasi, akibat kenaikan harga bahan pangan global dan domestik. Selain itu, kecenderungan masyarakat untuk meningkatkan tabungan dan deposito di perbankan juga berpengaruh pada melambatnya konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2012, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,3 persen. Perbaikan ini antara lain didorong oleh peningkatan upah minimum provinsi (UMP) di beberapa daerah, penurunan tingkat pengangguran, laju inflasi yang menurun sehingga mampu mengangkat daya beli riil masyarakat, serta dukungan program-program pemerintah seperti program PNPM, BOS, Jamkesmas, dan program pro-poor lainnya.

Konsumsi pemerintah merupakan pengeluaran pemerintah yang dipergunakan untuk membiayai jalannya kegiatan pemerintahan. Kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan PDB mencapai sebesar 0,81 persen pada tahun 2008 dan 1,27 persen pada tahun 2009. Dalam periode yang sama, pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai sebesar 10,4 persen pada Perkembangan ekspor dan impor selama periode 2008 sampai dengan 2012 berfluktuasi mengikuti perkembangan ekonomi global. Kontraksi ekonomi global yang terjadi pada tahun 2009 telah menyebabkan penurunan aktivitas ekspor dan impor di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan ekspor yang pada tahun 2008 tumbuh sebesar 9,5 persen, kemudian berbalik dan mengalami kontraksi hingga mencapai pertumbuhan minus 9,7 persen pada tahun 2009. Hal yang serupa terjadi pula pada aktivitas impor yang pada tahun 2008 tumbuh 10,0 persen, menurun hingga mencapai pertumbuhan minus 15,0 persen pada tahun 2009. Walaupun terjadi tekanan pada kinerja perdagangan internasional, secara total masih terjadi peningkatan ekspor neto pada tahun 2009. Melemahnya pendapatan dan daya beli mitra dagang utama Indonesia telah menyebabkan penurunan ekspor secara signifikan.

Penurunan ekspor tersebut telah membawa dampak yang sama pada kinerja impor, tidak saja melalui dampak pelemahan pada pendapatan dan daya beli masyarakat

Indonesia, tetapi juga pada kebutuhan akan bahan baku dan barang modal untuk memproduksi komoditi ekspor. Disamping itu, krisis ekonomi di berbagai negara telah menyebabkan kekhawatiran pada stabilitas keuangan dan ekonomi di negara-negara berkembang, sehingga menimbulkan tekanan likuiditas yang juga berdampak negatif pada dukungan perbankan terhadap kegiatan produksi. Memasuki tahun 2010 hingga tahun 2011, kinerja ekspor dan impor kembali membaik.

Mulai membaiknya kondisi ekonomi global, walaupun dalam tingkat yang relatif lemah, telah membawa dampak positif pada kinerja ekspor Indonesia. Pertumbuhan ekspor dan impor kembali mencatat pertumbuhan di atas 10 persen. Namun, tekanan pada kinerja ekspor dan impor kembali terlihat pada tahun 2012. Lambatnya proses pemulihan ekonomi global dan meningkatnya tekanan ekonomi di negara-negara mitra dagang kembali menyebabkan pelemahan kinerja kedua komponen pendapatan nasional tersebut.

Pada tahun 2012 terjadi perkembangan yang kurang baik bagi kinerja perdagangan internasional Indonesia. Perlambatan laju pertumbuhan ekspor dan penurunan harga komoditas ekspor utama Indonesia di pasar internasional telah menyebabkan penurunan nilai ekspor Indonesia secara signifikan. Pada saat yang sama, terjadi penurunan impor namun tidak secepat penurunan ekspor. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya defisit neraca perdagangan Indonesia, pertama kali sejak tahun 1961. Bila disimak lebih jauh, salah satu penyebab terjadi defisit neraca perdagangan tersebut adalah tekanan defisit pada neraca perdagangan komoditi migas. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan selama ini mendorong kenaikan konsumsi BBM domestik yang berdampak pada kebutuhan impor BBM yang tinggi. Pada saat yang sama, produksi migas Indonesia tengah mengalami penurunan terutama akibat sumursumur minyak yang semakin tua dan kurang produktif. Peningkatan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi yang disertai dengan kenaikan harga minyak mentah dan kondisi terus melemahnya nilai tukar Rupiah, antara lain menjadi latar belakang kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi di dalam negeri. Peningkatan harga BBM bersubsidi yang disertai kebijakan pengelolaan konsumsi BBM diharapkan dapat mendorong penghematan

konsumsi BBM dalam negeri dan menghambat pertumbuhan impor migas yang terlalu tinggi. Dari sisi lapangan usaha, hampir semua sektor menunjukkan peningkatan setiap tahun. Bila dicermati lebih lanjut, terlihat bahwa pertumbuhan kelompok sekunder dan tersier selalu lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan kelompok primer, bahkan cenderung lebih tinggi bila dibanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, meskipun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi besar, namun pertumbuhan sektor primer selama lima tahun terakhir selalu lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Sektor primer sejak 2008 hingga 2012 hanya tumbuh rata-rata 3,1 persen, dalam hal ini, sektor pertanian tumbuh rata-rata 3,8 persen dan sektor pertambangan 2,4 persen. Kelompok sektor sekunder tumbuh rata-rata 6,7 persen, dengan sektor industri pengolahan tumbuh 4,5 persen, sektor listrik, gas, dan air bersih tumbuh 8,4 persen, serta sektor konstruksi tumbuh 7,1 persen.

Kelompok tersier tumbuh rata-rata sebesar 8,2 persen, dengan pertumbuhan terendah terjadi di sektor jasa-jasa dengan rata-rata sebesar 6,1 persen, diikuti sektor keuangan sebesar 6,6 persen, sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 6,8 persen, serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 13,3 persen. Pertumbuhan tertinggi masih tetap ditempati oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, meskipun dari tahun ke tahun pertumbuhannya makin melambat. Dilihat strukturnya atau sumbangan dari setiap sektor ekonomi, selama lima tahun terakhir sektor industri pengolahan menempati posisi pertama dengan struktur sebesar 25,4 persen, diikuti oleh sektor pertanian 14,8 persen, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 13,7 persen. Struktur terendah berasal dari sektor listrik, gas, dan air bersih yang menyumbang sebesar 0,8 persen. Pada tahun 2012, hampir semua sektor mengalami peningkatan pertumbuhan. Peningkatan pertumbuhan terjadi pada sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor konstruksi, serta sektor keuangan. Sementara itu, sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa.

Inflasi

Sejak beberapa tahun terakhir, volatilitas harga komoditas energi di pasar internasional berpengaruh terhadap perkembangan harga komoditas bahan pangan. Kondisi tersebut pada energi maupun bahan pangan, sehingga memberikan pengaruh terhadap perkembangan laju inflasi di Indonesia. Volatilitas harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar internasional disebabkan oleh adanya gangguan produksi yang mengakibatkan berkurangnya pasokan, di tengah meningkatnya jumlah permintaan (output gap). Beberapa faktor penyebab timbulnya gangguan produksi komoditas tersebut di negara-negara produsen antara lain adalah anomali iklim, bencana alam, dan konflik geopolitik. Tekanan output gap yang meningkat di pasar internasional tersebut pada akhirnya berdampak pada timbulnya gejolak harga komoditas sejenis di pasar dalam negeri.

Perkembangan harga komoditas bahan pangan dan energi yang meningkat di pasar internasional pada tahun 2008 telah mendorong peningkatan harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar domestik. Dalam rangka mengendalikan subsidi BBM, Pemerintah melakukan kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada Juni 2008. Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi mendorong laju inflasi pada tahun 2008 ke level 11,06 persen (yoy). Kondisi sebaliknya, pada saat harga komoditas energi di pasar internasional mengalami penurunan pada tahun 2009, Pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut mengakibatkan laju inflasi mengalami penurunan tajam ke level 2,78 persen (yoy), seiring dengan penurunan harga komoditas energi dan stabilnya harga komoditas bahan pangan di pasar internasional

Perkembangan harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar internasional yang kembali meningkat pada tahun 2010 mendorong peningkatan laju inflasi hingga mencapai level 6,96 persen (yoy). Tekanan inflasi dari sumber eksternal tersebut memperberat laju inflasi domestik mengingat pada saat yang bersamaan, pasar dalam negeri juga mengalami gangguan pasokan bahan pangan sebagai dampak dari serangkaian bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah sentra produksi. Tekanan tersebut menimbulkan dorongan peningkatan

harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar dalam negeri sehingga meningkatkan inflasi tahun 2010. Pada tahun 2011, tekanan yang bersumber dari faktor eksternal cenderung menurun, yang disertai dengan produksi dalam negeri yang mengalami peningkatan, arus distribusi yang mengalami perbaikan, serta nilai tukar rupiah yang stabil. Laju inflasi tahun 2011 berada pada level 3,79 persen (yoy), yang didorong oleh penurunan laju inflasi pada komoditas bahan pangan. Rendahnya laju inflasi tahun 2011 juga didorong dengan terjadinya deflasi terbesar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yang terjadi pada Maret 2011, yaitu sebesar 0,32 persen (mtm). Peningkatan harga komoditas energi di pasar internasional sejak akhir tahun 2011 hingga awal paruh pertama 2012 telah mendorong kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian nasional.

Memasuki tahun 2012, laju inflasi mulai menunjukkan tren peningkatan yang bersumber dari gejolak harga komoditas energi di pasar internasional akibat tekanan geopolitik yang terjadi. Ketegangan di beberapa negara produsen minyak dunia di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara telah menyebabkan gangguan produksi dan pasokan ke pasar internasional. Pada tahun gilirannya berpengaruh terhadap perkembangan harga komoditas sejenis, baik komoditas energi maupun bahan pangan, sehingga memberikan pengaruh terhadap perkembangan laju inflasi di Indonesia. Volatilitas harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar internasional disebabkan oleh adanya gangguan produksi yang mengakibatkan berkurangnya pasokan, di tengah meningkatnya jumlah permintaan (output gap). Beberapa faktor penyebab timbulnya gangguan produksi komoditas tersebut di negara-negara produsen antara lain adalah anomali iklim, bencana alam, dan konflik geopolitik. Tekanan output gap yang meningkat di pasar internasional tersebut pada akhirnya berdampak pada timbulnya gejolak harga komoditas sejenis di pasar dalam negeri.

Perkembangan harga komoditas bahan pangan dan energi yang meningkat di pasar internasional pada tahun 2008 telah mendorong peningkatan harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar domestik. Dalam rangka mengendalikan subsidi BBM, Pemerintah melakukan kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada

Juni 2008. Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi mendorong laju inflasi pada tahun 2008 ke level 11,06 persen (yoy). Kondisi sebaliknya, pada saat harga komoditas energi di pasar internasional mengalami penurunan pada tahun 2009, Pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut mengakibatkan laju inflasi mengalami penurunan tajam ke level 2,78 persen (yoy), seiring dengan penurunan harga komoditas energi dan stabilnya harga komoditas bahan pangan di pasar internasional.

Perkembangan harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar internasional yang kembali meningkat pada tahun 2010 mendorong peningkatan laju inflasi hingga mencapai level 6,96 persen (yoy). Tekanan inflasi dari sumber eksternal tersebut memperberat laju inflasi domestik mengingat pada saat yang bersamaan, pasar dalam negeri juga mengalami gangguan pasokan bahan pangan sebagai dampak dari serangkaian bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah sentra produksi. Tekanan tersebut menimbulkan dorongan peningkatan harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar dalam negeri sehingga meningkatkan inflasi tahun 2010. Pada tahun 2011, tekanan yang bersumber dari faktor eksternal cenderung menurun, yang disertai dengan serta nilai tukar rupiah yang stabil. Laju inflasi tahun 2011 berada pada level 3,79 persen (yoy), yang didorong oleh penurunan laju inflasi pada komoditas bahan pangan. Rendahnya laju inflasi tahun 2011 juga didorong dengan terjadinya deflasi terbesar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yang terjadi pada Maret 2011, yaitu sebesar 0,32 persen (mtm).

Peningkatan harga komoditas energi di pasar internasional sejak akhir tahun 2011 hingga awal paruh pertama 2012 telah mendorong kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian nasional. Memasuki tahun 2012, laju inflasi mulai menunjukkan tren peningkatan yang bersumber dari gejolak harga komoditas energi di pasar internasional akibat tekanan geopolitik yang terjadi. Ketegangan di beberapa negara produsen minyak dunia di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara telah menyebabkan gangguan produksi dan pasokan ke pasar internasional. Pada tahun yang sama, walaupun perekonomian global melemah, terjadi peningkatan konsumsi minyak dunia yang melampaui jumlah produk-

sinya. Hal tersebut menyebabkan tekanan harga minyak dunia dan juga penurunan cadangan minyak mentah yang tersedia.

Secara historis, gejolak di pasar komoditas energi tersebut berdampak pada peningkatan harga di pasar komoditas bahan pangan internasional, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan harga komoditas bahan sejenis di pasar domestik. Harga komoditas bahan pangan di pasar internasional mulai menunjukkan peningkatan pada paruh kedua tahun 2012 seiring dengan kekeringan yang melanda beberapa negara produsen komoditas pangan dunia serta meningkatnya upaya konversi bio-fuel sebagai sumber energi alternatif. Hal ini menimbulkan tekanan terhadap harga komoditas bahan pangan di pasar domestik sehingga mendorong peningkatan kontribusi inflasi kelompok bahan pangan terhadap laju inflasi nasional sepanjang tahun 2012.

Namun, gejolak komoditas harga pangan di pasar internasional dapat diredam seiring dengan terjaminya pasokan dan ketersediaan beberapa komoditas pangan strategis, relatif lancarnya arus distribusi serta terjaganya tingkat konsumsi masyarakat. Produksi beras nasional tahun 2012 meningkat 5,02 persen, bila dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya, sehingga mendorong peningkatan penyerapan dan pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog yang mencapai 3,55 juta ton. Produksi komoditas bahan pangan lainnya juga relatif meningkat sehingga tingkat ketersediaan komoditas tersebut relatif terjaga di pasar. Keputusan Pemerintah untuk tidak melaksanakan kebijakan strategis di bidang harga, pergerakan nilai tukar rupiah yang relatif stabil serta terjaganya ekspektasi inflasi masyarakat juga turut mendorong meredanya tekanan inflasi di 2012 sehingga laju inflasi nasional dapat terjaga pada kisaran 4,3 persen (yoy).

Suku Bunga SPN 3 Bulan

Suku bunga SPN 3 bulan mulai dijadikan sebagai salah satu asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN sejak pengajuan RAPBN Perubahan tahun 2011 menggantikan suku bunga SBI 3 bulan. Pelelangan SBI 3 bulan dihentikan sejak bulan Oktober 2010 oleh Bank Indonesia sebagai langkah untuk mengantisipasi adanya pembalikan arus dana (sudden capital reversal)

yang dikhawatirkan akan menimbulkan fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. Penghentian lelang SBI 3 bulan diharapkan mampu mengalihkan modal asing masuk ke instrumen investasi dengan tenor yang lebih panjang.

Dengan dihentikannya pelelangan SBI 3 bulan oleh Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan (terms and condition) Surat Utang Negara (SUN) dengan tingkat bunga mengambang (Variable Rate/VR), Pemerintah berkewajiban untuk menerbitkan surat utang lain yang memiliki sistem pelelangan setara dengan SBI 3 bulan. Surat utang dimaksud juga digunakan sebagai dasar perhitungan tingkat bunga surat utang negara dengan tingkat bunga mengambang atau variable rate. Pada bulan Maret 2011, Pemerintah mulai menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dengan tenor 3 bulan sebagai dasar perhitungan tingkat bunga surat utang negara dengan tingkat bunga mengambang atau variable rate. Selanjutnya, suku bunga SPN 3 bulan digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan postur APBN. Sepanjang tahun 2011, Pemerintah telah melakukan pelelangan SPN 3 bulan sebanyak 15 kali pelelangan, dengan rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 4,8 persen. Minat investor cukup besar yang terlihat pada oversubscribed penawaran yang terjadi pada setiap pelelangan.

Meningkatnya posisi Indonesia ke level investment grade sejak bulan Desember 2011 turut mempengaruhi tingkat suku bunga SPN 3 bulan. Selama tahun 2012, Pemerintah telah melakukan pelelangan SPN 3 bulan sebanyak 14 kali dengan rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 3,2 persen. Penguatan tingkat suku bunga SPN 3 bulan ini selain dipengaruhi oleh meningkatnya peringkat utang pemerintah juga didukung oleh faktor-faktor baik eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputi aliran modal masuk (capital inflows), suku bunga global, serta harga komoditas internasional. Tekanan yang muncul pada tingkat suku bunga terutama didorong oleh adanya sentimen yang muncul akibat krisis Eropa yang tidak kunjung selesai. Sementara itu, faktor internal yang memengaruhi terutama bersumber dari ekspektasi terhadap inflasi.

Nilai Tukar

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah sepanjang tahun 2008—2011. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga akhir triwulan ketiga tahun 2008 bergerak relatif stabil pada rentang Rp9.051 hingga Rp9.500 per dolar AS. Kekhawatiran pelaku pasar terhadap dampak krisis ekonomi di Amerika Serikat serta masih belum adanya kejelasan tentang penanganan krisis di negara-negara Eropa mendorong pelemahan nilai tukar rupiah sepanjang triwulan keempat tahun 2008.

Dalam perkembangannya, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan tajam pada rentang Rp9.500 hingga Rp12.400 per dolar AS, bahkan sempat menyentuh level terendah Rp12.650 per dolar AS pada 24-25 November 2008, yang merupakan level rupiah terendah sejak tahun 2005. Pelemahan rupiah secara tajam ini mendorong rata-rata nilai tukar rupiah selama tahun 2008 bergerak pada kisaran Rp9.692 per dolar AS, melemah sebesar 6,05 persen bila dibanding dengan posisi nilai tukar tahun sebelumnya. Pelemahan nilai tukar rupiah sebagai imbas kekhawatiran terhadap prospek pemulihan ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa masih berlanjut hingga triwulan kedua tahun 2009. Namun, nilai tukar rupiah kembali menunjukkan tren penguatan sejak triwulan ketiga, meskipun secara tahunan, rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2009 berada pada kisaran Rp10.408 per dolar AS, melemah sebesar 7,38 persen bila dibandingkan dengan nilai tukar tahun sebelumnya.

Penguatan nilai tukar rupiah yang dimulai sejak semester kedua tahun 2009 terus berlanjut hingga tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi yang tetap positif di kawasan Asia, terutama dimotori oleh Cina dan India, serta meningkatnya pertumbuhan ekspor dan investasi Indonesia selama tahun 2010, mendukung peningkatan fundamental ekonomi domestik, yang pada akhirnya mendorong apresiasi nilai tukar rupiah. Selama tahun 2010, nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil pada kisaran Rp9.087 per dolar AS, atau mengalami apresiasi sebesar 12,69 persen dari tahun sebelumnya. Sentimen positif penguatan rupiah terus berlanjut hingga tahun 2011 yang ditopang oleh stabilnya perbedaan suku bunga dalam negeri dan suku bunga acuan, serta meningkatnya rating Indonesia pada level investment grade. Kondisi tersebut

mendorong meningkatnya arus aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik, serta menjadikan pergerakan rupiah relatif stabil. Meskipun mengalami tekanan pada triwulan keempat, namun secara tahunan, nilai tukar rupiah selama tahun 2011 bergerak relatif stabil pada kisaran Rp8.779 per dolar AS, terapresiasi 3,39 persen dari tahun sebelumnya.

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang dimulai sejak triwulan keempat 2011 terus berlanjut hingga mendorong pelemahan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2012. Belum adanya kejelasan mengenai pemulihan ekonomi di Eropa serta imbas perlambatan ekonomi di Cina, India, dan Jepang, berdampak pada perlambatan pemulihan ekonomi dunia pada tahun 2012. Pelemahan nilai tukar rupiah juga dikhawatirkan akan berlanjut seiring dengan outlook S&P yang mempertahankan rating Indonesia pada level BB+ dengan outlook stable, serta adanya kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal (fiscal sustainability) sebagai akibat penundaan kebijakan di bidang energi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat serta pertumbuhan ekonomi yang melambat di negara emerging market dikhawatirkan mendorong terjadinya flight to quality yang mendorong penurunan arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia sehingga semakin memberikan tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah selama tahun 2012. Sepanjang tahun 2012, rata-rata nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp9.384 per dolar AS, terdepresiasi 6,90 persen dari posisinya pada tahun sebelumnya.

Harga Minyak Mentah Indonesia

Harga Minyak Mentah Indonesia Harga minyak mentah dunia sampai dengan pertengahan tahun 2008 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan harga ini seiring dengan peningkatan permintaan minyak dunia. Memasuki awal tahun 2008, harga minyak mentah Brent menunjukkan peningkatan yang cukup cepat dan mencapai puncaknya pada bulan Juni 2008, yaitu sebesar US\$139,3 per barel.

Namun memasuki semester kedua, harga minyak mentah Brent menunjukkan tren penurunan hingga US\$41,8 per barel pada Desember 2008. Rata-rata harga minyak mentah Brent tahun 2008 mencapai sebesar US\$96,7

per barel atau meningkat 29,5 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2007.

Pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) tidak terlepas dengan tren harga minyak dunia dimana terjadi kenaikan harga yang signifikan sejak awal tahun 2008 hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli 2008, yaitu sebesar US\$135,0 per barel. Setelah mengalami pergerakan harga yang meningkat secara drastis, harga ICP pun mengalami pembalikan harga yang cukup dalam hingga mencapai titik terendah dalam empat tahun terakhir yaitu US\$38,5 per barel pada Desember 2008, sehingga harga rata-rata ICP pada tahun 2008 mencapai sebesar US\$97,0 per barel. Seiring dengan perkembangan harga minyak mentah dunia, harga ICP pada tahun 2009-2012 menunjukkan kecenderungan yang sama. Harga rata-rata ICP pada tahun 2009 mencapai sebesar US\$61,6 per barel, kemudian terus bergerak naik menjadi US\$112,7 per barel pada tahun 2012.

Pada tahun-tahun berikutnya, harga minyak mentah dunia bergerak secara fluktuatif dengan kecenderungan yang meningkat yang disebabkan oleh peningkatan konsumsi minyak mentah. Selama empat tahun terakhir, rata-rata konsumsi minyak dunia mengalami peningkatan, yaitu dari 84,8 juta barel per hari pada tahun 2009 menjadi 89,2 juta barel per hari pada tahun 2012. Peningkatan konsumsi ini terutama terjadi di negara-negara non-OECD. Peningkatan konsumsi tersebut terutama dipicu oleh membaiknya perekonomian negara-negara non-OECD di Asia, Amerika Selatan, dan Rusia. Peningkatan konsumsi ini memicu kenaikan harga minyak mentah dunia hingga akhir 2012. Harga rata-rata minyak mentah Brent yang pada tahun 2009 mencapai US\$62,5 per barel, terus meningkat hingga mencapai US\$111,7 per barel pada tahun 2012. Hal ini disebabkan peningkatan konsumsi minyak di Jepang untuk keperluan pembangkit listrik, serta masih tingginya permintaan produk minyak dari Cina dan India. Pergerakan harga minyak dunia selama periode tersebut juga diimbangi oleh peningkatan pasokan minyak dunia terutama yang berasal dari negara-negara non-OPEC sehingga dapat menahan harga minyak tidak lebih tinggi lagi. Rata-rata pasokan minyak mentah dunia pada tahun 2009 sebesar 84,3 juta barel per hari naik menjadi 89,1 juta barel per hari pada tahun 2012. Selain itu, faktor geopolitik di Timur Tengah dan krisis

utang Eropa sangat mempengaruhi tingginya volatilitas harga minyak dunia.

Lifting Minyak dan Gas Bumi

Realisasi lifting minyak Indonesia sepanjang periode tahun 2008–2010 cenderung meningkat, dengan rata-rata sebesar 930,1 ribu barel per hari (2008), naik menjadi 953,9 ribu barel per hari (2010). Peningkatan lifting ini diraih setelah menempuh beberapa kebijakan di bidang perminyakan, di antaranya kebijakan investasi dan pendanaan yang lebih merata, peningkatan sistem dan mekanisme kemitraan di antara pelaku usaha hulu dalam penyediaan barang operasi migas, insentif perpajakan, penanguhan pembayaran pajak pertambahan nilai, dan pembebasan bea masuk peralatan migas.

Memasuki tahun 2011, realisasi lifting minyak mulai mengalami penurunan menjadi 898,5 ribu barel per hari. Kendala yang dihadapi dalam pengendalian untuk menahan laju penurunan produksi alamiah dari lapangan-lapangan yang telah ada, serta permasalahan pada kegiatan peningkatan produksi minyak baru di antaranya adalah permasalahan perijinan, tumpang tindih dan pinjam pakai lahan dengan instansi terkait, permasalahan pengadaan fasilitas terapung, dan meningkatnya kegiatan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas produksi. Dengan kendalakendala tersebut, Presiden menginstruksikan kepada lembaga pemerintahan pusat dan daerah melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2012 untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan koordinasi dan percepatan penyelesaian permasalahan yang menghambat upaya peningkatan, optimalisasi, dan percepatan produksi minyak bumi nasional.

Sementara itu, berdasarkan data SKK Migas realisasi lifting gas bumi selama periode 2008–2011 cenderung meningkat yaitu dari 1.146 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD) pada tahun 2008 hingga mencapai level tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 1.318 MBOEPD. Akan tetapi memasuki tahun 2012, realisasi lifting gas bumi menurun menjadi 1.240 M Barrel Oil Equivalent Per Day (MBOEPD). Penurunan ini selain disebabkan oleh faktor-faktor panjangnya proses perijinan, masalah lahan, pengadaan barang operasi, serta penurunan performance

reservoir dari lapangan-lapangan produksi, juga terkendala oleh penyerapan penyaluran gas di beberapa konsumen.

Kegiatan terkait kebijakan Ekonomi Makro.

a. Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan

Tujuan dari koordinasi stabilitas sistem keuangan adalah (i) menyiapkan asesmen stabilitas sistem keuangan sebagai bahan Sekretariat FKSSK, (ii) menyiapkan respon kebijakan stabilitas sistem keuangan yang telah dilakukan selama ini dan rencana kebijakan ke depan sebagai bahan Sekretariat FSSK, (iii) menyiapkan prosedur operasional dan administrasi Sekretariat FKSSK, dan (iv) melakukan tugas-tugas lain sehubungan dengan upaya pelaksanaan tugas Sekretariat FKSSK.

b. Kerjasama dan Monitoring Penelitian dengan Perguruan Tinggi

Merupakan suatu kegiatan kerjasama Penelitian yang dilakukan secara Swakelola bekerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Disamping hal tersebut, dilakukan juga kegiatan Regional Economist yang merupakan upaya Kementerian Keuangan (BKF) untuk melakukan sosialisasi kebijakan di berbagai daerah. Kegiatan ini selain melibatkan perguruan tinggi setempat, juga melibatkan analis yang berasal dari masing-masing daerah.

c. Perumusan Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia

Tujuan kegiatan ini adalah menyusun kajian-kajian terkait isu-isu strategis yang menjadi dasar perubahan RUU perubahan UU BI, menyusun Naskah Akademik dan draft RUU perubahan UU BI; melakukan legal drafting terhadap draft RUU perubahan UU BI; dan membahas Naskah Akademik dan draft RUU perubahan UU BI ini ke panitia antar Kementerian/Lembaga.

d. Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi

Tujuan kegiatan Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) adalah sebagai upaya untuk pencapaian inflasi yang rendah dan stabil dalam jangka panjang, dengan tugas pokok melaku-

kan koordinasi dalam rangka penetapan sasaran inflasi tiga tahun ke depan, pemantauan dan evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi termasuk di dalamnya kebijakan-kebijakan yang telah dan akan ditempuh, merekomendasikan pilihan kebijakan yang mendukung kepada pencapaian sasaran-sasaran inflasi kepada Menteri Keuangan, koordinasi dalam rangka penerapan dan pengembangan model-model ekonomi makro untuk digunakan dalam penentuan asumsi dasar penyusunan RAPBN 2014 dan kajian sektor riil terhadap APBN 2014, serta melakukan kajian mikro sektoral dalam rangka mendukung keakurasian proyeksi serta perumusan kebijakan-kebijakan strategis ekonomi makro melalui survei lapangan.

e. Kajian Possible Impact of The Abe-Kuro Monetary Expansion On The Indonesian Economy (Kajian Dampak Perluasan Sistem Keuangan Abe-Kuro Terhadap Perekonomian Indonesia)

Abenomics, yakni kebijakan ekonomi Jepang, yang belakangan ini lebih dikenal dengan nama Abe-Kuro (sebagai singkatan dari nama Perdana Menteri dengan Gubernur Bank Sentral), merupakan gabungan dari kebijakan moneter, fiskal dan paket pertumbuhan ekonomi, yang bertujuan untuk mengatasi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan deflasi yang dialami Jepang. Tulisan singkat ini mencoba membahas dampak dari salah satu kebijakan tersebut, yakni ekspansi moneter, terhadap ekonomi Indonesia, terutama terhadap nilai tukar dan neraca pembayaran. Hipotesa dari tulisan ini adalah, meskipun nilai tukar Rupiah terhadap Yen akan menguat, namun dampaknya akan lebih besar terhadap capital account dibandingkan dengan current account. Singkatnya waktu observasi, yakni kurang dari 2 (dua) tahun, yakni dari tahun 2012 sampai dengan semester 2 (dua) tahun 2013, menyebabkan pendekatan yang digunakan akan lebih banyak bersifat kualitatif dan short-run. Hasil analisa grafis menunjukkan bahwa Rupiah menguat relative terhadap Yen. Selanjutnya, hasil pengujian dampak terhadap neraca pembayaran menunjukkan bahwa dampak kebijakan ekspansi moneter Jepang lebih besar terhadap capital account relative dibandingkan dengan dampaknya terhadap current account. Dampak terhadap capital account tersebut

lebih banyak bersifat deductive karena singkatnya periode observasi. Dengan asumsi ekspansi moneter Amerika Serikat akan berhenti sehingga ekspansi moneter Jepang akan menggantikan ekspansi moneter Amerika Serikat, atau, ekspansi moneter Amerika Serikat terus berlanjut sehingga ekspansi moneter kedua negara saling melengkapi, arus modal jangka pendek akan mengalir ke Indonesia dan Rupiah akan menguat vis-à-vis Yen.

Penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa dampak dari perluasan system keuangan Bank of Japan terhadap perekonomian Indonesia umumnya hanya berlangsung dalam jangka pendek. Dalam hal kurs nilai tukar, rupiah cenderung terapresiasi terhadap mata uang Jepang. Sedangkan pada Neraca Perdagangan, pengamatan jangka pendek selama satu tahun sejak diimplementasikannya kebijakan moneter Jepang membuat sulitnya pemahaman untuk menentukan implikasi dari kebijakan tersebut atas dampak terapresiasinya Rupiah untuk ekspor dan impor antara Indonesia dan Jepang. Dampak terbesar datang dari investasi asing yang memiliki proporsi yang besar atas investasi Jepang di Indonesia yang memiliki relasi dengan Amerika dan China. Dampak yang paling besar terjadi pada inflow portofolio jangka pendek dari Bank of Japan. Hipotesisnya, meski rupiah terapresiasi, dampak lebih besar terjadi pada portofolio jangka pendek daripada neraca perdagangan, dan hal ini terbukti dengan analisis dari observasi jangka pendek, dengan analisis kuantitatif dan grafik. Untuk kemungkinan dampak yang terjadi dalam portofolio jangka pendek, pengurangan didasarkan pada dua asumsi, yaitu capital inflow dari Jepang akan menggantikan tapering off dari Amerika. Dan capital inflow dari Jepang akan melengkapi capital inflow dari Amerika. Disisi lain, nilai tukar rupiah akan lebih menguat.

f. Kajian Leading Indicators Indonesia

Kesalahan mengantisipasi shock/tekanan dapat menyebabkan ketidaktepatan kebijakan fiskal. Kebijakan pemerintah yang diambil pada saat yang kurang tepat dapat menyebabkan tidak tercapainya potensi pertumbuhan ekonomi atau bahkan menyebabkan resesi. Dalam rangka

mengetahui kapan waktu yang tepat mengeluarkan kebijakan fiskal sebagai respon terhadap kondisi perekonomian tentulah sulit dilakukan mengingat kondisi perekonomian ke depan sulit diprediksi. Bahkan release indikator ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat lag.

Akibat dari sulitnya memprediksi perekonomian ke depan, maka diperlukan deteksi dini yang akurat, antisipatif, komprehensif, fleksibel, dan kiwari (up to date) oleh pemerintah (khususnya Badan Kebijakan Fiskal (BKF)) dalam rangka perencanaan dan formulasi kebijakan di bidang ekonomi. Deteksi dini tersebut dapat dilakukan melalui perkiraan (forecast) kondisi perekonomian mendatang melalui indikator-indikator yang berpotensi menentukan naik-turunnya kondisi perekonomian.

Peramalan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan metode, antara lain dengan menggunakan peralatan macroeconomic model dan time series analysis serta business cycle analysis. Saat ini BKF sudah mempunyai dan mengembangkan model ekonometrika untuk memprediksi PDB, tetapi belum mempunyai model yang memadai untuk memprediksi PDB dengan analisis siklus bisnis. Oleh karena itu, dalam kajian ini akan dikembangkan model siklus bisnis. Dengan analisis siklus bisnis, akan diperoleh indeks leading, coincidence, dan lagging. Leading index bergerak mendahului coincident maupun reference series. Coincident index bergerak seiring dengan reference series. Lagging index bergerak mengikuti (lag) coincident maupun reference series. Dan reference series adalah variabel yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian secara agregat seperti PDB, indeks produksi industri, real money supply, dan lain-lain.

Dengan menggunakan leading indicators dapat diperoleh informasi mengenai arah perekonomian kedepan, apakah menuju pada masa kontraksi atau masa ekspansi, serta kapan terjadinya pembalikan arah, dan juga sebagai referensi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dan kapan kebijakan tersebut sebaiknya diluncurkan.

Dengan analisis siklus bisnis, penelitian ini bertujuan: (i) mengidentifikasi informasi mengenai kondisi perekonomian yang cepat dan akurat yang diperlukan sebagai landasan respon kebijakan yang dibutuhkan, serta identifikasi data APBN yang sesuai untuk leading indicator pemantauan dini, (ii) merumuskan dan menyusun komposit indeks dari variabel-variabel ekonomi terpilih sebagai leading indicator untuk memberi gambaran dini mengenai posisi dan perkembangan perekonomian/pertumbuhan ekonomi per bulan, (iii) memberikan arah/gambaran kondisi PDB dalam beberapa waktu ke depan, apakah berada pada masa kontraksi atau masa ekspansi, serta kapan terjadinya pembalikan arah, serta mempraktikkan PDB pada kuartal berjalan (jangka pendek).

Dari hasil kajian mengenai leading indicators yang telah dilakukan oleh peneliti BKF dan PT Makara Mas dapat diketahui berbagai kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dengan menggunakan metode OECD yang dimodifikasi (modified OECD) diperoleh delapan komponen series yang menyusun composite leading indicators (CLI) Indonesia. Ada delapan komponen series dari CLI yaitu: (1) konsumsi semen (cement), (2) ekspor total (exp_total), (3) USD Index (Indeks USD terhadap mata uang utama), (4) indeks kepercayaan konsumen Indonesia (conconf), (5) Dow Jones Index (DJI), (6) Indeks Produksi US (IP_US), (7) Purchasing Maneger Index US, dan (8) Spread suku bunga investasi dengan suku bunga deposito 3 bulan (SPREAD).
- b. Tak satu pun variable fiskal yang masuk menjadi leading indicators, karena pola penyerapan anggaran yang terkumpul di akhir tahun sehingga secara teknis faktor ini sangat mengganggu dalam mencari siklus. Hal ini wajar karena variable fiscal didominasi oleh factor musiman, bukan siklus.
- c. Dengan menggunakan deteksi turning point dan kronologi siklus yang dibangun dalam penelitian ini. Pada bulan Oktober 2013 adalah titik lembah (titik balik) dari penurunan CLI yang sudah berlangsung sejak September 2012. Karena jarak lembah siklus CLI ke lembah siklus GDP_TOT secara rata-rata adalah 3 bulan sampai dengan 10 bulan ke depan, maka ini berarti 3 sampai dengan 10

bulan setelah titik lembah CLI terjadi, siklus GDP_TOT akan mencapai lembah dan terjadi titik balik perekonomian menuju potensi pertumbuhan jangka panjangnya. Jadi diperkirakan awal tahun 2014 atau paling lambat pertengahan tahun 2014, perekonomian Indonesia akan bergerak meningkat menuju potensi pertumbuhan jangka panjangnya.

- d. Hasil peramalan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggunakan model VAR (yang menelaah hubungan antara LEI_8_NDX (siklus Composite Leading indicators) dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan 5.61% tahun 2013, kemudian tahun depan, bisa tumbuh sebesar 5.74% dengan rentang antara 5.42% hingga 5.93%.

g. Kajian Revitalisasi Investasi Pengembangan Energi Panas Bumi di Indonesia

Kajian ini bertujuan memetakan kebutuhan energi nasional terutama energi geothermal serta menganalisis percepatan investasi dan sumber-sumber investasi yang optimal, peluang dan tantangan investasi pengembangan energi geothermal di Indonesia. Demikian juga strategi dan langkah-langkah kebijakan percepatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan investasi pengembangan dalam rangka penyediaan energi listrik panas bumi dalam rangka mencukupi konsumsi energi listrik nasional.

Kebijakan energi nasional tentu bertujuan untuk memenuhi pasokan energi dalam negeri yang dapat mencapai target dari masing-masing jenis energi terhadap konsumsi energi listrik nasional. Diantaranya diharapkan bahan bakar nabati (biofuel) naik menjadi 5 persen di tahun 2025 demikian juga panas bumi (geothermal) juga menjadi 5 persen dari sekarang ini yang baru dieksploitasi sebesar 1,32 persen, padahal potensi geothermal Indonesia adalah sekitar 26 persen potensi geothermal dunia. Ini setara dengan 27.710 Mega Watt (MW) atau setara dengan 19 miliar barrel minyak bumi. Kapasitas sekarang ini mencapai 1.189 MW dari target pengembangan energi panas bumi pada tahun 2025 yang ditetapkan 9.500 MW. Permasalahan ini tentu saja harus segera dibenahi

dari beberapa hambatan dalam rangka percepatan investasi di bidang energi terutama energi yang berasal dari panas bumi. Penyelesaiannya perlu didukung dengan kebijakan fiskal, terutama dari berbagai insentif fiskal, serta peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Demikian juga kewenangan daerah agar dapat mengembangkan energi listrik diwilayahnya. Walaupun sampai saat ini, belum ada tanda-tanda peningkatan yang signifikan. Di sisi lain pemerintah telah mengeluarkan beberapa insentif fiskal guna pengembangan tenaga panas bumi (geothermal) antara lain pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk kegiatan perusahaan panas bumi, juga diberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah atas impor barang untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu migas dan panas bumi. Pembebasan bea masuk diberikan juga atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum. Sampai saat ini hasil pengembangan energi geothermal belum maksimal karena beberapa kendala yang ditemui seperti biaya investasi untuk eksplorasi dan eksploitasi yang relatif besar serta risiko investasi yang cukup besar pula. Demikian juga pungutan-pungutan yang masih tinggi yang diperkirakan sekitar 45 persen dari total biaya pengembangan, harga hasil panas bumipun belum kompetitif dengan harga BBM bersubsidi. Kendala lainnya tentu saja terkait return investasi ini cukup lama, bisa mencapai 5 sampai 10 tahun sehingga tidak menarik bagi investor panas bumi.

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Potensi geothermal di Indonesia untuk dikembangkan sangat besar. Namun para investor belum banyak tertarik karena ada beberapa masalah utama. Tiga permasalahan utama adalah investasi pengembangan geothermal yang sangat besar, risiko pengembangan dan masalah harga jual listrik panas bumi.
2. Permasalahan harga jual listrik panas bumi yang sekarang sebesar 9,7 sen dollar per 1 kWh ternyata belum menarik investor terbukti perkembangan

- investasi panas bumi masih relatif kecil.
3. Bila harga jual listrik yang dihasilkan para pengembang menarik maka para investor akan banyak berinvestasi dalam proyek geothermal ini. Disisi lain perbankan dalam negeri juga akan tertarik mendanai proyek geothermal karena akan menguntungkan.
 4. Banyak insentif fiskal yang diberikan guna menarik investasi pengembangan panas bumi, namun di sisi lain masih banyak pungutan yang banyak dikeluarkan. Hal ini juga sebagai faktor yang mempengaruhi minat investasi dalam proyek geothermal.
 5. Kendala lainnya adalah Return of investment pengembangan panas bumi ini cukup lama sekitar 3 sampai dengan 5 tahun. Padahal dalam jangka panjang proyek ini sebenarnya akan menguntungkan.

Atas hasil kajian Revitalisasi Investasi Pengembangan Energi Panas Bumi di Indonesia, dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Selama ini yang dikeluhkan investor untuk menangani proyek geothermal adalah harga jual listrik panas bumi tersebut tidak menarik, sehingga minat para investor sangat kecil. Oleh karena itu hendaknya pemerintah mengevaluasi kembali harga jual listrik panas bumi ke PLN yang lebih menarik bagi investor. Selama ini harga jual sebesar US\$0,97 per kWh dikeluarkan investor masih rendah.
2. Disisi lain agar menarik investor dapat menangani proyek geothermal ini pemerintah juga dapat memberikan kompensasi selain menaikkan harga jual listrik panas bumi seperti tax holiday selama 3 sampai 5 tahun atau selama proyek geothermal belum mencapai keuntungan. Selain itu untuk menutup risiko kegagalan dapat dilakukan mekanisme penjaminan.
3. Didorong agar perbankan dalam negeri terutama perbankan BUMN agar dapat mendanai proyek-proyek geothermal, karena selama ini beberapa proyek geothermal didanai pendanaan asing yang mempunyai risiko gagal bayar karena pengaruh kurs. Disisi lain dapat dijajagi agar Pemerintah daerah yang mempunyai sumber-sumber energi panas bumi dapat membentuk/mendirikan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat mengembangkan dan mengelola energi panas bumi, karena dalam jangka panjang pengembangan in akan menguntungkan.

Kebijakan fiskal membebaskan pajak impor untuk barang operasi guna keperluan perusahaan panas bumi, perlu dipertimbangkan untuk diberikan kembali. Hal ini untuk mendorong proyek axisting contract agar menambah kapasitas produksinya sesuai dengan komitmen kontrak. Dengan incentive ini diharapkan investasi akan meningkat dan target pengembangan panas bumi akan tercapai. Dengan demikian pada akhirnya akan membantu untuk menunda net oil importer dan mendukung diversifikasi energi primer.

Diharapkan pengembangan investasi geothermal ini dilakukan dari sumber-sumber panas bumi yang kecil terlebih dahulu guna menghindari besarnya risiko kegagalan, disamping itu mengurangi beban investasi yang cukup besar termasuk memberikan pengalaman pengembangan proyek geothermal bagi investor pemula.

h. Kajian Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN

Kajian Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean ini memiliki dua tujuan, yaitu menganalisis strategi dan kemampuan UMKM dalam meningkatkan daya saing industri dalam rangka menghadapi perdagangan bebas Asean melalui penyaluran kredit dan penyediaan akses informasi pemasaran, dan menganalisis strategi dan kemampuan UMKM dalam meningkatkan sumber daya manusianya menghadapi pasar bebas Asean melalui peningkatan capacity building dan pengembangan information technology.

Pemberdayaan UMKM sangat penting untuk mengembangkan perekonomian Indonesia. Sayangnya, dari 240 juta orang penduduk Indonesia (menurut sensus 2010), ternyata hanya 0,24 persen adalah para wirausaha (interpreneur), atau hanya sekitar 400.000 orang yang berkecimpung dalam dunia usaha atau UMKM. Padahal agar perekonomian

Indonesia dapat berkembang lebih cepat diperlukan lebih dari 2 persen dari jumlah penduduk sebagai wirausaha atau berkecimpung dalam UMKM. Singapura, sebuah negara kecil namun mempunyai 7 persen dari jumlah penduduknya merupakan wirausaha dan mempunyai banyak UMKM. Sedangkan Malaysia, lebih dari 2 persen jumlah penduduknya merupakan para interpreneur yang berkecimpung dalam berbagai usaha mikro.

Tidak dipungkiri bahwa UMKM juga mempunyai kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja serta penerimaan negara terutama pajak. Perkembangan penerimaan pajak dari tahun 2005 sampai dengan 2012 juga terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata lebih dari 12 persen. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2012 dengan target penerimaan pajak sebesar 1016,2 triliun rupiah. Penerimaan 18 pajak ini sebagian besar adalah dari Usaha Besar sedangkan potensi dari UMKM perlu digali secara optimal.

Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit. Saat ini skim kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, tanpa agunan. Selain itu penguatan lembaga pendamping UMKM dapat dilakukan melalui kemudahan akses serta peningkatan capacity building dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM.
2. Strategi untuk mengantisipasi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif khususnya di kawasan Asean adalah penguasaan pasar, yang merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Agar dapat menguasai pasar, maka UMKM perlu mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, baik informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh UMKM. Aplikasi teknologi informasi pada usaha mikro, kecil dan menengah akan

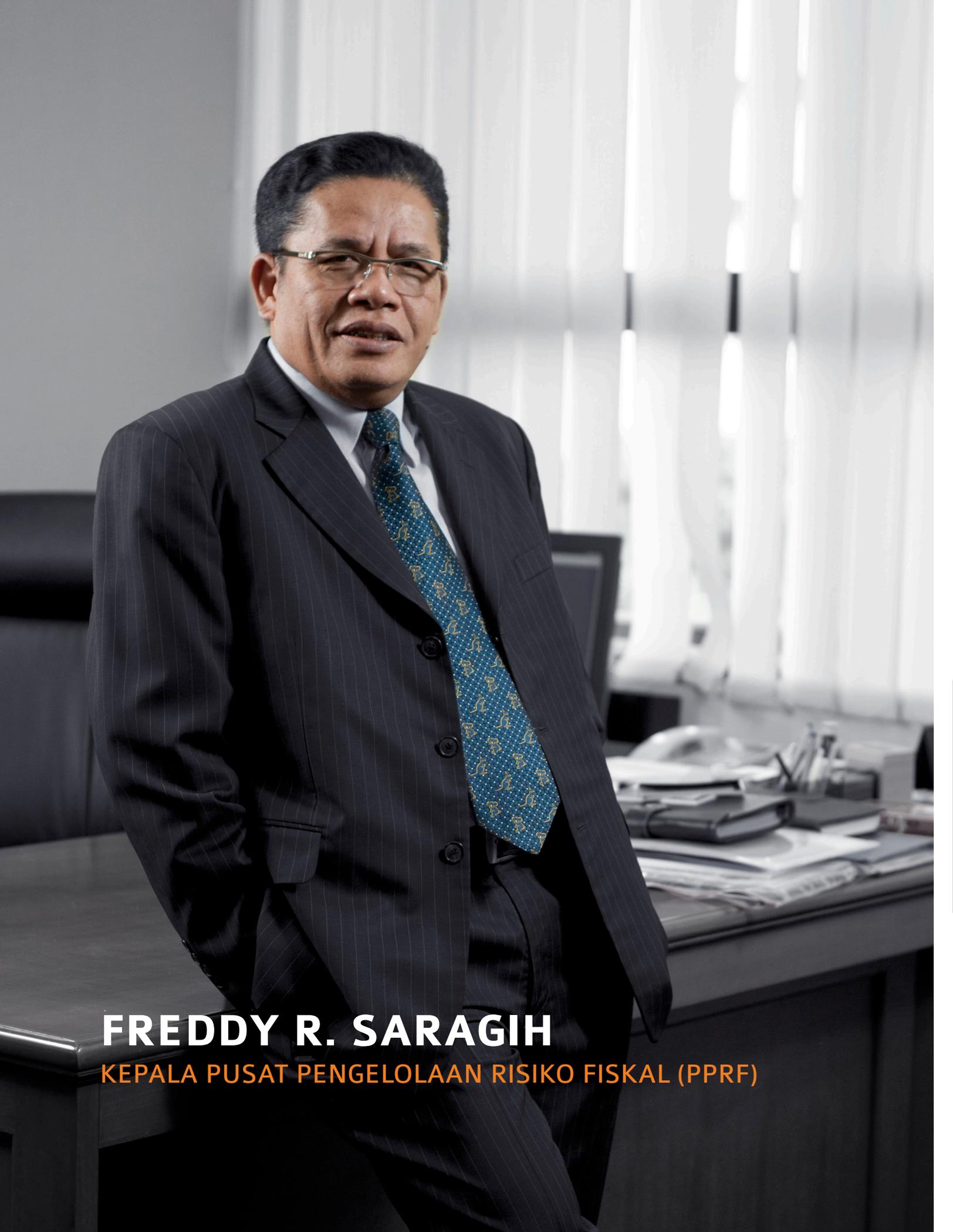
mempermudah UMKM dalam memperluas pasar baik di dalam negeri maupun pasar luar negeri dengan efisien. Pembentukan Pusat Pengembangan UMKM berbasis IT dianggap mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di era teknologi informasi saat ini.

Dari kesimpulan diatas, dapat disampaikan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya saing diperlukan sinergi antara peran pemerintah selaku pembuat kebijakan serta lembaga pendamping, khususnya lembaga keuangan mikro untuk mempermudah akses perkreditan dan perluasan jaringan informasi pemasaran. Selain itu, budaya mencintai produksi dalam negeri juga perlu dipupuk agar UMKM berkembang dan perekonomian nasional menjadi lebih kuat.
2. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah perlu aktif untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk terus melakukan pembinaan dan pelatihan melalui peningkatan capacity building dan penerapan aplikasi information technology (IT), termasuk mengaktifkan kembali web Pemda-Pemda saat ini yang tidak optimal sebagai basis komunikasi UMKM di daerah.







FREDDY R. SARAGIH

KEPALA PUSAT PENGELOLAAN RISIKO FISKAL (PPRF)

“Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi pengelolaan risiko ekonomi, keuangan, sosial, BUMN, dan dukungan pemerintah.”

KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO FISKAL



Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa posisi fiskal pemerintah selalu dibayangi potensi terjadinya risiko fiskal yang mengancam kesinambungan anggaran akibat adanya kewajiban kontinjensi dan berbagai macam risiko fiskal yang tidak diantisipasi sebelumnya. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada pertengahan 1997 merupakan contoh yang menunjukkan terjadinya risiko fiskal yang berpotensi mengganggu kesinambungan anggaran. Jaminan pemerintah baik eksplisit maupun implisit, misalnya kebijakan rekapitalisasi perbankan, dalam waktu singkat berubah dari contingent liabilities menjadi actual liabilities dan menimbulkan beban fiskal yang sangat besar.

Perubahan peran negara/pemerintah dari sebelumnya hanya sebagai penyedia pembiayaan (financier) menjadi juga sebagai penjamin (guarantor) dalam penyediaan jasa-jasa dan atau proyek-proyek pembangunan, baik secara implisit maupun eksplisit telah meningkatkan exposure risiko fiskal. Seiring dengan tuntutan perbaikan ekonomi Indonesia pascakrisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998, Pemerintah melakukan program percepatan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur. Keterbatasan kemampuan APBN menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program ini, mengingat program percepatan pembangunan membutuhkan modal yang sangat besar.

Beberapa solusi dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain dengan memberikan penugasan kepada BUMN untuk melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur dan menjalin kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (public private partnership/PPP) dalam penyediaan infrastruktur. Baik dalam skema penugasan kepada BUMN maupun PPP, pemerintah dapat memberikan dukungan dan/atau jaminan pemerintah. Untuk menjembatani hubungan antara pemerintah dan badan usaha serta kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara, pada tahun 2005 melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 518/KMK.01/2005 dibentuklah Komite Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur (KPRPI).

KPRPI mempunyai tugas (1) melakukan pengkajian terhadap kelayakan permintaan dukungan Pemerintah atas pelaksanaan kerja sama penyediaan infrastruktur, (2) menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian kerja sama dalam penyediaan infrastruktur, (3) memonitor secara aktif pelaksanaan kerja sama penyediaan infrastruktur yang membutuhkan dukungan Pemerintah, (4) mengevaluasi secara berkesinambungan biaya dan pengeluaran operasi yang wajar, dan tingkat keuntungan yang wajar terhadap suatu proyek penyediaan infrastruktur dalam kurun waktu tertentu, (5) melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait baik di dalam maupun di luar lingkungan Departemen Keuangan sehubungan dengan kegiatan penyediaan infrastruktur, termasuk apabila terjadi kegagalan pemenuhan perjanjian kerja sama, (6) memberikan rekomendasi kebijakan pengelolaan risiko atas penyediaan infrastruktur kepada Menteri Keuangan, (7) mempersiapkan pembentukan unit kerja di bawah Menteri Keuangan yang akan melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan risiko atas penyediaan infrastruktur dan (8) melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pada perkembangannya, KPRPI mengalami penyempurnaan dengan dibentuknya unit pengelolaan risiko fiskal di bawah Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan yang disebut dengan Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF). PPRF berdiri berdasarkan KMK Nomor 466/KMK.01/2006 yang kemudian diganti terakhir kali dengan PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

PPRF mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi pengelolaan risiko ekonomi, keuangan, sosial, BUMN, dan dukungan pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, PPRF menjalankan fungsi (1) perumusan rekomendasi kebijakan pengelolaan risiko fiskal dan kelayakan pemberian dukungan pemerintah, serta penyiapan bahan negosiasi dan perjanjian kerja sama; (2) analisis dan evaluasi pengelolaan risiko ekonomi, keuangan dan sosial, risiko BUMN dan risiko dukungan pemerintah; (3) analisis dan evaluasi pengelolaan risiko fiskal terhadap pelaksanaan Public Service Obligation, penyertaan modal negara, restrukturisasi dan privatisasi BUMN; (4) analisis dan evaluasi terhadap kelayakan permintaan dukungan pemerintah atas pelaksanaan kerja sama penyediaan infrastruktur; (5) penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang pengelolaan risiko fiskal; (6) penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang pengelolaan risiko fiskal; dan (7) pelaksanaan tata kelola Pusat.

Sejalan dengan sasaran strategis Kementerian Keuangan, kebijakan pengelolaan risiko fiskal pada tahun 2013 diarahkan untuk terwujudnya kebijakan fiskal yang sustainable dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Untuk mencapai sasaran tersebut, PPRF melaksanakan berbagai kajian dan kegiatan terkait dengan pengelolaan risiko fiskal.

Kajian dan Kegiatan

Kajian dan kegiatan yang dilaksanakan Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal dalam rangka pengelolaan risiko fiskal pada tahun 2013 antara lain:

- 1. Analisis dan Rekomendasi Mitigasi Risiko Ekonomi, Keuangan, dan Sosial**
 - a. Analisis Sensitivitas Defisit RAPBN 2014 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro.**

Dinamika ekonomi baik domestik maupun eksternal berdampak pada APBN melalui

indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi utama di dalam penyusunan APBN. Indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP), lifting minyak dan lifting gas. Indikator-indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran dalam APBN. Apabila realisasi variabel-variabel tersebut berbeda dengan asumsinya, maka besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN juga akan berubah.

Pengaruh dinamika ekonomi makro terhadap APBN dapat digambarkan dalam suatu analisis sensitivitas. Dalam analisis ini, perubahan ekonomi makro akan mempengaruhi perubahan APBN secara langsung, yaitu pada pos pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran yang pada akhirnya bermuara pada perubahan defisit APBN. PPRF melaksanakan analisis sensitivitas defisit RAPBN 2014 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang dilaporkan dalam Subbab Risiko Fiskal dalam Nota Keuangan dan APBN setiap tahun.

b. Penyusunan Subbab Risiko Fiskal dalam Nota Keuangan dan APBN Tahun 2014

Risiko fiskal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap APBN. Pengungkapan risiko fiskal sangat perlu untuk empat tujuan strategis, yaitu: (1) meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengelolaan kebijakan fiskal; (2) meningkatkan keterbukaan fiskal (fiscal transparency); (3) meningkatkan tanggung jawab fiskal (fiscal accountability); serta (4) menciptakan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).

Pengungkapan risiko fiskal dalam Nota Keuangan telah dimulai sejak tahun 2008 dan terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Pada APBN tahun

2014, risiko fiskal dikelompokkan dalam empat kategori yaitu: (1) risiko asumsi dasar ekonomi makro; (2) risiko utang Pemerintah Pusat; (3) kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat; dan (4) risiko pengeluaran Negara yang dimandatkan atau diwajibkan (mandatory spending).

c. Monitoring penerapan indikator fiskal pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pada tahun 2012, PPRF – BKF telah mengusulkan indikator fiskal sebagai bagian dari indikator kinerja LPEI di dalam RKAT LPEI Tahun 2013.

d. Kajian Kesinambungan APBN atas Pelaksanaan Jaminan Sosial Untuk Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Undang-Undang BPJS mengamankan untuk membentuk dua badan penyelenggara jaminan sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan (JK) bagi seluruh warga negara Indonesia, akan mulai beroperasi Januari 2014 yang merupakan transformasi dari PT Askes (Persero). Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan, yang merupakan transformasi dari PT Jamsostek mulai berubah bentuk 1 Januari 2014 dan mulai beroperasi Juli 2015 menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKem), jaminan pensiun (JP), dan jaminan hari tua (JHT) bagi pekerja baik sektor formal maupun sektor informal.

Pemerintah mempunyai peranan besar dalam menjamin keberlangsungan program jaminan sosial nasional ini, oleh karena itu diperlukan strategi dan perencanaan yang matang untuk dituangkan dalam peraturan pelaksana Undang-Undang BPJS ini. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses penyusunan rancangan peraturan-peraturan pelaksanaan dimaksud. Badan Kebijakan Fiskal sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian Keuangan tergabung dalam kelompok kerja nasional BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mempunyai andil terkait kajian risiko fiskal atas program Jaminan Kesehatan dan program Ketenagakerjaan.

Kajian tahun ini merupakan lanjutan kajian yang telah dilakukan sejak tahun 2012. Hal yang membedakan dengan kajian sebelumnya selain bersifat melengkapi, kajian tahun ini menitikberatkan pada supporting proses penyusunan peraturan pelaksana UU SJSN dan UU BPJS yang diharapkan dapat diselesaikan. Beberapa rancangan peraturan yang diharapkan selesai pada tahun 2013 meliputi, Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden tentang Besar Modal Awal BPJS Kesehatan, Peraturan Presiden tentang Pelayanan Kesehatan tertentu berkaitan kegiatan Operasional TNI dan POLRI, Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan dan perubahannya (menambahkan aturan mengenai besaran iuran jaminan kesehatan), Peraturan Presiden tentang Gaji/upah dan Manfaat Tambahan lainnya bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS.

Output dari kajian ini adalah (1) simulasi dan model perhitungan beban fiskal atas penyelenggaraan program jaminan sosial, (2) Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan (3) Rekomendasi pengelolaan risiko fiskal yang berasal dari penyelenggaraan jaminan sosial.

e. Kajian Mitigasi Risiko Bencana Alam melalui Asuransi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Transaksi Asuransi Bencana Alam

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah meletakkan tanggung jawab pada pundak Pemerintah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan tahap prabencana, tanggap darurat bencana, dan pascabencana.

Sejak tahun 2005 di APBN telah dialokasikan dana penanggulangan bencana dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA. BUN). Meskipun telah dicadangkan, dana penanggulangan bencana tersebut masih terbatas untuk menanggung total kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh kejadian bencana. Oleh karena itu, perlu dikaji skema alternatif untuk pembiayaan risiko bencana. Dalam kajian ini dikaji metode asuransi bencana alam. Output kajian ini adalah (1) skema pembiayaan akibat bencana alam melalui Asuransi Bencana Alam, dan (2) draf awal RPKM tentang Transaksi Asuransi Bencana Alam.

2. Analisis dan Rekomendasi Mitigasi Risiko Badan Usaha Milik Negara

a. Macro-micro Stress Test BUMN

Kegiatan ini dilakukan dengan mensimulasikan perubahan kondisi ekonomi risiko makro maupun spesifik/mikro terhadap tertentu dari 22 sampel BUMN. Kegiatan ini bertujuan untuk menangkap risiko-risiko ekstrim atas volatilitas faktor makro dan mikro pada BUMN yang berdampak pada Keuangan Negara. Hasil macro-micro stress test BUMN dilaporkan dalam Subbab Risiko Fiskal dalam Nota Keuangan dan APBN setiap tahun.

b. Monitoring Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Risiko fiskal atas program KUR muncul apabila anggaran yang dialokasikan APBN ternyata tidak mencukupi kebutuhan yang ditetapkan dalam program KUR yang mengakibatkan perlunya penambahan alokasi dana. Risiko fiskal dimaksud meliputi meningkatnya kebutuhan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan tidak mencukupinya dana PMN untuk membantu peningkatan kapasitas perusahaan penjamin sebagaimana yang telah ditargetkan. Kegiatan monitoring dilaksanakan untuk meminimalisir kemungkinan timbulnya risiko baik di sisi perbankan, perusahaan penjamin, maupun pemerintah.. Selama tahun 2013 telah disampaikan Laporan Monitoring dan Tindak Lanjut Atas Perkembangan Penyaluran KUR sekaligus rekomendasi terkait kerangka analisis mitigasi risiko Perusahaan Penjamin KUR (Askrindo dan

Jamkrindo) dalam pelaksanaan penjaminan penyaluran KUR kepada Menteri Keuangan. Selain itu telah dilakukan penyusunan kajian Imbal Jasa Penjaminan KUR bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq. Direktorat Sistem Manajemen Investasi yang merupakan penugasan dari Kemenko Perekonomian selaku Komite Kebijakan.

c. Penyusunan Service Level Agreement antara Pemerintah dengan PT PLN (Persero)

Konsep Service Level Agreement (SLA) antara Pemerintah dengan PT PLN (Persero) telah dikaji sejak tahun 2012. Implementasi SLA sendiri secara formal telah dilaksanakan dengan adanya penandatanganan Kesepakatan Bersama SLA antara Pemerintah (13 Kementerian dan Lembaga Negara terkait serta UKP-PPP) dan PLN di hadapan Wakil Presiden RI pada tanggal 22 Maret 2013.

d. Kajian Efektifitas Penugasan Public Service Obligation (PSO) kepada BUMN Sektor Energi: Implementasi Performance-Based Regulatory (PBR) pada PT PLN (Persero)

Penyusunan Performance Based Regulatory (PBR) dalam perhitungan subsidi listrik dilatarbelakangi oleh adanya paradox efficiency dalam skema subsidi saat ini, skema cost+margin. Perhitungan subsidi tersebut tidak memberikan insentif bagi PT PLN (Persero) (PLN) untuk meningkatkan efisiensi perusahaan karena setiap kenaikan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik sebesar Rp100/kwh produksi, maka justru akan memberikan kenaikan EBITDA kepada PLN sebesar ±Rp 2,5triliun (McKinsey, 2012). Selain itu, terdapat permintaan dari Komisi VII DPR RI kepada Pemerintah untuk mengembangkan skema perhitungan subsidi yang lebih baik dan memberikan insentif kepada PLN untuk meningkatkan efisiensi serta mempercepat kemandirian PLN.

Menyikapi permasalahan tersebut, pada tahun 2013, Pemerintah, dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai leader, melakukan studi terkait implementasi PBR melalui upaya penentuan Allowed Revenue (AR) bagi PLN yang direncanakan

menjadi dasar perhitungan subsidi listrik 2015. Implementasi Performance Based Regulatory (PBR) pada PLN merupakan langkah berkelanjutan dari upaya Pemerintah untuk menerapkan Service Level Agreement (SLA) secara menyeluruh pada stakeholders industri ketenagalistrikan nasional. Salah satu rencana aksi dalam SLA adalah upaya perbaikan skema subsidi saat ini melalui penerapan PBR yang akan menggantikan skema cost+margin. Implementasi SLA sendiri secara formal telah dilaksanakan dengan adanya penandatanganan Kesepakatan Bersama SLA antara Pemerintah (13 Kementerian dan Lembaga Negara terkait serta UKP-PPP) dan PLN di hadapan Bapak Wakil Presiden pada tanggal 22 Maret 2013.

Tujuan dari penerapan PBR pada PLN utamanya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perhitungan BPP listrik yang akan menjadi dasar jumlah subsidi listrik yang akan dianggarkan pada APBN. PBR juga diharapkan mampu memberikan insentif bagi PLN untuk melakukan efisiensi dalam operasional perusahaan. Selain itu, dengan adanya PBR diharapkan akan ada alokasi risiko yang lebih jelas antara Pemerintah, dhi. Kemenkeu, Kemen ESDM, Kemen BUMN, dan PLN.

Dalam melaksanakan kajian implementasi PBR di tahun 2013 ini, BKF dibantu oleh pihak World Bank untuk melakukan kajian efektifitas penugasan Public Service Obligation (PSO) kepada BUMN sektor energi, dengan penekanan implementasi PBR pada PLN.

Amanat penerapan PBR telah tercantum dalam PPKF Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2014, Nota Keuangan Bab 6.4 tentang Risiko Fiskal kepada Wakil Presiden RI, sementara konsep penerapan PBR dan draft PMK PBR telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan melalui ND-707/KF/2013 tanggal 31 Desember 2013 mengenai Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Tata Cara Penghitungan, Penyediaan Anggaran, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik.

e. Monitoring Risiko Fiskal atas Proyek Fast Track Tahap I dan Tahap II pada PT. PLN (Persero) serta Dukungan Pemerintah Lainnya

Program proyek percepatan pembangkit 10.000 MW yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 yang memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk mengatasi permasalahan kekurangan pasokan listrik nasional melalui percepatan pembangunan pembangkit yang dijadwalkan selesai semuanya pada Tahun 2011. Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 kemudian direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2009 untuk mengatasi krisis energi di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat besarnya biaya investasi yang diperlukan dan kapasitas pembiayaan PLN, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.01/2008 memberikan jaminan penuh atas pengembalian pinjaman PLN yang terkait pendanaan proyek percepatan 10.000 MW. Di satu sisi, penjaminan tersebut mempermudah PLN dalam mencari pendanaan. Akan tetapi di sisi lain, menimbulkan risiko fiskal bagi Pemerintah dalam hal terjadi kegagalan PLN dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Dalam perkembangannya, proyek percepatan 10.000 MW tidak berjalan sesuai dengan rencana. Tahun 2013 yang ditargetkan 98% pembangunan pembangkit selesai (9802 MW) tidak tercapai, total pembangkit yang selesai hanya sebesar 63% (6267 MW). Untuk itu, kecil kemungkinan penyelesaian pembangunan pembangkit dapat diselesaikan di tahun 2014 sesuai mandat Perpres Nomor 71 Tahun 2006. Dengan perkembangan tersebut, risiko penjaminan menjadi semakin besar. Dalam rangka mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan listrik nasional dan meminimalkan risiko fiskal, maka perlu dilakukan monitoring dan analisis pelaksanaan proyek percepatan 10.000 MW oleh Kementerian Keuangan.

Selain proyek FTP I & II tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa penjaminan pada proyek pemasangan 10 juta sambungan air bersih dengan berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2009 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mengelola risiko penjaminan perlu dilakukan pemantauan risiko gagal bayar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) selaku pelaksana penugasan Pemerintah selanjutnya terkait mitigasi risiko diperlukan monitoring dan analisis pelaksanaan proyek pemasangan 10 juta sambungan air bersih oleh Kementerian Keuangan. Monitoring diperlukan juga sebagai langkah identifikasi permasalahan proyek PDAM dengan membangun model yang menjabarkan peta risiko proyek PDAM

Selama tahun 2013 telah disampaikan surat rekomendasi atas 8 kali kunjungan kepada PT PLN utk memitigasi risiko kepada PT PLN dan satu berkas laporan monitoring telah disampaikan kepada Menteri keuangan melalui ND bersama antara BKF dan DJPU nomor ND-542/KF/2013 dan ND-148/PU/2013 tanggal 27 September 2013. Program proyek percepatan pembangkit 10.000 MW yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 yang memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk mengatasi permasalahan kekurangan pasokan listrik nasional melalui percepatan pembangunan pembangkit yang dijadwalkan selesai semuanya pada Tahun 2011. Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 kemudian direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2009 untuk mengatasi krisis energi di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Timur.

f. Kajian Pinjaman Langsung (Direct Lending) Badan Usaha Milik Negara dengan Jaminan Pemerintah

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan sumber pembiayaan murah kepada BUMN dalam rangka mendukung

pembangunan infrastruktur. Sumber pembiayaan murah berasal dari lembaga bilateral/multilateral langsung kepada BUMN dengan jaminan Pemerintah. Adanya jaminan Pemerintah menimbulkan exposure risiko fiskal terhadap APBN berupa kewajiban kontinjensi.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah (1) penyusunan regulasi atas skema direct lending beserta proses penjaminan Pemerintah dan (2) perhitungan alokasi kewajiban kontinjensi atas jaminan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Arah dari kajian yang akan dilaksanakan adalah untuk memastikan agar skema direct lending dengan jaminan Pemerintah:

- benar-benar dapat digunakan oleh Pemerintah dalam upaya memperoleh akses pembiayaan yang murah dan cepat untuk pembangunan infrastruktur melalui BUMN.
- dapat menjadi solusi alternatif atas kelemahan-kelemahan pada skema on lending, yaitu proses yang sangat lama dan kinerja disbursement pinjaman yang kurang baik. Dengan skema direct lending, diharapkan dapat mengatasi bottleneck yang ada dan dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur.
- dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dengan nilai investasi yang besar. Untuk proyek infrastruktur dengan nilai investasi kecil menengah kiranya dapat mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan tanpa jaminan Pemerintah.

Selama tahun 2013 telah disampaikan satu rekomendasi terkait kerangka pikir pelaksanaan Direct Lending berupa Nota Dinas bersama antara BKF, DJPB, dan DJPU melalui ND no 656/KF/2013, ND-196/PU/2013 dan ND-3032/PB/2013 tanggal 4 Desember 2013.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan sumber pembiayaan murah kepada BUMN dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur. Sumber pembiayaan murah

berasal dari lembaga bilateral/multilateral langsung kepada BUMN dengan jaminan Pemerintah. Adanya jaminan Pemerintah menimbulkan exposure risiko fiskal terhadap APBN berupa kewajiban kontinjensi.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah (1) penyusunan regulasi atas skema direct lending beserta proses penjaminan Pemerintah dan (2) perhitungan alokasi kewajiban kontinjensi atas jaminan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

g. Analisis dan Rekomendasi Persetujuan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN)

Penggunaan PKLN sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional perlu dikelola dengan kebijaksanaan tidak menimbulkan tekanan terhadap neraca pembayaran internasional Indonesia, tidak mengakibatkan kesimpangsiuran dalam memasuki pasar modal internasional, dan agar supaya beban pembayaran kembali pinjaman luar negeri tetap dalam batas kemampuan ekonomi Indonesia.

Pada tahun 2013, PPRF telah merumuskan rekomendasi persetujuan PKLN antara lain PKLN PT Pelabuhan Indonesia III, PT PLN (Persero), PT Lestari-Banten Energi, dan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (PT Telkom).

h. Monitoring dan Analisis Kinerja Keuangan dan Risiko Utang Pertamina

Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian mitigasi risiko fiskal atas BUMN dan merujuk pada penugasan Menteri Keuangan kepada Badan Kebijakan Fiska c.q Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, dan dilakukan secara regular tiap tahun.

Tahun 2013 merupakan awal dilaksanakan kegiatan monitoring ini, dan telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas No.604/KF/2013.

i. Kajian Pengambilalihan PT Inalum terkait Annual Fee

Kajian disusun sebagai kelanjutan atas kajian sebelumnya melalui ND-645/KF/2012 tanggal 3

Desember 2012 terkait kebijakan pengembangan PT Inalum pasca pengambilalihan oleh Pemerintah. Kajian dilakukan dalam rangkaantisipasi dampak sosial atas pengambilalihan PT Inalum oleh Pemerintah yaitu konsekuensi atas penghapusan annual fee yang dibayarkan PT Inalum kepada Pemerintah Daerah melalui APBN. Diperlukan mekanisme pengganti annual fee untuk menjaga kesinambungan penerimaan Pemerintah Daerah. Selama tahun 2013 telah disampaikan rekomendasi kebijakan pengganti annual fee melalui nota dinas No: ND-162/KF/2013 tanggal 22 Maret 2013.

j. Evaluasi dan Penyusunan Model Kredit Sektor Pertanian

Perkembangan sektor pertanian berjalan lambat, dan daya saing hasil produk pun rendah sehingga kurang bersaing dengan produk impor. Akhirnya, banyak produk-produk pertanian luar negeri yang membanjiri pasar Indonesai. Beberapa faktor ditengarai sebagai penghambat jalan perkembangan sektor pertanian, salah satunya adalah masalah sulitnya akses modal dari perbankan. Beberapa program kredit telah dilaksanakan untuk mendorong, memudahkan, bahkan mengakselerasi agar sektor pertanian mampu mekases modal. Untuk menurunkan biaya produksi, Pemerintah melaksanakan program kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE), kredit pengembangan energi nabati & revitalisasi perkebunan (KPEN-RP), kredit usaha pembibitan sapi (KUPS). Untuk meningkatkan bankability, Pemerintah melaksanakan program kredit usaha rakyat (KUR). Sementara itu, untuk membantu petani yang kurang mampu, pemerintah memberikan bantuan PUAP. Masih ada beberapa lagi program Pemerintah yang bertujuan untuk membantu sektor pertanian.

Meskipun telah tersedia beberapa program kredit, hingga saat ini sektor pertanian tetap mengalami kesulitan akses modal, dengan kata lain nilai realisasi penyaluran kredit kurang memuaskan. Hal ini juga menunjukkan bahwa ketidakpercayaan bank terhadap sektor pertanian masih cukup rendah.

Berangkat dari uraian di atas, kajian dimaksudkan untuk : 1) melakukan evaluasi pelaksanaan program kredit yang telah tersedia, dan 2) jika perlu disusun kembali program kredit untuk sektor pertanian.

3. Analisis dan Rekomendasi Mitigasi Risiko Dukungan Pemerintah

a. Koordinasi Instrumen Percepatan Penyediaan Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyediakan fasilitas fiskal untuk percepatan penyediaan infrastruktur yang dilaksanakan dengan kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha, antara lain fasilitas dana geothermal, fasilitas dana dukungan kelayakan proyek kerja sama, pendirian badan usaha pembiayaan infrastruktur (PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)), dan pendirian badan usaha penjaminan infrastruktur (PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)). Agar semua fasilitas/instrumen tersebut dapat berfungsi secara optimal, maka perlu koordinasi di antara fasilitas/ instrumen tersebut.

b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 340/KMK.011/2013 tentang Pembentukan Komite Dukungan Kelayakan dalam rangka Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

KMK Nomor 340/KMK.011/2013 dan PMK Nomor 143/PMK.011/2013 melengkapi PMK Nomor 223/PMK.011/2012 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemberian dukungan kelayakan proyek atas sebagian biaya konstruksi pada proyek KPS atau yang disebut dengan Viability Gap Fund (VGF).

c. Pemantauan atas Koordinasi dan Proses Pemberian Viability Gap Fund (VGF) dalam rangka Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (Perpres 56/2011)

Dalam rangka pelaksanaan pemberian Dukungan Pemerintah berupa kontribusi fiskal dalam bentuk finansial, Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Dalam rangka operasionalisasi PMK 223/2012, maka Menteri Keuangan kembali menerbitkan dua paket regulasi, yaitu Keputusan Menteri Keuangan 340/KMK.011/2013 tentang Pembentukan Komite Dukungan Kelayakan dalam rangka Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, serta Peraturan Menteri Keuangan 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Dengan terbitnya regulasi-regulasi sebagaimana dimaksud, proses pemberian Dukungan Kelayakan terhadap proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha sudah dapat dilakukan. Terdapat dua proyek di sektor air yang potensial untuk memperoleh Dukungan Kelayakan, yaitu Proyek Air Umbulan, Jawa Timur dan Proyek Air Bandar Lampung. Oleh karena itu, pemantauan atas koordinasi proses pemberian Dukungan Kelayakan dilakukan untuk kedua proyek dimaksud dengan mengacu kepada proses yang diatur di dalam regulasi terkait pemberian Dukungan Kelayakan termasuk identifikasi mengenai stakeholder yang terlibat di dalamnya serta identifikasi terhadap rencana struktur komersial proyek.

d. Koordinasi dan Pemantauan Pengembangan Model Bisnis Pengelolaan Dana Geothermal dengan Skema Kerja sama Pemerintah dan Swasta

Saat ini Pemerintah sedang menjalankan Program Percepatan Pembangkit Listrik 10.000 MW Tahap II yang memberi ruang signifikan pada pemanfaatan energi terbarukan, seperti panas bumi (geothermal). Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk untuk mengurangi tingkat emisi karbon sampai dengan 26% pada tahun 2026 dibandingkan dengan tingkat emisi karbon pada saat ini. Strategi yang ditempuh dapat dilakukan dengan mengembangkan panas bumi untuk penyediaan tenaga listrik. Panas bumi merupakan sumber energi yang bersih, berlimpah dan dapat diandalkan. Selain itu potensi panas bumi Indonesia yang menguasai hampir 40% potensi panas bumi dunia merupakan kekayaan yang sangat besar untuk dikembangkan. Seiring dengan itu, Pemerintah juga telah berkomitmen untuk meningkatkan peran swasta dalam pembangunan proyek kelistrikan.

Dalam rangka mengembangkan penyediaan listrik geothermal tersebut, masih terdapat kendala utama yaitu ketersediaan data tentang potensi/ cadangan panas bumi dan risiko terbesar dalam pengembangan panas bumi, yaitu risiko eksplorasi. Untuk mengatasi kendala ketersediaan data dimaksud serta agar pengembang panas bumi tidak harus menanggung semua risiko eksplorasi, Pemerintah menyediakan Fasilitas Dana Geothermal (FDG). Dengan adanya FDG ini, diharapkan proyek pengembangan panas bumi lebih bankable. Hal ini menjadi isu penting, karena hampir semua proyek pengembangan panas bumi dibiayai lenders (Project Financing).

Melihat permasalahan tersebut, Pemerintah telah memutuskan untuk mendanai kegiatan eksplorasi dengan Fasilitas Dana Geothermal. Tahun 2013 adalah tahun ketiga dialokasikannya Fasilitas Dana Geothermal (FDG) di APBN. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.011/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Fasilitas Dana Geothermal yang mendasari pengelolaan FDG telah ditetapkan tahun 2012. Berdasarkan Pasal 21 PMK Nomor 3/PMK.011/2012 tersebut, atas pengelolaan Fasilitas Dana Geothermal dilakukan evaluasi dan monitoring. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring tersebut dikoordinasikan oleh Badan Kebijakan Fiskal, dalam hal ini Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal.

e. Kajian Hukum: Implikasi Percepatan Pembangunan oleh BUMN dalam rangka MP3EI terhadap Kewajiban Kontijensi Pemerintah (Risiko Fiskal)

Rekomendasi dari kajian ini adalah:

- 1) Agar fasilitas penjaminan pemerintah dan dukungan pemerintah dapat diakses untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur oleh BUMN, diusulkan untuk membuat suatu peraturan presiden yang menjadi payung hukum yang membawahi semua aturan tentang penjaminan infrastruktur baik untuk proyek KPS maupun non-KPS. Selanjutnya, hal ini diatur lebih rinci untuk setiap proyeknya dalam bentuk keputusan Menteri.
- 2) Terkait dengan paparan di atas, perlu dilakukan perbaikan atas Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 sehingga diharapkan bisa menjadi payung hukum yang membawahi dan mengatur seluruh aturan tentang penjaminan pemerintah atas proyek infrastruktur, baik yang menggunakan skema KPS maupun non-KPS. Adapun benefit yang akan diperoleh dari perbaikan Perpres 78/2010 ini adalah (1) memberi kesempatan yang sama kepada semua Badan Usaha, baik BUMN maupun swasta untuk memperoleh akses penjaminan pemerintah pada proyek-proyek infrastruktur, (2) mendorong BUMN lebih kreatif dalam mengambil corporate action terkait dengan aktivitas bisnisnya.
- 3) Sedangkan dari sisi insentif fiskal, penelitian ini merekomendasikan (1) mempertimbangkan dampak pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) bagi kelangsungan bisnis dan pengembangan investasi BUMN yang

menangani jalur penyeberangan Merak – Bakauheni, (2) adanya kepastian aturan tentang penyelesaian biaya pemindahan utilitas/instalasi umum (seperti instalasi listrik, pemasangan kabel listrik, pipa gas dan kabel telepon) di bawah tanah terkait dengan adanya pembangunan konstruksi infrastruktur jalan tol, serta (3) mempercepat proses penyelesaian pelunasan dana land capping oleh Badan Layanan Umum bidang jalan tol (di bawah Badan Pengatur Jalan Tol).

- 4) Untuk menyempurnakan regulasi/kebijakan yang bukan kewenangan Kementerian Keuangan, penelitian ini mengusulkan agar Badan Kebijakan Fiskal perlu menyampaikan langkah-langkah perbaikan kepada Kementerian/Lembaga/Pemda terkait. Beberapa poin yang perlu diusulkan adalah (1) pemerintah pusat perlu lebih proaktif untuk mengatasi hambatan regulasi yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah daerah lintas kabupaten/kota, (2) pemerintah pusat cq Kemenko Perekonomian perlu meninjau kembali Perpres Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri, (3) pemerintah pusat cq Badan Pertanahan Nasional agar mempercepat proses pembayaran kompensasi/penggantian pembebasan tanah.

f. Analisis dan Mitigasi Risiko dalam Penerbitan Surat Jaminan Kelayakan Usaha

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010, Pemerintah menjamin kelayakan usaha PT PLN (Persero) untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan energi terbarukan, batu bara, dan gas yang dilakukan melalui kerja sama dengan pengembang listrik swasta atau yang lebih dikenal dengan Program Percepatan Pembangkit Listrik 10.000 MW Tahap II/Fast Track Phase II (FTP II). Untuk melaksanakan penjaminan tersebut, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 139/PMK.011/2011 yang kemudian digantikan dengan PMK Nomor 223/PMK.011/2013.

Selama tahun 2013, terdapat satu Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) yang diterbitkan yaitu SJKU untuk PLTP Sarulla.

g. Analisis Kelayakan Pemberian Dukungan Pemerintah untuk Proyek KPS SPAM Umbulan dan Bandar Lampung

h. Penugasan Pemerintah kepada PT SMI untuk Melaksanakan Fasilitas Penyiapan Proyek Kereta Api Bandara Halim Perdana Kusuma – Soekarno Hatta dan Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 126/KMK.01/2011 memberikan penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI untuk melaksanakan fasilitas penyiapan proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha Kereta Api Bandara Soekarno Hatta – Manggarai dan Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan. Peraturan tersebut telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.01/2013. Perubahan tersebut berdasarkan Laporan Kajian Jalur yang dilakukan oleh PT SMI direkomendasikan jalur Opsi 2 (Bandara Soekarno Hatta -Pluit - Tanah Abang - Dukuh Atas - Manggarai - Halim) sebagai jalur terbaik pembangunan Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Kereta Api Bandara Soekarno Hatta - Manggarai dan memperpanjang waktu penugasan menjadi tiga tahun tujuh bulan.

i. Perumusan Konsep PPP Unit di Kementerian Keuangan

Keberadaan PPP Unit di Kementerian Keuangan diperlukan sebagai unit untuk melakukan pengelolaan dukungan Pemerintah (evaluasi usulan, alokasi anggaran, dan pengawasan) yang akuntabel, tepat waktu, dan transparan serta koordinasi instrumen fiskal (PT PII, PT SMI, PT IIF dan PIP) di bawah Kementerian Keuangan dalam rangka penyediaan infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Perumusan konsep PPP Unit di Kementerian Keuangan sesuai arahan Menteri Keuangan pada

tahun 2012 agar disiapkan prosposal PPP Unit di bawah Kementerian Keuangan. Dalam perumusan konsep PPP Unit, PPRF mendapat technical assistance dari World Bank. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain melakukan benchmarking PPP Unit di negara lain dan pelaksanaan workshop “Establishing a Successful PPP Unit in Indonesia” pada 5 Februari 2013 dan 2 – 3 Juli 2013.

j. Kajian Implementasi Skema Islamic Finance pada Proyek Infrastruktur Kerja Sama Pemerintah dan Swasta

Pemerintah Indonesia saat ini sedang merumuskan kebijakan untuk mendorong keterlibatan swasta dalam pengembangan infrastruktur, terutama dalam bentuk skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS-Public Private Partnerships), yang menunjukkan komitmen Pemerintah untuk berbagi risiko dan returns dengan sektor swasta. Skema KPS ini biasanya menggunakan skema project financing dimana sebagian besar dana yang digunakan berasal dari utang.

Namun, seiring dengan krisis keuangan global dan penurunan kegiatan perekonomian, pasar keuangan internasional dan kinerja lembaga-lembaga pembiayaan juga menurun. Hal ini juga berarti bahwa sumber penyediaan dana dari sektor swasta untuk terlibat dalam pembiayaan infrastruktur juga menurun, yang bisa juga diartikan bahwa tantangan untuk mengembangkan kebijakan kerja sama pemerintah dan swasta akan semakin besar. Pemerintah yang telah berkomitmen untuk menarik keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan infrastruktur harus mencari alternatif yang lebih luas termasuk saluran dan skema yang lebih menarik untuk mengundang partisipasi sektor swasta.

Salah satu alternatif yang bisa dieksplorasi adalah ketersediaan pendanaan dari pasar keuangan syariah (Islamic Fund) di pasar internasional yang relatif lebih aman dari dampak krisis ekonomi dan keuangan global. Secara umum dipahami bahwa Keuangan Islam mempunyai karakteristik dan skema tersendiri yang menjaga untuk tidak terlibat

dalam transaksi spekulatif, saling mendzolimi, dan berisiko sehingga mencegah keterseretan dalam krisis keuangan sebagaimana terjadi pada pasar pembiayaan konvensional. Dari pandangan pengalaman global, Keuangan Islam juga membuktikan dirinya sebagai alternatif pembiayaan yang memungkinkan bagi pengembangan infrastruktur, khususnya di Timur Tengah dan Asia.

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari studi ini antara lain (1) mekanisme regres dalam penjaminan yang dilakukan oleh PII atas proyek KPS tidak dapat dilakukan selama masih memperhitungkan nilai waktu dari uang (time value of money); (2) jenis pembangkit listrik yang paling memungkinkan untuk dilakukan perusahaan dengan KPS adalah PLTU, PLTP, dan PLTA; dan (3) implementasi penerapan KPS Syariah tidak dapat dilaksanakan jika PLN tidak memasukkan proyek dimaksud sebagai proyek prioritas. Sementara rekomendasi untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi skema Islamic Finance, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah (1) meniadakan perhitungan nilai waktu dari uang dalam mekanisme regres. PII masih dapat fee dari imbal jasa penjaminan; dan (2) melakukan shortlisting pembangkit listrik yang direncanakan untuk dibangun dengan skema KPS Syariah bersama-sama dengan PLN.

k. Pendukung Indonesia sebagai Pemegang Saham pada ASEAN Infrastructure Fund (AIF)

4. Pengelolaan Media Informasi di Lingkungan PPRF

Sehubungan dengan pengelolaan media informasi, PPRF telah melaksanakan penerbitan buku dan buletin serta kegiatan seminar/sosialisasi pengelolaan risiko fiskal. Buku yang diterbitkan PPRF pada tahun 2013 yaitu buku "Bunga Rampai Kebijakan Risiko Fiskal – Kumpulan Hasil Kajian Tahun 2011 – 2012", yang merupakan kumpulan hasil kajian tim di lingkungan Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal tahun 2011 s. d. 2012.

Selain menerbitkan buku, PPRF juga menerbitkan buletin yaitu Buletin Info Risiko Fiskal (IRF). IRF merupakan publikasi bersifat semipopuler yang diterbitkan oleh PPRF yang bertujuan untuk mengenalkan risiko fiskal dan menyampaikan informasi terkait dengan pengelolaan risiko fiskal kepada para pemangku kepentingan. IRF terbit secara triwulanan.

Selain menerbitkan buku dan buletin, PPRF juga menyelenggarakan kegiatan seminar/sosialisasi pengelolaan risiko fiskal. Pada tahun 2013 dilaksanakan satu kegiatan seminar dan tiga kegiatan sosialisasi. Kegiatan seminar, yaitu Seminar Nasional dengan tema "Inisiatif Program National Interest Account (NIA) Sebagai Alternatif Percepatan Pertumbuhan Ekspor Nasional" dilaksanakan pada tanggal 10 September 2013, bertempat di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Lantai 2. Sementara itu, kegiatan sosialisasi mengambil tema "Pengelolaan Risiko Fiskal Dalam Rangka Menjaga Kesehatan Fiskal dan Kestinambungan Pembangunan", dilaksanakan di tiga kota, yaitu Yogyakarta, Bandar Lampung, dan Mataram.





DECY ARIFINSJAH

KEPALA PUSAT KERJASAMA REGIONAL BILATERAL (PKRB)

Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama Assosiation of South East Asian Nations (ASEAN), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), forum-forum regional, bilateral, dan kerja sama teknik luar negeri.

KEBIJAKAN KERJASAMA REGIONAL DAN BILATERAL





Kegiatan/kajian terkait kerja sama regional dan bilateral

a. APEC Finance Ministers' Process

Chairmanship 2013

Pada chairmanship Indonesia di forum APEC tahun 2013, Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal ditunjuk untuk menjadi chair pada jalur APEC Finance Ministers' Process (APEC FMP). Sesuai dengan tema keketuaan Indonesia yaitu "Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth" agenda utama yang dibahas pada APEC FMP 2013 mengerucut menjadi empat agenda utama, yaitu i) Infrastructure; ii) Financial Inclusion; iii) Trade Finance; dan iv) Treasury and Budget Reform. Selain empat agenda utama tersebut, Indonesia juga mendapat mandat untuk menyelesaikan agenda Disaster Risk Management yang belum selesai pada keketuaan Rusia pada 2012, memonitor perkembangan Asia Region Fund Passport (ARFP), serta rencana pembentukan Asia Pacific Financial Forum.

Keseluruhan pertemuan dalam rangka keketuaan Indonesia dalam APEC Finance Ministers' Process berjumlah 12 pertemuan yang diselenggarakan di 7 kota di seluruh Indonesia. Berdasarkan pertemuan tersebut, keketuaan Indonesia pada APEC FMP 2013 menghasilkan output berupa Guiding Principles on Financial Inclusion; Guiding Principles on Treasury and Budget Reforms; Survey mengenai perkembangan Trade Finance di kawasan; Survey mengenai Disaster Risk Financing best practices; Pembentukan APEC PPP Experts Advisory Panel serta Penunjukan PPP Unit di Kementerian Keuangan Indonesia sebagai pilot project PPP Center di kawasan.

b. Perpanjangan dan Modifikasi Bilateral Swap Arrangement (BSA) Indonesia-Jepang

BSA merupakan fasilitas untuk membantu mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek dan kesulitan neraca pembayaran serta untuk melengkapi fasilitas pembiayaan internasional yang sudah ada. Kesepakatan perpanjangan dan modifikasi BSA Indonesia-Jepang telah ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2013. Kesepakatan tersebut memperkuat modalitas BSA yang berlaku saat ini melalui peningkatan nilai swap menjadi sebesar USD22,76

miliar atau hampir dua kali lipat dari nilai sebelumnya sebesar USD12 miliar. Kesepakatan ini juga menyediakan skema pencegahan krisis untuk mendukung kebutuhan likuiditas potensial dan/atau aktual. Otoritas Jepang dan Indonesia berpandangan bahwa penguatan kerjasama keuangan bilateral ini akan berkontribusi pada stabilitas pasar keuangan dan mendorong pertumbuhan kerja sama kedua negara di bidang ekonomi dan perdagangan.

c. Posisi Indonesia sebagai Direktur Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) mewakili negara-negara ASEAN

Efektif sejak tanggal 25 November 2013 Indonesia memperoleh posisi sebagai anggota Dewan Direktur (Board of Director – BOD) CGIF mewakili negara-negara ASEAN untuk periode masa tugas selama tiga tahun, dan sekaligus menjadi Ketua Komite Audit CGIF. Dalam hal ini, sesuai persetujuan Menteri Keuangan posisi Direktur CGIF dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (Dirjen PU).

Posisi ini memiliki nilai penting karena jumlah anggota BOD dalam CGIF dibatasi sesuai jumlah penyertaan modal, dan mengingat tujuan pembentukan CGIF di tingkat kawasan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketahanan pasar keuangan, dan mencegah guncangan terhadap system keuangan internasional melalui pengembangan pasar obligasi kawasan yang cair (liquid) dan dalam (deep). Dalam kegiatan operasionalnya CGIF menyediakan penjaminan kredit dan investasi dalam rangka memungkinkan para penerbit obligasi dengan peringkat investment-grade untuk memperoleh akses terhadap pasar obligasi bermata uang lokal. Indonesia menjadi salah satu negara prioritas untuk memperoleh fasilitas CGIF dimaksud.

d. Posisi Indonesia sebagai anggota Advisory Panel pada ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)

Efektif sejak tanggal 17 Mei 2013 hingga 16 Mei 2015 Indonesia berhasil menempatkan wakilnya sebagai anggota Dewan Penasihat (Advisory Panel – AP) pada AMRO. Dalam hal ini, sesuai persetujuan Menteri

Keuangan posisi anggota AP pada AMRO berhasil diperoleh Bp. Andin Hadiyanto, Kepala BKF. Posisi ini memiliki nilai penting karena pemilihan anggota AP harus melalui proses seleksi yang ketat diantara negara-negara ASEAN, dan pencalonan dari Indonesia berdampak pada tereliminasi kandidat dari negara lain yang pada periode dua tahun sebelumnya telah memperoleh posisi dimaksud. Selain itu, posisi AP pada AMRO juga sangat strategis dalam memberikan masukan-masukan dalam rangka meningkatkan kinerja AMRO dan mempertajam hasil analisa AMRO terhadap perkembangan perekonomian global, regional dan masing-masing negara ASEAN+3.

e. Pelaksanaan CMIM Fire Drill (Simulasi aktivasi CMIM)

Pada tanggal 13 November 2013 untuk pertama kalinya telah dilaksanakan CMIM Fire Drill (Simulasi aktivasi CMIM) dengan mekanisme pertemuan melalui teleconference. Simulasi ini diikuti oleh hampir seluruh negara anggota (kecuali Myanmar). Pelaksanaan simulasi ini memiliki nilai penting dan strategis mengingat inisiatif ini pertama kali diusulkan oleh Indonesia dan memperoleh dukungan dari seluruh negara anggota ASEAN+3 serta memperoleh mandat dari para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral pada pertemuan AFCGM+3 di India pada bulan Mei 2013 untuk dilaksanakan dalam rangka kesiapan mekanisme CMIM untuk dapat diimplementasikan secara penuh.

f. Kementerian Keuangan RI sebagai tuan rumah ASEAN Infrastructure Fund (AIF) Board of Directors' Meeting

Indonesia telah menyelenggarakan Pertemuan Keempat ASEAN Infrastructure Fund (AIF) Board of Directors Meeting yang diadakan pada tanggal 1 November 2013 bertempat di Grand Hyatt, Jakarta, dan dihadiri oleh Direktur/Direktur pengganti dari para stake holders' AIF (kecuali Filipina dan SIngapura) serta Tim ADB selaku Administrator AIF. Kegiatan ini merupakan pertama kalinya dilakukan Indonesia semenjak AIF terbentuk pada tahun 2011.

Mengingat peran penting Indonesia di AIF, yakni sebagai Chair AIF periode 2013-2015, Indonesia mendukung terselenggaranya pertemuan-pertemuan Dewan Direksi secara baik dan sesuai jadwal, dan bersedia untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan untuk pertemuan berikutnya.

g. Signing Ceremony of The 1st AIF Project

Proyek pertama yang telah disetujui untuk memperoleh pendanaan AIF adalah proyek java-bali 500KV Power Transmission Crossing di Indonesia. Signing proyek ini telah dilakukan pada tanggal 30 Desember 2013 bertempat di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, oleh Direktur Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, sebagai perwakilan dari Pemerintah Indonesia, Country Director ADB untuk Indonesia, sebagai perwakilan ADB dan AIF, dan Direktur Utama PLN, sebagai perwakilan dari pihak pelaksana proyek Power Transmission tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan secara bersama anatar Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, BKF, dengan Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri,, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Biro Umum dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal, serta Sekretariat BKF.

Signing Ceremony proyek ini memiliki nilai penting karena proyek ini merupakan proyek pertama di Indoensia dan di ASEAN yang pendanaannya mencakup juga partisipasi dari AIF, yakni sebesar USD 25 juta.

h. Penandatanganan MoU antara Kementerian Keuangan RI dengan Australian Treasury

Pada tanggal pada tanggal 15 Februari 2013 di Moskow, Rusia, Menteri Keuangan RI dan Australian Treasurer telah menandatangani MoU kerja sama keuangan sebagai upaya untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang keuangan melalui dialog ekonomi secara berkala. MoU dimaksud telah ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Bilateral Economic Policy Dialogue (BEPD) pada tanggal 14 November 2013 di Canberra, Australia. Isu yang dibahas antara lain perkembangan ekonomi global, G20, infrastruktur, dan isu-isu bilateral lainnya.

i. Penandatanganan MoU antara Kementerian Keuangan RI dengan Kementerian Keuangan Vietnam

Pada tanggal 28 Juni 2013 di Jakarta, Wakil Menteri keuangan RI dan Wakil Menteri Keuangan Vietnam telah menandatangani MoU kerja sama keuangan sebagai upaya untuk memperkuat kerja sama dalam bidang pengelolaan keuangan publik. Implementasi MoU tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2014 antara lain melalui program pembangunan kapasitas.

j. Koordinasi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia 2013

Dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia, Kementerian Keuangan terlibat sebagai anggota Working Group I Tim Koordinasi Nasional KSST yang berperan merumuskan dan menyusun Institutional and Regulatory Framework KSST Indonesia. Selain itu, Kementerian Keuangan juga berkontribusi pada South-South Facility (SSF) Bank Dunia sebesar US\$ 1.500.000 untuk jangka waktu 2014-2016. Kementerian Keuangan juga menjadi bagian dari Indonesia's knowledge hub pada pilar Macroeconomic Management and Public Finance dan mengetuai Task Force Team (TFT) untuk melakukan eksplorasi dan merumuskan lebih mendalam mengenai keunggulan komparatif Indonesia pada tema-tema yang telah ditentukan. Berdasarkan diskusi pembahasan yang melibatkan unit-unit Eselon 1 Kementerian Keuangan, serta Sekretariat Negara dan Bank Indonesia sebagai observer, Task Force Team (TFT) Macroeconomic Management and Public Finance fokus pada sub-tema unggulan yaitu; Bond Market Development-DJPU, Tax Contact Center-DJP, dan Tax Data Processing Center-DJP.

Kementerian Keuangan telah menyelesaikan target kerja 2012 TKN KSST dengan memproduksi video dan booklet promosi Task Force Team on Macroeconomic Management and Public Finance dengan tema Indonesia's experiences on Macroeconomic Management: Building Trust-The Foundation of Indonesia's Economic Reforms. TKN KSST juga telah merampungkan penyempurnaan Rencana Induk (2011-2025) dan Cetak Biru periode 5 tahunan, sesuai arahan menteri dan penjabaran dari para wakil

menteri selaku Tim Pengarah. Selain itu, TKN KSST juga telah menyusun draf Peraturan Presiden tentang Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular.

k. Pelaksanaan The 3rd Government of Indonesia - JBIC Financial Dialogue Framework

Tujuan pelaksanaan JWG adalah untuk memperkuat kerja sama bilateral bidang keuangan antara kedua negara. JWG telah dilaksanakan di Tokyo pada tanggal 29 September 2013. Beberapa isu yang dibahas dalam JWG antara lain (i) memperkuat daya tahan pasar keuangan, (ii) mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia, dan (iii) mendorong penggunaan mata uang lokal (Rupiah) dalam pembiayaan infrastruktur dan bisnis lainnya di Indonesia.

l. Pelaksanaan The 3rd Government of Indonesia-JBIC Financial Policy Dialogue Framework.

Gol-JBIC FPDF merupakan suatu dialog tahunan natar Pemerintah RI dengan JBIC sebagai upaya untuk memperkuat kerja sama kedua belah pihak. Gol-JBIC FPDF yang ketiga diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 12 September 2013. Delegasi RI dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan II sedangkan delegasi JBIC diketuai oleh Presiden/CEO JBIC. Isu-isu yang dibahas dalam FPDF antara lain mengenai perkembangan ekonomi global, perkembangan infrastruktur di Indonesia, dan kerja sama energi.

m. International Workshop on Optimizing the ASEAN Infrastructure Fund (AIF) for Infrastructure Development in Indonesia

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 1 November 2013 bertempat di Grand Hyatt, Jakarta. Kegiatan ini mengundang stakeholders Indonesia dari kalangan Pemerintah dan BUMN. Kegiatan ini mengangkat tema Optimizing the AIF, yaitu suatu mekanisme yang inovatif untuk pendanaan pembangunan infrastruktur di kawasan ASEAN. Tujuan dari Workshop AIF adalah untuk: (i) memperkenalkan perkembangan dan operasionalisasi AIF kepada stakeholders Indonesia; (ii) memperkenalkan jenis proyek-proyek yang didukung oleh AIF; (iii) Mekanisme Pendanaan AIF saat ini dan di masa mendatang; serta (iv) peran dari ADB di AIF.

n. Kerja sama Penelitian dengan JICA dan LPEM-UI mengenai Social Security in the Decentralisation Context

JICA bekerjasama dengan BKF dan LPEM-UI mengadakan Study on Social Service Delivery and Social Security in the Decentralized Indonesian Context. Tujuan study tersebut adalah untuk memberikan pandangan kebijakan atas (i) sistem pemerintahan yang optimal terkait dengan subsidi ke Pemda, (ii) pengembangan kapasitas administrasi Pemda, dan (iii) sistem jaminan sosial dikaitkan dengan desentralisasi, dan (iv) kemungkinan area kerja sama dengan JICA. Penelitian telah berhasil diselesaikan pada akhir tahun 2013.

o. Kerja sama penelitian dengan UI mengenai Penajaman Peran BKF dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri

Menteri Keuangan telah memberikan arahan agar penerapan kebijakan pembatasan utang luar negeri dapat dijadikan momentum untuk perbaikan manajemen utang dan perbaikan Blue Book. Badan Kebijakan Fiskal, sebagai salah satu unit di kementerian keuangan yang antara lain bertanggung jawab dalam melakukan analisis dan memberikan rekomendasi kebijakan fiskal, diharapkan dapat meningkatkan dan menajamkan perannya dalam pengelolaan pinjaman luar negeri, terutama dengan mendalami dari sisi substansi, hubungan dengan institusi/lembaga atau negara pemberi pinjaman terutama terkait Country Partnership Strategy terhadap setiap proposal pinjaman yang ditawarkan oleh lembaga/negara donor.

Hasil kajian yang dilakukan menunjukkan antara lain:

- Terdapat beberapa hal yang sangat dominan dalam hal prinsip pengelolaan PLN yang efektif yaitu (i) Perencanaan; (ii) Analisa; (iii) Proyeksi; (iv) Negosiasi; (v) Penerimaan; (vi) Pembayaran; (vii) Pemantauan dan; (viii) Evaluasi.
- Terdapat lima unit utama yang memegang peranan dalam pengelolaan PLN, yakni: Dirjen Pengelolaan Utang (DJPU), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Dirjen Anggaran (DJA) dan Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) di Kementerian Keuangan, serta Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan (DPBD) di BAPPENAS.

- Terkait peran BKF dalam pengelolaan PLN, beberapa peran tersebut antara lain (i) melakukan analisis dan proyeksi perkembangan PLN, (ii) melakukan negosiasi pinjaman luar negeri, dan (iii) melakukan deteksi dini risiko terhadap kondisi fiskal dari PLN.

p. Kajian mengenai Penambahan Perwakilan Kementerian Keuangan di Luar Negeri

Menteri Keuangan memberikan arahan agar peran perwakilan Kementerian Keuangan di luar negeri lebih ditingkatkan agar keterwakilan Indonesia dalam kerja sama bilateral dan forum-forum dan organisasi-organisasi internasional semakin kuat.

Menindaklanjuti arahan tersebut, telah dilakukan kajian mengenai perlunya penambahan wakil Kementerian Keuangan di luar negeri. Kajian tersebut kemudian dituangkan dalam suatu naskah akademis yang akan memberikan penjelasan empiris tentang perlunya penambahan wakil Kementerian Keuangan di luar negeri. Sampai dengan berakhirnya tahun 2013, naskah akademis tersebut terus mengalami revisi untuk disesuaikan dengan perkembangan dan diskusi yang terjadi.

q. Kajian mengenai Pengembangan Regional-Internasional Infrastruktur Fund

Dalam rangka mengakselerasi dan mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan dan internasional termasuk di Indonesia, telah dilakukan kajian mengenai Pengembangan Regional Internasional Infrastruktur Fund. Kajian yang dilakukan tersebut terbagi menjadi dua bagian yakni kajian mengenai Good Governance atas proyek-proyek infrastruktur serta kajian mengenai Pipeline Project dan Pengembangan pendanaannya.

Beberapa rekomendasi yang diangkat dalam kajian tersebut adalah perlunya percepatan pembentukan PPP unit yang didesain sesuai dengan permasalahan yang ada, sehingga dapat mengatasi berbagai kelemahan yang ada dalam proyek-proyek yang dikerjasamakan melalui PPP. Selain itu terkait dengan pengembangan pendanaan infrastruktur (dalam hal ini AIF) dapat ditempuh berbagai alternatif seperti penerbitan obligasi, Perluasan pendanaan AIF melalui

ASEAN plus three, maupun Partisipasi dari swasta. Selanjutnya, mengingat keterbatasan pendanaan infrastruktur di Indonesia, sebaiknya diusulkan agar proyek-proyek yang didanai oleh AIF tidak terbatas pada proyek-proyek yang bersifat connectivity antar negara anggota AIF, namun juga proyek-proyek infrastruktur lainnya, sesuai dengan prioritas masing-masing negara anggota AIF.

r. Capacity Building Penyusunan

Discussion Notes

Sehubungan dengan peningkatan peran Indonesia dalam forum-forum internasional maka diselenggarakan capacity building mengenai penyusunan discussion notes ini untuk meningkatkan kapasitas pegawai terkait penyusunan materi atau substansi pertemuan-pertemuan seperti draft speech, positioning paper, intervention point, dan juga discussion notes. Pada akhir program, diharapkan peserta telah mampu menyusun discussion notes untuk pertemuan-pertemuan bilateral, regional dan internasional di berbagai tingkatan pertemuan: Working Group, Deputies, maupun Ministers.

s. Capacity Building Diplomasi Internasional

Kegiatan capacity building ini diselenggarakan bagi para pegawai internal BKF, untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam kemampuan diplomasi, legal English dan legal drafting. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar legal English, termasuk isu-isu dalam penulisan dan penerjemahan produk hukum serta memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar diplomasi ekonomi dalam forum-forum internasional. Pengetahuan ini akan sangat berguna bagi para pegawai terutama ketika dilibatkan dalam rangkaian kegiatan perundingan kerjasama bilateral atau multilateral.

Sebagai tindak lanjut atas kegiatan capacity building ini, dimungkinkan untuk diadakan kegiatan capacity building dengan tema yang sama dalam tingkat yang lebih tinggi (advanced). Disarankan pula, demi berimbangannya materi yang diajarkan, akan lebih baik jika mengundang pula pengajar dari Biro Kerja Sama Internasional Kementerian Luar Negeri sebagai

wakil pemerintah yang memiliki berbagai pengalaman dalam merumuskan naskah kerjasama internasional

t. Kerjasama Teknik Luar Negeri

Di tahun 2013 telah diproses keberangkatan 548 pegawai Kementerian Keuangan untuk mengikuti program pengembangan kapasitas di luar negeri atas 78 peserta program degree (64 program S2 dan 14 program S3) dan 470 peserta program non-degree. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 5% untuk program degree dan 1.95% untuk program non degree dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan unit eselon satu di Kementerian Keuangan, lima unit yang paling banyak mengirimkan pegawainya untuk mengikuti program degree secara berturut-turut adalah Direktorat Jenderal Pajak (37 orang), Badan Kebijakan Fiskal (11 orang), Sekretariat Jenderal (8 orang), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (6 orang), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (4 orang).

Sedangkan Untuk program non degree, lima unit eselon satu yang paling banyak mengirimkannya pegawainya untuk program pengembangan kapasitas adalah Badan Kebijakan Fiskal (117 orang), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (104 orang), Direktorat Jenderal Pajak (56 Orang) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (49 orang).

Kegiatan kerjasama teknik luar negeri lainnya ialah kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan pengurusan tenaga ahli asing, meliputi pengajuan permintaan/penempatan tenaga ahli dan /atau perpanjangan tugas tenaga ahli asing yang ditugaskan di Kementerian Keuangan kepada Sekretariat Negara. Selain itu, juga permintaan dan/atau penyampaian persetujuan kepada Sekretariat Negara untuk tenaga ahli asing dengan masa penugasan jangka pendek serta pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan. Selama 2013, telah dilaksanakan pengurusan 10 orang tenaga ahli asing baik untuk penugasan jangka panjang ataupun jangka pendek. Adapun total tenaga ahli asing yang ada saat ini berjumlah 25 orang yang ditempatkan di unit-unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan.





IRFA AMPRI

**KEPALA PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL**

“Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, analisis, evaluasi, pengkajian, koordinasi, kerja sama, pemantauan pendanaan dan pembiayaan perubahan iklim, dan kerja sama ekonomi dan keuangan G20 dan forum multilateral lainnya, serta penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional.

KEBIJAKAN

PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM & MULTILATERAL





Kegiatan/Kajian di Bidang Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

1. Penghitungan Emisi dari Konversi Minyak Tanah ke Tabung LPG

Kebijakan konversi dilatar belakangi oleh peningkatan beban subsidi energi dalam APBN yang terus meningkat setiap tahunnya. Kajian dilakukan PKPPIM sendiri, intinya adalah untuk menghitung emisi karbon yang dapat dikurangi dengan adanya program konversi mitan ke LPG yang dipelopori oleh Wapres Jusuf Kalla. Mengingat besarnya pengurangan subsidi BBM dan potensi pengurangan emisi GRK, sementara di sisi lain program konversi mitan ke LPG 3 kg tersebut belum dimasukkan dalam dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor energi, sekiranya program tersebut perlu diusulkan untuk dimasukkan ke dalam target penurunan emisi GRK sektor energi. Kajian telah selesai dilakukan dan telah disetujui Menteri Keuangan, serta telah disampaikan kepada Menteri ESDM pada tanggal 1 Agustus 2013. Belum adanya surat balasan dari Menteri ESDM mengenai hal ini karena konversi mitan belum dimasukkan menjadi target RAN, hal ini dikarenakan program konversi dirasa belum selesai dan lebih baik diserahkan ke masing-masing daerah dalam RAD.

2. Dana Bergulir Efisiensi Energi (DBEE)

Adanya peningkatan beban subsidi energi dalam APBN setiap tahunnya, Kemenkeu wajib melakukan berbagai upaya dalam rangka menyehatkan APBN tersebut. Salah satu prakarsa yang perlu terus didorong adalah upaya untuk melakukan efisiensi penggunaan energi.

Diskusi dengan pihak Bank Indonesia mengenai rencana DBEE. Tim Peneliti BI telah mempunyai data mengenai average cost of fund pinjaman komersil yang terdiri dari different risks cost dan marjin keuntungan. Statistik menyatakan cost of overhead 3-4%, profit margin 2.13%, dan risk cost 1.5%, sehingga commercial rate bisa 6.63-7.63%. Bila cost of fund 0-1% seperti Tahapan BCA, maka lending rate bisa 7-8%. Agar menarik pihak bank maka ditetapkan lending rate DBEE menjadi antara 8-9%. Bekerja sama dengan EBTKE ESDM menyusun profile investasi EE Indonesia. Profile ini dimaksudkan untuk membuat pipelines

proyek EE. Sehingga pada saat DBEE diluncurkan, bank-bank penyalur DBEE tidak perlu menunggu lama. Maksud lainnya adalah diharapkan dengan jelasnya target penyaluran DBEE, bank-bank akan tertarik dan berani untuk memberikan tingkat bunga serendah mungkin.

Kajian mekanisme Dana Bergulir Efisiensi Energi yang dilakukan oleh BKF-Kementerian Keuangan, untuk menghitung potensi penghematan subsidi dan potensi penurunan emisi GRK, data "Produksi Listrik dan Penjualan Listrik (GWH) per jenis pembangkitan dan per provinsi tahun 2010, 2011, dan 2012" dari PLN. Dana Bergulir belum disetujui Menkeu namun telah ditambahkan mekanisme pencegahan sidestreaming yang dituangkan dalam SOP. Adapun nama-nama bank yang akan menjadi executing agency akan segera ditetapkan dengan bantuan Bank Indonesia.

3. Budget Marking

Untuk memastikan agar pemantauan dan pelaporan terkait komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca secara teratur maka Pemerintah perlu mengembangkan suatu sistem yang memungkinkan pengambil keputusan menelusuri unit-unit anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi perubahan iklim dan menilai dampak setiap unit anggaran yang dibelanjakan untuk penurunan emisi GRK.

Untuk itu sudah dilakukan pembicaraan pendahuluan dengan pihak Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan beberapa K/L teknis, dalam tahap awal, Marking Budget akan dilakukan terlebih dahulu dibandingkan Budget Scoring.

4. Insentif bagi Energi Surya

Tindak lanjut atas kajian yang telah dimulai pada tahun 2012 mengenai kebijakan insentif fiskal untuk mendukung Photovoltaic (PV) di Indonesia. Kajian ini diselesaikan bekerjasama dengan konsultan United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU) yakni Sdr. Fabby Tumiwa dengan usulan PMK yang menggabungkan semua fasilitas yang pernah ada. Kajian akan dilanjutkan dengan fokus insentif bagi IPP dan PLN. Proposal studi telah disetujui dan status terakhir adalah keterlambatan penyelesaian dikarenakan data

yang diperlukan belum dapat diakses dari PLN. Untuk itu pihak konsultan akan dipertemukan dengan Sdr. Soeroso, dari Direktorat Perencanaan dan Teknologi PLN, yang cukup tahu banyak tentang tarif dasar dan struktur biaya PLN, serta akan dilakukan implementasi rekomendasi kebijakan terutama jangka pendek yaitu pemberian insentif bea masuk bagi komponen pembentuk modul surya.

5. Penggantian LED bagi Lampu Penerangan Jalan Umum

Untuk mendukung upaya efisiensi energi dari pemerintah daerah, saat ini dilakukan kajian yang mengarahkan penggantian lampu PJU. Sampai saat ini penggantian lampu PJU diarahkan digantikan dengan lampu LED yang memiliki penghematan hingga 85%, namun seiring perkembangan teknologi yang cepat, dimungkinkan juga menggunakan lampu lain di masa yang akan datang.

Kajian ini memerlukan kerjasama dengan pihak Pemda karena tanggung jawab LPJU ada pada Pemda, khususnya Dinas LPJU. Bekerja sama dengan ESDM dan GIZ Paklim, telah dilakukan diskusi Opsi Pembiayaan untuk Pemda bagi subsidi LPJU dengan LED. Telah dilakukan presentasi ke Pemda-pemda Surakarta, Semarang, Palembang, Makassar dan Manado; untuk mendapatkan kesepakatan kerjasama penggantian LPJU dan masukan yang bermanfaat bagi kajian Kajian ini disambut dengan baik oleh beberapa Pemerintah Kota.

Dalam kajian ini, Beberapa daerah sudah menyatakan ketertarikannya. Sudah diadakan pertemuan antara Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dengan PIP utk pembicaraan pendahuluan, Namun saat ini PIP belum memiliki piloting project terkait mekanisme pendanaan terkait LPJU.

6. Kegiatan Kerjasama G20, OECD dan Multilateral Lainnya

- i. G20 Ambassadors Briefing Luncheon.
G20 Ambassadors Briefing Luncheon telah diselenggarakan di Hotel Dharmawangsa Jakarta, pada tanggal 6 Februari 2013. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penyampaian hasil-hasil pelaksanaan

kerja sama G20 selama tahun 2012 dari sudut pandang dan kepentingan Indonesia serta penyampaian pandangan dan prioritas Indonesia untuk kerja sama G20 di bawah Presidensi Rusia untuk tahun 2013.

- ii. The 4th Asian Development Forum
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan bekerja sama dengan JAPAN INTERNATIONAL CO-OPERATION AGENCY (JICA) menyelenggarakan 4TH ASIAN DEVELOPMENT FORUM dengan tema ASIAN INPUT TOWARD POST 2015 DEVELOPMENT AGENDA AND THE POST-BUSAN GLOBAL PARTNERSHIP. Acara ini diadakan pada tanggal 13-14 Maret 2013 di Hotel Mulia Senayan Jakarta. Acara ini dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan II, Mahendra Siregar. Dalam sambutannya, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa forum ini memiliki tujuan sebagai pendukung dan penyedia rekomendasi untuk Post 2015 HIGH LEVEL PANEL yang akan diselenggarakan 2 minggu setelah penyelenggaraan acara ini di Bali. Menurut Mahendra Siregar, Asia memberikan kontribusi yang besar dalam pertumbuhan global. Post 2015 HIGH LEVEL PANEL ditekankan pada sinergi negara-negara anggotanya, salah satunya untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan akhir untuk mengatasi kemiskinan.

Selama 2 hari peserta membahas beberapa agenda seperti kesetaraan dan keterbukaan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja yang layak; ekspansi ekonomi, masyarakat yang kuat, pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan; peningkatan ketahanan menghadapi guncangan eksternal seperti bencana alam; serta dinamika kerjasama pembangunan Asia, dalam rangka mendukung POST BUSAN GLOBAL PARTNERSHIP menuju Post 2015 Tantangan Pembangunan.

- iii. Seminar "Strengthening the Role of IDB Group in the Development of Public and Private Sector in Indonesia", dan Penandatanganan HCA on the Establishment of Country Gateway Office antara Indonesia dan IDB

Kamis, 28 Februari 2013 bertempat di Jakarta, Menteri Keuangan RI bersama-sama dengan Ketua Islamic Development Bank (IDB) Group telah menandatangani Host Country Agreement (HCA) atas pendirian Country Gateway Office (CGO) di Indonesia. Acara penandatanganan tersebut dilanjutkan dengan seminar dengan tema *Enhancing Strategic Partnership between the Government of Indonesia and the Islamic Development Bank Group*. Seminar membahas peluang atas pembiayaan IDB Group bagi sektor swasta nasional dan pembangunan Indonesia. Seminar ini diharapkan dapat menjadi ajang diseminasi publik, utamanya bagi unit pemerintahan, sektor swasta, dan akademisi atas peluang-peluang kerja sama yang mungkin digali dengan IDB Group ke depannya baik jangka pendek maupun jangka panjang.

iv. Penguatan Koordinasi Diplomas Penanganan Kerja Sama G20.

Dalam rangka mendukung partisipasi aktif Indonesia dalam pertemuan-pertemuan G20, baik di jalur keuangan maupun di jalur Sherpa, telah dilaksanakan kajian dan penyusunan position papers dan intervention points, pemantauan dan pengkajian perkembangan kondisi perekonomian global, termasuk mengumpulkan data dan informasi sekaligus sharing opinion dengan instansi pemerintah, peningkatan kapasitas pegawai dalam hal kemampuan berdiplomasi pada forum dan kerjasama internasional melalui partisipasi dalam workshop dan kursus.

v. Penyusunan kertas posisi (position papers) atas agenda pembahasan G20.

Kertas posisi (position papers) menjadi panduan bagi Delegasi Kementerian Keuangan dalam penyampaian responnya terhadap isu-isu yang dibahas dalam forum G20. Kertas posisi mencakup garis besar posisi Indonesia terhadap agenda tertentu dan analisis atau kajian singkat terhadap posisi yang diambil. Dalam kertas posisi juga disampaikan perkembangan dari pembahasan isu yang diangkat dan sedapat mungkin posisi negara anggota lain terhadap isu yang sama. Dokumen ini selalu dilakukan pembaharuan setiap kali terdapat

perkembangan signifikan atau setelah pertemuan G20 dilakukan.

Kertas posisi yang disiapkan disesuaikan dengan agenda-agenda pembahasan utama dalam forum G20 diantaranya: Global Economy, Framework, Infrastructure Financing, International Financial Architecture, Financial Regulation, Financial Inclusion, Energy and Commodity Markets, Tax Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan Joint G20 Finance and Labours Minister Meeting.

Kertas posisi utamanya selalu diperbaharui dalam rangka keikutsertaan Delegasi Indonesia pada pertemuan-pertemuan G20, khususnya dalam proses penyusunan bahan intervensi bahkan penyusunan pedoman delegasi untuk pertemuan-pertemuan di luar jalur keuangan. Pertemuan-pertemuan yang dihadiri pada Semester I tahun 2013 diantaranya: 1st Sherpa Meeting (Moscow, 11 – 12 Desember 2012), Framework Working Group Meeting (New Delhi, 14 – 15 Januari 2013), Energy Sustainability Working Group Meeting (Moscow, 7 – 8 Februari 2013), Task Force on Employment Meeting (Moscow, 8 – 9 Februari 2013), G20 Deputies Meeting dan G20 Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting (Moscow, 14 – 16 Februari 2013), G20 Deputies Meeting dan G20 Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting (Washington, 17 – 19 April 2013), 2nd Sherpa Meeting (St. Petersburg, 18 – 19 Mei 2013), Task Force on Employment Meeting

(St. Petersburg, 3 – 4 Juni 2013), G20 Deputies Meeting (St. Petersburg, 6 – 7 Juni 2013), G20 Deputies Meeting dan G20 Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting serta Joint G20 Finance and Labor Ministers Meeting (Moscow, 18 – 20 Juli 2013), dan 3rd Sherpa Meeting (St. Petersburg, 25 – 26 Juli 2013).

Kertas posisi juga menjadi basis dalam penyusunan bahan briefing untuk kepentingan pendampingan pertemuan pimpinan atau pertemuan teknis bilateral dengan stakeholders G20 atau perwakilan asing di Jakarta. Beberapa pertemuan bilateral

dalam rangka membahas posisi Indonesia di G20 diantaranya pertemuan Menteri Keuangan dengan Undersecretary Ms. Lael Brainard dan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Australia Wayne Swan pada sela pertemuan G20 di Moscow bulan Februari 2013; pertemuan Deputi Keuangan Indonesia dengan Deputi Keuangan Australia pada sela pertemuan G20 di Washington D.C. bulan April 2013; pertemuan teknis dengan co-chair Jerman terkait keketuaan bersama Indonesia untuk Study Group on Financing for Investment; pertemuan dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Jerman pada pertemuan G20 di Moscow bulan Juli 2013; juga beberapa pertemuan dengan perwakilan asing di Jakarta seperti dengan economic counselor Perancis, Jepang, Korea, dan sebagainya.

vi. Partisipasi Aktif Indonesia dalam G20.

Indonesia selama ini telah memainkan peran aktif dalam pembahasan isu dan agenda kerja sama G20, antara lain tercermin dari dimasukkannya komitmen penurunan debt-to-GDP ratio dan target jangka menengah budget deficit dalam accountability assessment di G20 – medium term fiscal objective, disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam bentuk intervensi di G20 Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting, Washington, DC, Amerika Serikat, 10-11 Oktober 2013; serta Kesepakatan Presidensi Australia melibatkan Ketua ASEAN 2014 (Myanmar) untuk terlibat aktif dalam setiap pertemuan G20 dimulai pada saat Pertemuan Sherpa I yang berlangsung di Canberra, Australia pada tanggal 11-13 Desember 2013. Variabel GDP sebagai timbangan terbesar dalam penentuan formula kuota saham IMF;

vii. Peningkatan Kerja Sama Indonesia Dengan OECD.

Pada tahun 2013, Kementerian Keuangan berhasil meningkatkan kerja sama dengan OECD khususnya terkait pelaksanaan beberapa survey dan review oleh OECD di Indonesia maupun kegiatan seminar dan workshop serta koordinasi dengan instansi terkait.

viii. International Seminar on Structural Policy Challenges in Indonesia: Medium-Term Challenges and Responses.

Seminar dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2013 di Aula Djuanda, Gedung Djuanda I, Lantai Mezzanine, Kementerian Keuangan. Seminar dihadiri sekitar 150 peserta yang berasal dari berbagai institusi publik, lembaga penelitian, perwakilan negara sahabat dan lembaga multilateral, dan pelaku usaha. Seminar terbagi ke dalam tiga sesi dengan dua sesi awal mendiskusikan kajian OECD atas perekonomian kawasan. Sementara sesi terakhir mempresentasikan paper pemenang lomba penulisan ilmiah yang berkaitan dengan kebijakan struktural.

7. Seminar Nasional Pembiayaan Perubahan Iklim: Optimalisasi Peran Pembiayaan Publik dan Swasta Dalam Mendukung Upaya Penuhunan Emisi Gas Rumah Kaca

Seminar dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 23 - 24 Oktober 2013, bertempat di Hotel Pullman, Jakarta. Seminar dihadiri oleh 300 peserta dari berbagai kalangan baik pemerintahan, dunia usaha/swasta/NGO maupun kalangan akademisi. Seminar tersebut diselenggarakan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana tertuang dalam perpres 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Tujuan dilaksanakan seminar ini selain untuk memperingati hari uang yang ke-67 juga merupakan kelanjutan dari seminar internasional yang diselenggarakan oleh PKPPIM pada tahun 2012 lalu yang juga diarahkan untuk dapat menjadi forum interaktif yang mempertemukan para stakeholders di bidang pembiayaan perubahan iklim serta menggali masukan mengenai opsi-opsi serta optimalisasi pembiayaan perubahan iklim baik dari sektor publik, swasta maupun internasional.



Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan

SEKRETARIAT ORGANISASI & KEPEGAWAIAN



A. Penataan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang fiskal, ekonomi, keuangan dan kerja sama internasional saat ini BKF didukung oleh 457 pegawai (per 31 Desember 2013) yang terdiri dari 135 pejabat Eselon, 20 tenaga fungsional Peneliti dan 302 pelaksana dengan berbagai latar belakang pendidikan dan keilmuan yang bermuara pada satu tujuan yaitu menjadikan BKF sebagai center of excellence.

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

BKF sebagai salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan diwajibkan untuk selalu melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh, untuk itu BKF selalu melakukan peningkatan dalam bidang kompetensi pegawai baik meningkatkan pegawai yang ada di dalam BKF maupun melakukan penerimaan pegawai baru sesuai dengan kebutuhan BKF melalui seleksi penerimaan pegawai secara ketat dan profesional. Pegawai BKF saat ini terdiri dari 124 pegawai golongan II, 285 pegawai golongan III serta 62 pegawai golongan IV.

Golongan	Jumlah	%
I	0	0.0
II	124	26.3
III	285	60.5
IV	62	13.2
Jumlah	471	

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Hingga akhir tahun 2013, pegawai BKF sebagian besar telah berpendidikan tinggi, yaitu S1/D4 sebanyak 168 orang, S2 sebanyak 151 orang dan S3 sebanyak 16 orang. Sedangkan sisanya berpendidikan D3, D1 dan SLTA. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan agar memiliki etos kerja yang tinggi, pengetahuan yang luas, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan, cakap dan tanggap terhadap kondisi yang sedang berkembang, kreatif, inovatif, serta memiliki kemampuan analisis dan meneliti yang tinggi.

Pendidikan	Jumlah	%
S3	16	3.4
S2	151	32.1
S1/D4	168	35.7
D3	72	15.3
SD-D1	64	13.6
Jumlah	471	

3. Komposisi Pegawai

Berdasarkan Usia Menilik klasifikasi pegawai berdasarkan usia. BKF masuk dalam kategori organisasi produktif yang terlihat pada grafik usia dibawah ini. Dimana usia kurang dari 30 tahun ada pada jumlah terbanyak dengan 199 pegawai. Lalu rentang usia 30-40 tahun dengan 116 pegawai, 40-50 tahun dengan 110 pegawai dan 46 pegawai diatas usia 50 tahun. Dengan perencanaan formasi organisasi yang didasarkan pada kompetensi dan analisis beban kerja pada tiap-tiap unit diharapkan BKF akan menjadi unit organisasi yang berkualitas.

Usia	Jumlah	%
≤30	199	42.3
31-40	116	24.6
41-50	110	23.4
>50	46	9.8
Jumlah	471	

B. Program Pengembangan Pegawai

Pada tahun 2013, program pengembangan pegawai BKF masih tetap melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya. Secara garis besar, program pengembangan pegawai BKF dilakukan melalui diklat/training/workshop/seminar dan beasiswa S2/S3 baik yang dilaksanakan di dalam negeri maupun luar negeri.

1. Training/Workshop/Seminar

Pengembangan pegawai BKF melalui training/workshop/seminar berdasarkan inisiasi penyelenggaraan dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu

- Kegiatan Diklat yang diselenggarakan oleh pusdiklat-pusdiklat pada BPPK. Diklat-diklat yang diselenggarakan BPPK biasanya sudah terjadwal, dan BKF tinggal mengirimkan peserta untuk ikut serta dalam diklat tersebut. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan oleh BPPK antara lain :
 - . Diklat Jabatan, seperti : prajabatan, Diklatpim serta Diklat Penyesuaian Ijazah dan diklat softkompetensi yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pengembangan SDM
 - . Diklat kompetensi teknis yang mendukung pelaksanaan tugas di bidang keuangan negara, seperti: IT, bahasa, Pengadaan Barang

- dan Jasa, Pengelolaan BMN dll yg diselenggarakan Pusklat Keuangan Umum, Pusklat Anggaran dan Perbendaraan, Pusklat Perimbangan Keuangan dan Kekayaan Negara serta Pusklat Pajak
- Kegiatan Diklat yang merupakan inisiatif dari para pegawai BKF. Training/ workshop/ seminar yang dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari dapat diikuti oleh setiap pegawai BKF, dengan cara diusulkan dan direkomendasikan oleh pejabat eselon II terkait untuk difasilitasi Sekretariat BKF pembiayaan atau penyelenggaraannya.
 - Kegiatan diklat yang dilakukan oleh Sekretariat BKF guna meningkatkan kompetensi para pegawai BKF melalui in House Training dan pengiriman peserta dalam diklat/training yang diselenggarakan oleh lembaga training profesional .
 - Kegiatan diklat yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon II yang memperoleh program bantuan grant/hibah terutama untuk peningkatan kompetensi teknis spesifik.

2. Beasiswa S2/S3

Dalam rangka pemenuhan target rasio pegawai lulusan S2/S3 mencapai 40% dari total pegawai BKF, para pegawai BKF telah diberikan kesempatan untuk memperoleh beasiswa S2/S3 melalui beberapa program bea siswa antara lain :

- Australian Award
Saat ini BKF menjadi salah satu key organization dari 12 organisasi di Indonesia yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh beasiswa S2/S3 dari Australia (ADS dan ALA). Hal ini karena para peserta dari BKF hanya akan bersaing dengan peserta seleksi dari sesama keyorganization untuk memperebutkan 50% dari total scholarship yang diberikan ke Indonesia (300 bea siswa S2/S3). Sampai dengan saat ini terdapat 36 penerima beasiswa tersebut, terdiri dari 32 S2 dan 4 S3.
- Beasiswa GFMRAP
Sebagian dana program GFMRAP telah dimanfaatkan untuk program beasiswa S2 maupun S3 bagi para pegawai BKF. Program beasiswa

ke universitas dalam negeri dan luar negeri (Australia dan Jerman) sebanyak 7 S3 dan 12 S2.

- Beasiswa Intern BKF
Dalam rangka pelaksanaan program talent management, BKF bekerja sama dengan lembaga donor (USAID dan AUSAID) dan universitas di dalam negeri (UI dan UGM) dan universitas di luar negeri (GSU, ANU dan IUJ) menyelenggarakan program Master Dual Degree bidang Ilmu Ekonomi dengan kurikulum tailor made.
- Beasiswa Lainnya
Pegawai BKF yang potensial untuk melanjutkan program S3 dan S3 diberikan kesempatan untuk secara mandiri mendapatkan beasiswa atau mengikuti program beasiswa lainnya, antara lain : program SPIRIT (PPSDM BPPK), program SEADI USAID, program Ancora, program KOICA, JICA, IRTI-IDB dan ADB.

C. Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, BKF telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam kerangka reformasi baik di bidang SDM. Proses bisnis maupun organisasi.

1. Assessment Center

Tahun 2011 telah melaksanakan Assessment Center terhadap 33 orang pegawai dengan rincian 1 orang pejabat eselon III, 12 orang pejabat eselon IV dan 19 orang pelaksana. Sampai dengan tahun 2013 sebanyak total 169 pegawai Badan Kebijakan Fiskal telah mengikuti Assessment Center yang terdiri dari 6 orang pejabat eselon II, 30 orang eselon III, 98 orang eselon IV, 11 orang pejabat fungsional peneliti dan 24 orang pelaksana.

Selain itu, pada tahun 2013 Badan Kebijakan Fiskal juga telah melakukan perbaruan tools yang selama ini digunakan dalam kegiatan assessment center di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.

2. Survei Kepuasan Pegawai

Survey Kepuasan pegawai telah dilakukan mulai tahun 2009. Pada tahun 2013 tingkat kepuasan pegawai di BKF sebesar 3,19 (skala 5) atau Cukup

Puas . Angka ini tidak berbeda jauh dengan persepsi pegawai terhadap kepuasan bekerja di BKF sebesar 3,39 atau Cukup Puas. Sedangkan pada tahun 2012, tingkat kepuasan pegawai BKF relatif tetap atau konsisten dibanding tahun 2012 yaitu sebesar 3,21 (skala 5) atau cukup puas dengan nilai persepsi tingkat kepuasan sebesar 3,63.



SEKRETARIAT PERENCANAAN & KEUANGAN

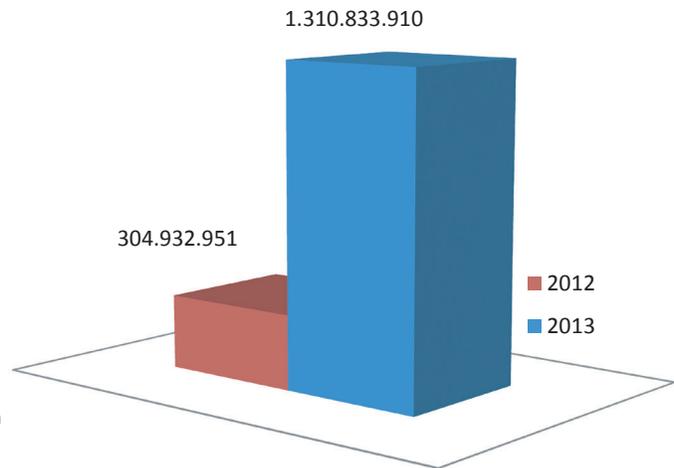


1. Pendapatan dan Hibah BKF

Realisasi Pendapatan dan Hibah BKF pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp1.310.833.910. Dalam DIPA Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2013 tidak memiliki estimasi pendapatan. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah adalah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.

Realisasi pendapatan dari PNBP pada TA 2013 sebesar Rp1.005.900.959. Kenaikan tersebut terutama bersumber dari Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL sebesar Rp1.293.157.714 dan Pendapatan dari Pemindahan BMN Lainnya berupa penjualan bongkaran gedung Arsip BKF sebesar Rp12.000.000. Perbandingan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2013 dan 2012 disajikan dalam tabel 1

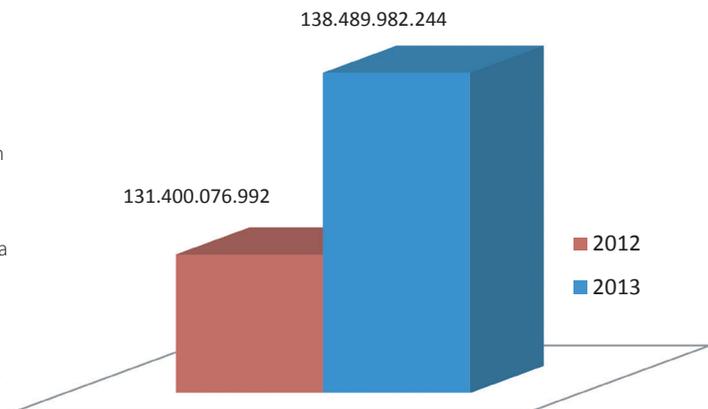
Realisasi PNBP TA 2012-2013



2. Belanja BKF

Realisasi belanja Badan Kebijakan Fiskal per kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 disajikan dalam tabel 3. Realisasi belanja Badan Kebijakan Fiskal pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp138.489.980.231 atau sebesar 87,88 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp233.391.004. Anggaran dan realisasi belanja menurut jenis belanja Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel 4. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp7.089.905.252 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh mening-

Realisasi Belanja TA 2012-2013



Tabel 1: Perbandingan Realisasi PNBP BKF Tahun Anggaran 2012 dan 2011

No.	Uraian	2013	2012	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
1	Pend. Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri	-	174.405	(174.405)	(100,00)
2	Pend. dari Pemindahtangan BMN Lainnya	12.000.000	-	12.000.000	100,00
3	Pendapatan Jasa Giro	2.224	-	2.224	100,00
4	Penerimaan Kembali Peg. Pusat TAYL	5.673.972	558.727	5.115.245	915,52
5	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	1.293.157.714	278.818.125	1.014.339.589	363,80
6	Pendapatan Pelunasan Piutang non Bendahara	-	22.303.922	(22.303.922)	(100,00)
7	Penerimaan Kembali Persekot/UM Gaji	-	3.077.772	(3.077.772)	(100,00)
	Jumlah	1.310.833.910	304.932.951	1.005.900.959	329,88

katnya belanja pegawai dan belanja barang. Perbandingan realisasi belanja Tahun Anggaran 2013 dan 2012 dapat dilihat pada Tabel 4.

a. Belanja Pegawai BKF

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp25.515.252.069, sedangkan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp22.377.338.207. Kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar 14,02 persen antara lain disebabkan oleh :

1. kenaikan belanja gaji pokok seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai
2. kenaikan tunjangan fungsional PNS terkait dengan pembayaran rapel tunjangan fungsional peneliti BKF

b. Belanja Barang BKF

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp108.893.107.867 dan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp87.372.580.385. Kenaikan realisasi belanja barang sebesar 24,63 persen antara lain disebabkan oleh terselenggaranya pertemuan internasional dalam rangka Indonesian APEC Chairmanship 2013. Kegiatan yang telah diselenggarakan yaitu :

1. Finance and Central Bank Deputies Meeting tanggal 26-27 Februari 2013 di Hotel Kempinsky, Jakarta
2. Workshop on Infrastructure tanggal 22-23 April 2013 di Aryaduta Hotel, Makassar
3. Senior Finance Officials Meeting tanggal 22-23 Mei 2013 di Manado, Sulawesi

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Belanja BKF per kegiatan Tahun Anggaran 2013

Kode	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja	%
1740	Perumusan Kebijakan APBN	7.343.238.000	6.547.270.184	89,16
1741	Perumusan Kebijakan Ekonomi	12.190.479.000	10.231.942.850	83,93
1742	Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral	10.542.508.000	10.413.346.874	98,77
1743	Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNPB	8.850.249.000	8.482.398.839	95,84
1744	Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan	10.717.485.000	6.914.016.758	64,51
1745	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal	62.703.439.000	55.306.751.276	88,20
5135	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral	45.245.080.000	40.827.644.454	90,24
Total Belanja Kotor		157.592.478.000	138.723.371.235	88,03
Pengembalian Belanja			(233.391.004)	-
Belanja Netto		157.592.478.000	138.489.980.231	87,88

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja BKF Tahun Anggaran 2013

Kode	Jenis Belanja	Uraian	Anggaran	Realisasi Belanja	Naik/Turun %
51	Belanja Pegawai		26.883.827.000	25.515.252.069	94,91
52	Belanja Barang		125.838.776.000	108.893.107.867	86,53
53	Belanja Modal		4.869.875.000	4.081.620.295	83,81
		Jumlah	157.592.478.000	138.489.980.231	87,88

Tabel 4. Realisasi Belanja BKF Tahun Anggaran 2012-2013

Kode	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
		2013	2012	Rp	%
51	Belanja Pegawai	25.515.252.069	22.377.338.207	3.137.913.862,00	14,02
52	Belanja Barang	108.893.107.867	87.372.580.385	21.520.527.482,00	24,63
53	Belanja Modal	4.081.620.295	21.650.158.400	(17.568.538.105,00)	(81,15)
Jumlah		138.489.982.244	131.400.076.992	7.089.905.252,00	5,40

4. Asia Pacific Financial Inclusion Forum (co-hosted with ABAC and ADB) tanggal 11-12 Juni 2013 di Batam
5. APEC Workshop on Trade Finance tanggal 01 Juli 2013 di Lombok
6. The Second APEC Workshop on Infrastructure tanggal 28 Agustus 2013
7. APEC Finance Ministers Meeting (AFMM) tanggal 17-20 September di Bali.

C. Belanja Modal BKF

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012 masing-masing adalah sebesar Rp4.081.620.295 dan Rp21.650.160.400. Penurunan realisasi Belanja Modal sebesar 81,15 persen disebabkan oleh tertundanya kegiatan renovasi gedung R.M. Notohamiprodoj terkait dengan kebijakan pemotongan anggaran belanja Kementerian yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2013. Selain itu, belanja meubelair untuk penataan ruang kerja setelah renovasi juga mengalami penundaan.

3. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri BKF

a. Penerimaan Pinjaman Luar Negeri BKF

Dalam rangka membantu penyempurnaan manajemen keuangan Pemerintah Indonesia, World Bank telah memberikan pinjaman dengan nomor PHLN LN/Cr 4762-IND dan 4026-IDA : Government Financial Management and Revenue administration Project (GFMRAP) sebesar USD1.661.730,32 setara dengan Rp15.121.745.912 (US\$1 = Rp9.100).

Pinjaman tersebut berlaku efektif mulai tanggal 22 Maret 2005 dan mempunyai closing date tanggal 31 Desember 2013 serta telah mendapat register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan nomor 10694001 dan 10695701.

Pada Tahun Anggaran 2013, BKF mempunyai pagu anggaran untuk kegiatan GFMRAP sebesar Rp977.233.000. Dari anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp567.093.066 atau 58,03 persen, sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp410.139.934. Realisasi anggaran kegiatan GFMRAP tersebut digunakan untuk biaya Training

pegawai BKF dengan rincian sebagai berikut:

- 5 orang pegawai di Malaysia
- 3 orang pegawai di Amerika Serikat
- 4 orang pegawai di Singapura

b. Penerimaan Hibah Luar Negeri BKF : Hibah TA ADB 4872-INO (70712601)

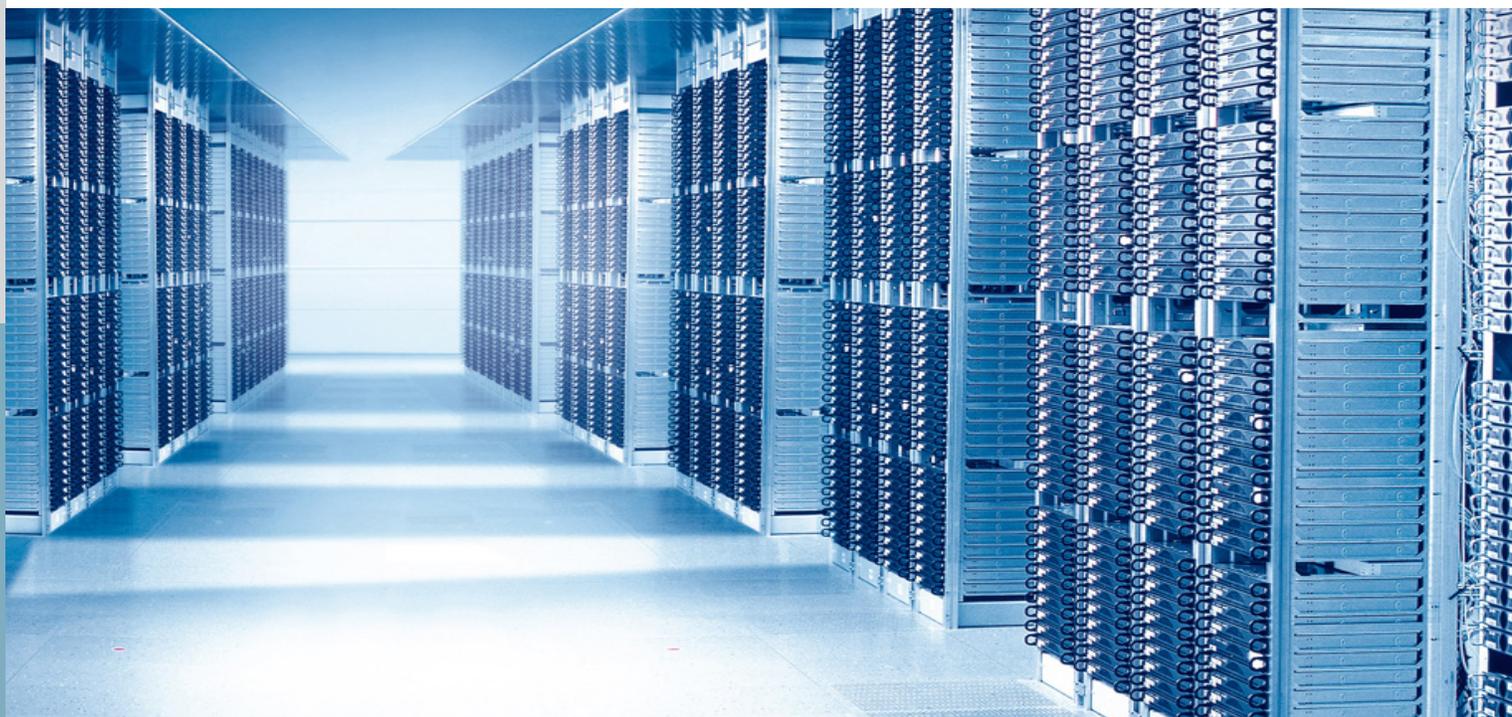
Dalam rangka membantu penyediaan infrastruktur di Indonesia, World Bank melalui Asian Development Bank berkomitmen untuk memberikan hibah kepada Pemerintah Indonesia dalam bentuk Technical Assistance dengan nomor PHLN 4872-INO : Enhancing Private Sector Participation in Infrastructure Provision.

Hibah tersebut berlaku efektif mulai tanggal 12 April 2007 dan mempunyai closing date tanggal 31 November 2011. Pihak ADB telah memperpanjang masa closing date sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2013. Hibah dimaksud telah mendapat register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan nomor 70712601.

Pada Tahun Anggaran 2013 pagu anggaran untuk Hibah Technical Assistance ADB 4872-INO sebesar Rp2.754.279.000, yang terdiri dari :

1. Belanja Barang Operasional Lainnya sebesar Rp1.525.502.000
2. Belanja Jasa Konsultan sebesar Rp1.073.174.000
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp155.603.000

SEKRETARIAT PRASARANA TEKNOLOGI & INFORMASI



A. Teknologi Informasi

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sudah merupakan suatu kebutuhan mendasar dalam aktivitas sehari-hari baik dalam lingkungan pemerintahan, dunia industri, maupun masyarakat luas. Teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang pesat saat ini sangat mempermudah aktivitas setiap individu dalam mendapatkan dan menyebarkan informasi. Informasi menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh semua orang, semua kalangan baik itu instansi pemerintah maupun swasta bahkan semua negara. Negara-negara maju seperti Jepang, Amerika dan negara maju lainnya tidak pernah lepas dari penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu ukuran maju tidaknya suatu negara adalah penguasaan TIK.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal akan mampu meningkatkan peran aparatur negara dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Pemanfaatan IT pada pemerintahan bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola organisasi yang lebih baik, sehingga mampu menyediakan layanan informasi tepat guna bagi stake holder. Saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik. Namun, secara keseluruhan pemanfaatan TIK oleh instansi pemerintah masih dalam tahap awal dan belum dapat memenuhi apa yang diharapkan. Pemanfaatan TIK dinyatakan optimal jika menghasilkan pelayanan publik yang efisien baik dari segi biaya, waktu, dan tenaga.

Badan Kebijakan Fiskal sebagai salah satu unit di lingkungan Kementerian Keuangan juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Peran dan tugas BKF dalam merancang kebijakan fiskal dan menganalisa perkembangan ekonomi terkini memerlukan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang handal agar dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri keuangan secara cepat, tepat dan akurat.

Secara garis besar sampai dengan akhir tahun 2013, hasil dari pebenahan tersebut dapat dilihat dari kondisi hardware (perangkat keras), termasuk jaringan, maupun software (perangkat lunak) yang digunakan BKF.

1. Perangkat Keras (Hardware)

Sejak tahun 2008, BKF secara bertahap telah melakukan pembenahan-pembenahan terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan TIK agar selaras dengan sasaran strategis, visi dan misi BKF. Pada tahun 2009 BKF telah melakukan berbagai perbaikan sarana dan prasarana (hardware) seperti perbaikan jaringan LAN, pembangunan ruang server/data center, peningkatan akses informasi internet, dan mencukupi personal computer (PC) untuk para pegawai/pejabat dan peneliti.

Hingga akhir tahun 2013, menurut data Barang Milik Negara yang dikelola, BKF tercatat memiliki PC Desktop secara keseluruhan sebanyak 364 unit yang tersebar di tiap-tiap pusat. Hal ini berarti bahwa kebutuhan seluruh pegawai BKF yang berjumlah 450 orang sudah hampir terpenuhi. Sementara itu, untuk mengatur lalu lintas di jaringan, menyimpan berbagai macam aplikasi yang dapat diakses oleh klien dan menyimpan data baik yang digunakan klien secara langsung maupun data yang diproses oleh server aplikasi, BKF telah memiliki data center/ruang server yang terletak di lantai 5 gedung RM Notohamiprodojo.

2. Pengembangan Aplikasi (Software)

Selama tahun 2013, ada beberapa aplikasi yang dikembangkan oleh BKF, baik itu pengembangan dari aplikasi yang telah dibuat sebelumnya maupun aplikasi baru. Sebagai contoh, aplikasi Economic Executive Dashboard telah dikembangkan menjadi versi simpelnya yaitu Mobile Dashboard. Aplikasi ini ditujukan untuk dapat dilihat pada perangkat mobile seperti smartphone, namun tetap juga dapat dilihat melalui pc desktop atau laptop seperti versi sebelumnya. Karena ini merupakan versi simpel dari dashboard, maka animasi yang ada pada dashboard pun dikurangi. Sehingga tidak mem-

beratkan pengguna yang melihatnya melalui perangkat mobile. Economic Executive Dashboard (EED) merupakan instrumen berbasis TIK untuk menunjang kegiatan di Kementerian Keuangan terutama dalam rangka menghasilkan kebijakan fiskal yang cepat tanggap, akurat dan kredibel. Tampilan EED dapat dibagi dalam 5 kategori tampilan utama yaitu: market watch (pasar), makro ekonomi, fiskal, moneter, dan modelling (what if analysis). EED ditampilkan dalam ruang navigasi di Badan Kebijakan Fiskal yang disebut WAR Room. WAR adalah singkatan dari Waspada, Antisipatif, dan Responsif.

Selain itu, pada tahun 2013 BKF juga terus mengembangkan aplikasi guna mendukung tugas pokok BKF, yaitu antara lain dengan mengembangkan aplikasi BKF Database explorer. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web yang merupakan gudang data (file sharing) BKF yang dapat diakses dari luar kantor sebagai data pendukung saat presentasi di DPR maupun di luar negeri sehingga lebih efektif dan efisien. Aplikasi-aplikasi lain yang telah dibangun BKF antara lain Sistem Informasi dan Database APBN (PKAPBN), Sistem Manajemen Dokumen (PPRF)

3. Pengelolaan Website BKF

Sebagai salah satu cara untuk menyebarkan atau mempublikasikan kebijakan fiskal atau hasil-hasil kajian BKF kepada masyarakat dilakukan melalui website (www.fiskal.depkeu.go.id). Menurut catatan, berita yang paling banyak mendapat perhatian dan di klik pengunjung website BKF adalah hasil-hasil kajian yang terkait masalah fiskal. Selain itu, fitur kurs pajak yang diterbitkan setiap hari Senin juga yang paling banyak diakses oleh pengunjung website BKF. Untuk pelayanan internet kepada seluruh pegawai. Sementara itu, untuk memberikan informasi yang bersifat internal, BKF juga telah membangun portal intranet yaitu <http://portal.fiskal.depkeu.go.id>.

4. Persiapan Integrasi dengan TIK Pusat

Sejalan dengan kebijakan Kementerian Keuangan bahwa secara bertahap akan dilakukan integrasi TIK

baik yang terkait dengan perangkat keras maupun perangkat lunak (aplikasi). Sehubungan dengan itu, BKF telah melakukan koordinasi dengan Pusintek Sekretariat Jenderal mengenai hal tersebut. Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat maka pada tahun 2011 telah dilakukan persiapan integrasi seperti mendata ulang perangkat TIK seperti server yang akan diintegrasikan. Tahun 2013 dilakukan pengalihan langganan internet, Bloomberg dan CIEC ke TIK Pusat.

B. Potret Perpustakaan BKF

Perpustakaan itu seperti sebuah gerbong kereta api atau bis kota. Maju mundurnya gerbong kereta atau bis kota tersebut tergantung pada masinis atau sopirnya. Kereta api atau bis kota dapat berlari kencang, lambat, memuat banyak orang ataupun kosong melompong. Begitu juga perpustakaan. Maju mundurnya perpustakaan itu tergantung dari pengelolaannya (pustakawan). Pada kenyataannya, memang tidak mudah membangun perpustakaan ideal yang ramai dikunjungi dan menjadi sumber informasi bagi pengunjung (pemustaka).

Jika kita tengok kebelakang, bentuk perpustakaan ideal selalu berubah dari masa ke masa. Mungkin sepuluh tahun yang lalu, perpustakaan ideal dapat dilihat dari beberapa indikator seperti besarnya gedung dan jumlah koleksi yang tersedia. Sekarang, indikator ideal tersebut sudah berubah menjadi sejauh mana perpustakaan mampu memenuhi kebutuhan pengunjungnya. Besarnya gedung dan banyaknya koleksi mungkin masih menjadi faktor penting, namun harus didukung oleh kebutuhan lain seperti pemenuhan kebutuhan informasi, rekreasi, dan didukung oleh pelayanan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Saat ini, perpustakaan mau tidak mau dituntut untuk mampu berubah mengikuti perubahan sosial pemakainya. Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi telah banyak mengubah karakter sosial pemakainya. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu cepat jelas berdampak secara signifikan terhadap eksistensi perpustakaan. Oleh karena itu, sebuah perpustakaan harus tanggap

mengenai trend TIK tersebut. Tuntutan kemudahan akses informasi yang serba instan, cepat, tepat, dan adanya ketersediaan fasilitas (aplikasi) akan menjadi tantangan tersendiri bagi pustakawan. Pada akhirnya perpustakaan nantinya tidak hanya sekedar menjadi tempat mencari buku atau membaca majalah, tetapi menjadi semacam one-stop shelter bagi pemustaka dimana mereka mereka: (i) berinteraksi dengan orang lain, (ii) mencari informasi yang dibutuhkan, (iii) berbagi pengetahuan, (iv) merasa termotivasi untuk melakukan inovasi dan kreatifitas.

Lalu timbul pertanyaan di benak penulis. Bagaimana kondisi perpustakaan Badan Kebijakan Fiskal? Bagaimana kondisi gedungnya? Berapa jumlah koleksinya? Siapa dan berapa banyak pengunjungnya? Apakah pelayannya sudah didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi? Apakah sudah menjadi one-stop shelter?

Perpustakaan BKF terletak di Jl. Dr Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 2. Lokasinya cukup representative, luas ruangan relative cukup, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Perpustakaan dilengkapi dengan ruang baca dan beberapa computer untuk mencari buku atau informasi yang tersedia. Pengunjung juga bebas untuk mengakses internet.

- Koleksi

Secara bertahap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan BKF akan terus dievaluasi dan disempurnakan agar para pengunjung atau pegawai BKF dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Menurut data yang ada, hingga akhir September 2013, jumlah koleksi buku tercatat sebanyak 7.509 judul dengan jumlah eksemplar sebanyak 11.687 buah. Hal ini berarti hampir setiap judul buku ada lebih dari satu buah. Perpustakaan BKF juga memiliki koleksi berbagai jurnal/ bulletin, buku statistik yang dikeluarkan oleh BPS, Bank Indonesia dan lembaga lainnya. Selain buku, Perpustakaan BKF juga memiliki koleksi dokumen penting seperti buku Nota Keuangan dan RAPBN sejak tahun 1968 hingga saat ini, dan buku peraturan perundang-undangan dari tahun 1968.

Untuk informasi harian dan mingguan, perpustakaan BKF berlangganan harian Kompas, Media Indonesia, Republika, Bisnis Indonesia, Tempo, Sindo, Kontan dan Jakarta Post. Sedangkan perpustakaan BKF juga berlangganan majalah Tempo, Gatra, Warta Ekonomi, Info Bank, dan Business News.

